

**STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN  
MINAPOLITAN DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN LOKAL  
(STUDI PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya

**FRADITYA IBNU RIZAL  
NIM. 145030101111001**



**Dosen Pembimbing:  
Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2018**

## MOTTO

"Hanya ada dua kata yang menuntun anda pada kesuksesan.

Kata-kata itu adalah "Ya" dan "Tidak" Tidak diragukan,

Anda telah sangat ahli untuk berkata "Ya."

Sekarang berlatihlah berkata "Tidak."

Cita-cita anda bergantung padanya"

**(Jack Canfield)**

"Setiap orang memiliki pilihan hidup masing-masing

Pilihan hidup yang akan kita tempuh

Lakukanlah dengan sebaik-baiknya

Sebelum kita tidak punya pilihan lagi".

**(Fraditya Ibnu Rizal)**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Dalam  
Meningkatkan Perekonomian Lokal (Studi Pada Dinas  
Perikanan Kabupaten Lamongan)

Disusun oleh : Fraditya Ibnu Rizal

NIM : 145030101111001

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 22 Mei 2018

Pembimbing,

  
**Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D**  
**NIP. 19670217 199103 1 000**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 22 Mei 2018

Mahasiswa



Nama : Fraditya Ibnu Rizal

NIM : 145030101111001

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Mei 2018

Waktu : 10.00 - 11.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Fraditya Ibnu Rizal

Judul : Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal (Studi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan)

**Dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

  
**Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D**  
**NIP. 19670217 199103 1 010**

Anggota



**Wike, S.Sos, M.Si, DPA**  
**NIP. 19701126 200212 2 005**

Anggota



**Dr. Mochammad Makmur, MS**  
**NIP. 19511028 198003 1 002**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, atas kehendak dan pertolongan Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini kepada Sang Inspirator dalam hidup saya, Bapak Marsudi. Kepada beliau yang selalu bekerja keras dalam menghidupi pendidikan anak-anaknya dan tidak pernah sekalipun mendengar keluhan kesahnya. Serta kepada sosok perempuan yang saya kagumi, Ibu Setyowigati. Seorang Ibu yang selalu mendoakan anak-anaknya demi kesuksesan di dunia dan di akhirat. Terimakasih teruntuk saudara-saudara saya, Najwa Nurkhoirunnissa dan Berryl Hamizan Rabbani, yang selalu menghibur saya ketika saya mengalami keputusasaan dalam proses penelitian ini.

Fraditya Ibnu Rizal, 2018. **Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal (Studi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D. 185 halaman + xvii

---

### RINGKASAN

Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lamongan dilaksanakan berdasarkan oleh Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.32/MEN/2010 dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/152/Kep/413.013/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010 setidaknya ada tujuh lokasi kawasan perikanan budidaya diantaranya Kecamatan Glagah sebagai pusat kawasan minapolitan dan Kecamatan Lamongan, Deket, Karangbinangun, Turi, Karanggeneng, Kalitengah sebagai kawasan pendukung (*Hinterland*).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dibatasi pada fokus penelitian, yaitu: a) Strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan perekonomian lokal di Kabupaten Lamongan, dan b) Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan. jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, selain itu menggunakan metode analisis SWOT untuk menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan.

Hasil penelitian yang dilakukan didapati beberapa strategi yang digunakan dalam proses pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan, strategi itu antara lain yaitu: a) Pengembangan sentra produksi, b) Rantai dan Pelaku Bisnis, c) Pola pemasaran, d) Permodalan, dan e) Teknologi Produksi. Keempat strategi tersebut telah dilaksanakan di kawasan minapolitan berbasis budidaya perikanan tetapi secara keseluruhan semua strategi tersebut belum maksimal diterapkan semua ini didapat dari hasil observasi lapangan serta informasi yang didapat dari berbagai narasumber, untuk itu peneliti menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan dari beberapa aspek penghambat yang dapat mempengaruhi kegiatan pengembangan kawasan minapolitan yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah rekomendasi perbaikan kedepannya. Sehingga peneliti merekomendasikan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan untuk lebih memberikan perhatian kepada para pembudidaya dalam hal memberikan bantuan modal usaha dan pelatihan mulai dari proses budidaya sampai proses pemasaran produk kepada para konsumen agar dapat memperbaiki kualitas perikanan yang dijual sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

**Kata kunci: Minapolitan, Pengembangan, Strategi**



Fraditya Ibnu Rizal, 2018. **Strategy Development of Minapolitan Area in Improving The Local Economy (Study on Fisheries Departement in Lamongan)**. Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer : Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D. 185 pages + xvii

---

### SUMMARY

Development of minapolitan area in Lamongan is implemented on the basis of a decision by the Minister of Marine and Fisheries of the Republic Indonesia Number Kep. 32/MEN/2010 and follow up with the promulgation of the Decree of Regent Lamongan Number 188/152/KEP/413.013/2010 regarding the determination the area of Minapolitan Lamongan 2010, there are at least seven locations including aquaculture area such as Glagah as the center of minapolitan and Lamongan, Karangbinangun, Deket, Turi, Karanggeneng, Kalitengah as supporting area (*Hinterland*).

This research is a descriptive qualitative research is restricted to focus research, that is: a) strategy development the area of minapolitan-based aquaculture in improving local economies in Lamongan and b) factors-factors that influence the development the area of minapolitan-based aquaculture in Lamongan. Types data used consisted of primary data and secondary data. Data collection techniques used are observation, interview, and documentation. While the data analysis used are descriptive analysis through the stages of data collection, the condensation of the data, the presentation of data, and the conclusions, in addition to using the SWOT analysis method for finding the supporting factors and restricting factors in the implementation of the area development policy minapolitan-based aquaculture in Lamongan.

The results of the research conducted was found to be some of the strategies used in the process of developing minapolitan-based aquaculture in Lamongan, strategies that include: a) Development Production Center, b) Chain and Business Actors, c) Marketing Pattern, d) Fund/Capital and e) Production Technology. Fourth of these strategies have been implemented in the area of minapolitan-based aquaculture but overall these strategies have not been fullest applied, all of these obtained from observations in field as well as information obtained from various interviewees, for it researchers use SWOT analysis to get the recommendations of improvements of some aspects of the barrier to development activities that could affect the area of minapolitan which later developed into a recommendations of improvements going forward. So the researchers recommend Fisheries Agency Lamongan to give more attention to the cultivators in terms of providing venture capital and training assistance ranging from cultivation process until the process of marketing a product to the consumers in order to improve the quality of fishery that are sold so that able to improve the economy of the community.

**Keywords: Minapolitan, Development, Strategy**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dan juga Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita semua dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang yakni Adhinul Islam, beserta keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir kiamat kelak. Sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal (Studi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan)”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sekaligus Dosen Pembimbing yang telah bersedia

mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

3. Ibu Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
5. Keluarga Besar Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang senantiasa mengarahkan, mendampingi, membimbing, dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung
6. Masyarakat kawasan minapolitan yang senantiasa selalu bersedia memberikan informasi bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini
7. Saudara-saudariku tercinta yaitu Najwa Nur Khoirunnissa dan Berryl Hamizan Rabbani serta Keluarga Besarku yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa
8. Sahabatku dari zaman MABA dan teman seperjuangan (Muhammad Dwi Maulidin, M. Habib Yulianto, Dian Ratna Sari, Hannani Rahmawati, dan Retna Rifatul Azizah), serta teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini



9. Sahabatku yang di Lamongan (Yunita Ika Nurfaizah, M. Hidayat Surya Buana, dan Ahmad Muhaimin) yang senantiasa selalu membantu dalam melakukan penelitian dan memberikan bantuan dalam hal apapun untuk penyelesaian skripsi ini

10. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 5 April 2018

Fraditya Ibnu Rizal

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan dalam Administrasi Publik.....	15
1. Administrasi Publik .....	15
2. Administrasi Pembangunan .....	18
B. Perencanaan Pembangunan .....	20
1. Pengertian Perencanaan Pembangunan .....	20
2. Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan .....	22
C. Pembangunan Ekonomi Lokal.....	24
1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Lokal.....	24
2. Potensi Ekonomi Lokal .....	27
D. Konsep Strategi Pengembangan .....	28
1. Pengertian Strategi.....	28
2. Tipe-Tipe Strategi.....	29
3. Instrumen Strategi.....	30
4. Manajemen Strategi .....	31
5. Teori Analisis Lingkungan Internal (IFAS) dan Eksternal (EFAS).....	32
6. Analisis SWOT .....	36
7. Pengertian Pengembangan.....	40
8. Proses Pengembangan .....	42

E. Konsep Minapolitan.....	43
1. Pengertian Minapolitan.....	43
2. Tujuan dan Sasaran Minapolitan .....	45
3. Kawasan Minapolitan .....	46
F. Pengembangan Kawasan Minapolitan.....	48
1. Pengertian Pengembangan Kawasan Minapolitan.....	48
2. Tujuan Pengembangan Kawasan Minapolitan .....	50
3. Karakteristik Kawasan Minapolitan .....	52
4. Persyaratan Pengembangan Kawasan Minapolitan .....	55

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	59
B. Fokus Penelitian.....	60
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	62
D. Sumber dan Jenis Data.....	64
1. Sumber Data .....	64
2. Jenis Data.....	65
E. Teknik Pengumpulan Data .....	66
F. Instrumen Penelitian .....	68
G. Analisis Data.....	69

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

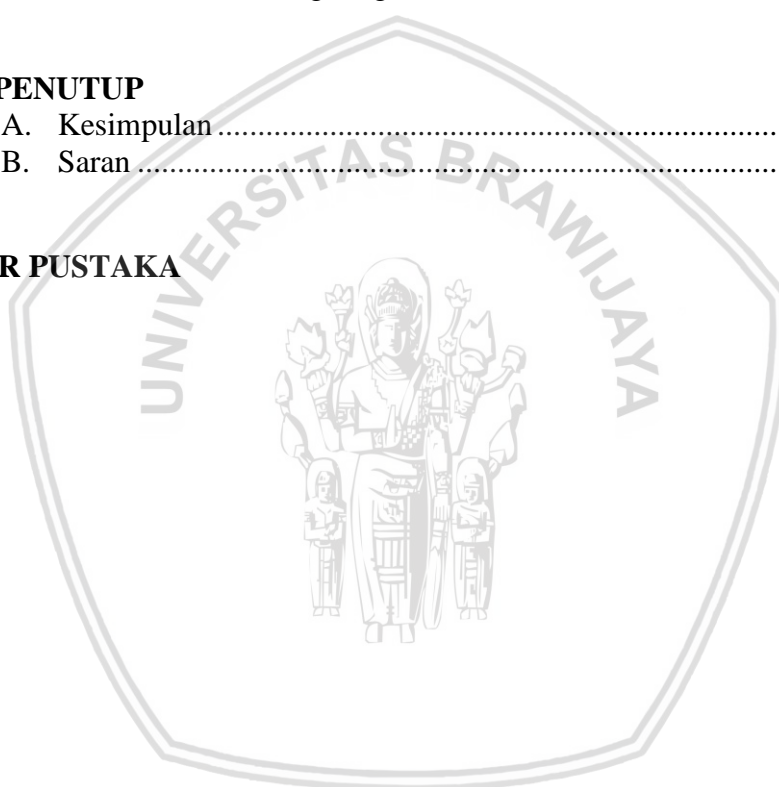
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	73
1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan.....	73
2. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan .....	82
B. Penyajian Data Fokus Penelitian .....	90
1. Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dalam Rangka Meningkatkan Produksi Perikanan sebagai Penggerak Perekonomian Lokal .....	90
a. Pengembangan Sentra Produksi.....	90
b. Rantai Pelaku Bisnis .....	94
c. Pola Pemasaran .....	101
d. Permodalan.....	106
e. Teknologi Produksi .....	111
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dalam Rangka Meningkatkan Produksi Perikanan sebagai Penggerak Perekonomian Lokal .....	117
a. Faktor Pendukung .....	117
b. Faktor Penghambat .....	121
C. Analisis Data.....	131
1. Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dalam Rangka Meningkatkan Produksi Perikanan sebagai Penggerak Perekonomian Lokal .....	131

a. Pengembangan Sentra Produksi.....	131
b. Rantai Pelaku Bisnis .....	133
c. Pola Pemasaran .....	135
d. Permodalan.....	136
e. Teknologi Produksi .....	137
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dalam Rangka Meningkatkan Produksi Perikanan sebagai Penggerak Perekonomian Lokal .....	139
a. Analisis Lingkungan Internal.....	140
b. Analisis Lingkungan Eksternal .....	145

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	161
B. Saran .....	163

## **DAFTAR PUSTAKA**



## Daftar Tabel

No	Judul	Halaman
1.	Rekapitulasi Data Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dari Tahun 2011-2015.....	7
2.	Matriks Internal (IFAS).....	34
3.	Matriks Eksternal (EFAS).....	35
4.	Matriks Internal-Eksternal (IE).....	36
5.	Matriks SWOT.....	38
6.	Matriks SWOT.....	72
7.	Luas Wilayah Kabupaten Lamongan Tiap Kecamatan.....	74
8.	Perkembangan PDRB Kabupaten Lamongan 2010-2014 (Juta Rupiah).....	81
9.	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perikanan.....	87
10.	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	89
11.	Asset/Modal Pokok Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.....	89
12.	Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Lamongan Tahun 2014.....	91
13.	Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Tahun 2015.....	92
14.	Rangking/Tingkat Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015.....	96
15.	Perkembangan Tenaga Kerja Perikanan di Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2015.....	97
16.	Harga Pasar Komoditas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2017.....	103
17.	Realisasi Anggaran Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun 2013-2016.....	107
18.	Panjang Ruas Jalan dan Perkerasan Jalan di Wilayah Kawasan Minapolitan....	108
19.	Matriks IFAS Faktor Lingkungan Internal.....	145
20.	Matriks EFAS Faktor Lingkungan Eksternal.....	150
21.	Analisis Matriks IE Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya.....	151
22.	Matriks SWOT Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya.....	156

## Daftar Gambar

No	Judul	Halaman
1.	Diagram Analisis SWOT.....	39
2.	Sketsa Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap.....	53
3.	Sketsa Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap.....	54
4.	Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana.....	69
5.	Peta Kabupaten Lamongan.....	75
6.	Lambang Kabupaten Lamongan.....	76
7.	Struktur Ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2014.....	80
8.	Grafik Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2014.....	82
9.	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.....	85
10.	Peta Minapolis dan <i>Hinterland</i> Berbasis Perikanan Budidaya di Kabupaten Lamongan.....	93
11.	Rantai dan Pelaku Bisnis Kegiatan Minapolitan di Kabupaten Lamongan.....	99
12.	Pola Pemasaran Produk di Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan.....	104
13.	Kincir-Kincir Air ( <i>Puddle Wheel</i> ).....	114
14.	Perbaikan Ruas Jalan Tambak.....	115
15.	Pelatihan Teknis Budidaya dan Pencegahan Penyakit.....	115
16.	Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik.....	116
17.	Diagram Analisis SWOT Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya.....	158

## Daftar Lampiran

No	Judul	Halaman
1.	Surat Keterangan Selesai Penelitian/Survey Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan.....	171
2.	Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010.....	172
3.	Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan.....	174
4.	Pedoman Wawancara.....	177
5.	Perhitungan Skor, Bobot dan Rating Lingkungan Internal.....	180
6.	Perhitungan Skor, Bobot dan Rating Lingkungan Eksternal.....	182
7.	Foto Dokumentasi Wawancara.....	184
8.	<i>Curriculum Vitae</i> .....	185





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memiliki banyak pulau, baik pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang berada di seluruh penjuru Indonesia berjumlah kurang lebih dari 17.508 pulau, dengan garis pantai lebih dari 104.000 km dan memiliki total luas laut sekitar 38 juta hektar atau sekitar 387.000 km<sup>2</sup> dari wilayah Indonesia (Adisasmito, 2015:38). Potensi laut di Indonesia tidak bisa diragukan lagi memiliki banyak wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang luas dan bermakna strategis yang memiliki nilai ekonomis, sumber daya kelautan juga mempunyai nilai ekologis. Di samping itu, kondisi geografis Indonesia terletak pada geopolitis yang strategis, yakni antara lautan Pasifik dan lautan Hindia yang merupakan kawasan paling dinamis dalam arus percaturan politik, pertahanan, dan keamanan dunia. Menurut Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2016) mengatakan bahwa kondisi geo-ekonomi dan geo-politik tersebut menjadikan sektor kelautan sebagai sektor yang penting dalam pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana struktur pemerintah daerah sudah sangat baik dengan pembagian urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan absolut dan konkuren, dimana urusan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya masih menjadi urusan dari pemerintah pusat semisal urusan (1) agama, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4)



politik luar negeri, (5) fiskal dan moneter, serta (6) yustisi (peradilan). Sementara urusan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang masih dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan konkruen ini sudah di serahkan ke daerah menjadi dasar adanya pelaksanaan otonomi daerah, adapun urusan pemerintah kongkruen yang sudah menjadi urusan dan kewenangan daerah terdiri lagi atas dua urusan yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi (1) perikanan dan kelautan; (2) pertanian; (3) kehutanan; (4) perindustrian; (5) perdagangan; (6) transmigrasi; (7) pariwisata; serta (8) energi dan sumber daya mineral.

Potensi perikanan dan kelautan di perairan Indonesia sangat potensial dalam pengembangan ekonomi perikanan maupun sektor kelautan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan adalah dengan mengeluarkan konsep kebijakan minapolitan. Konsep minapolitan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 Minapolitan adalah sebuah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Penetapan kawasan minapolitan telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut ada 179 Kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan yang tersebar pada 33 provinsi.

Adapun daerah yang tidak termasuk di dalam keputusan menteri ini dapat melaksanakan pengembangan kawasan minapolitan secara mandiri. Mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan. Khusus di Jawa Timur sendiri Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan ada 14 kabupaten/kota. Kawasan minapolitan yang ada di Jawa Timur meliputi Blitar, Trenggalek, Lamongan, Gresik, Malang, Tulungagung, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Pacitan, Kota Probolinggo, Tuban dan Sumenep.

Kawasan minapolitan menurut (Widjaja, 2013:16) merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan pendapatan rakyat. Pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi Minapolitan dikembangkan melalui peningkatan efisiensi dan optimalisasi. Mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan/atau pemasaran, serta jasa pendukung lainnya, yang dilakukan secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan.

Menurut Data *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2016) menyatakan bahwa diperkirakan potensi perikanan di Indonesia sebanyak 6,7 juta ton per tahun, sementara tingkat pemanfaatannya baru sekitar 59% dari potensi lestarnya serta kegiatan ekonominya hanya mampu menyumbang 20,06% dari total Produk Domestik

Bruto (PDB). Meningkatnya populasi dunia yang diperkirakan mencapai 6,8 miliar jiwa dengan demikian perlu adanya penyediaan ikan untuk dikonsumsi sebesar 17,2 kg/kapita/tahun. Pada saat tahun yang sama tingkat penyediaan ikan sebagai konsumsi Indonesia sudah jauh melebihi angka masyarakat dunia, yaitu sebesar 30 kg/kapita/tahun. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di dunia menuntut peningkatan juga dalam produksi ikan. Potensi yang besar pada sektor perikanan dan kelautan memberikan peluang kepada pemerintah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pembangunan ekonomi merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara terencana, terprogram, sistematis, dan berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat (Siagian, 2014:77). Untuk itu, perlu adanya perubahan pola pikir dan orientasi pembangunan dari yang sebelumnya terfokus pada daerah daratan sekarang bisa merubahnya ke pembangunan yang berfokus ke wilayah pesisir laut atau yang sering disebut wilayah maritim. Menurut Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2016) menyatakan bahwa peluang dalam mengembangkan usaha pada sektor maritim (perikanan) memiliki prospek yang sangat tinggi. Sehingga dengan adanya peluang tersebut dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diperkirakan mencapai USD 82 miliar per tahun.

Pengembangan kawasan minapolitan dengan pendekatan kawasan dan sentra produksi diharapkan mampu membina unit-unit produksi dan usaha agar dapat lebih fokus dan tepat sasaran. Penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan tidak hanya pada sentra produksi melainkan juga perdagangan

perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan, ataupun adanya kombinasi dari ketiga hal tersebut. Sehingga sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap menjadi motor utama penggerak ekonomi dikawasan minapolitan yang berupa pelabuhan perikanan ataupun Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sementara itu, penggerak utama minapolitan di bidang perikanan budidaya adalah sentra produksi dan perdagangan perikanan di lahan-lahan budidaya produktif

Pengembangan kawasan minapolitan juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan diversifikasi ekonomi pedesaan melalui peningkatan dalam berinovasi maupun teknologi sehingga akan menghasilkan diversifikasi produk yang kompetitif. Selain itu juga harus lebih meningkatkan akses pelaku perikanan terhadap sumberdaya produktif dan permodalan menjadi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan ekonomi pelaku perikanan yang berguna untuk mewujudkan hubungan yang sinergis antar pelaku usaha perikanan dari yang hulu sampai hilir. Pembangunan sarana dan prasarana juga diperlukan untuk mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi di kawasan minapolitan. Tujuan dari pengembangan kawasan minapolitan ini adalah sebagai pendorong untuk percepatan pengembangan wilayah-wilayah melalui kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga sebagai pendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan yang terkait antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten yang memiliki sistem usaha perikanan yang berdaya saing dan berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak

lingkungan) serta terdesentralisasi (wewenang berada di pemerintah daerah) di kawasan minapolitan.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan kedalam kawasan minapolitan menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013. Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan (2014) menyatakan bahwa semua itu didukung juga dengan garis pantai sepanjang 47 km dan luas laut  $\pm 902,2$  dan juga memiliki luas Kecamatan pesisir  $68.318 \text{ km}^2$  (Kecamatan Brondong dan Kecamatan Paciran) semua itu merupakan jalur strategis di wilayah Pantura (jalan daendles) yang menghubungkan Jakarta-Surabaya dan itu semua didukung dengan akses jalan yang cukup baik menuju pusat perekonomian di Jawa Timur yaitu Surabaya. Kawasan-kawasan minapolitan yang ada di Kabupaten Lamongan juga mendapat dukungan yang besar dari pemerintah daerah dengan adanya Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/152/Kep/413.013/2011 Perubahan Atas Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/213/Kep/413.013/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010 setidaknya ada tujuh lokasi kawasan perikanan budidaya dan dua lokasi sebagai kawasan perikanan tangkap.

Dilihat dari kondisi letak geografis dan dukungan yang besar dari pemerintah daerah, sehingga Kabupaten Lamongan memiliki potensi yang lebih besar dalam mengembangkan sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Dibawah ini merupakan rekapitulasi data hasil produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan pada tahun 2011-2015 sebagai berikut:

**Tabel 1. Rekapitulasi Data Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dari Tahun 2011-2015**

Subsektor	Tahun				
	2011 (Ton)	2012 (Ton)	2013 (Ton)	2014 (Ton)	2015 (Ton)
<b>Perikanan Tangkap</b>	<b>71.293,78</b>	<b>72.212,80</b>	<b>73.183,00</b>	<b>74.625,4</b>	<b>75.310,50</b>
<b>Perikanan Budidaya</b>	<b>36.628,80</b>	<b>37.245,17</b>	<b>39.201,38</b>	<b>42.346,96</b>	<b>46.604,9</b>

Sumber: [lamongankab.go.id/perikanan/index.php/2016](http://lamongankab.go.id/perikanan/index.php/2016)

Dilihat dari kedua tabel tersebut bahwasanya di Kabupaten Lamongan memiliki potensi besar dalam sektor perikanan baik tangkap maupun perikanan budidaya yang setiap tahun mengalami peningkatan produksi perikanan. Sehingga sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Lamongan untuk dikembangkan dengan konsep minapolitan tersebut. Hal ini dikarenakan sektor perikanan memberikan peluang yang besar untuk berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun Upaya yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Lamongan adalah membangun Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) di Pelabuhan Brondong, serta memberikan penyuluhan kepada para masyarakat nelayan atau pembudidaya yang berada di kawasan minapolitan untuk lebih menggunakan pendekatan industri dalam mengelola dan mengembangkan potensi perikanan.

Kegiatan minapolitan di Kabupaten Lamongan sendiri berada di beberapa kecamatan, untuk kawasan perikanan budidaya berada di Kecamatan Glagah sebagai pusat kawasan minapolitan perikanan budidaya dengan *hinterland* (kawasan pendukung) di Kecamatan Karangbinangun, Deket, Lamongan, Turi,



Karanggeneng, Kalitengah. Untuk kawasan perikanan tangkap berada di Kecamatan Paciran dan Brondong. Kecamatan Brondong menjadi pusat dari segala jenis kegiatan perekonomian di kawasan minapolitan perikanan tangkap dengan dibangunnya PPDI dan adanya Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) menjadikan titik temu (*terminal point*) yang membantu dalam kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi di darat serta dengan adanya PPN tersebut juga mampu melakukan revitalisasi terhadap fungsi dan perannya sebagai “*Centre of Excellence*” bagi pengembangan perikanan dan sebagai pusat pembinaan nelayan dan industri pengolahan hasil perikanan.

Menurut hasil *riset* pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan berbagai cara dalam pengembangan kawasan minapolitan yaitu dengan melakukan sinkronisasi program kegiatan pengembangan minapolitan dan meningkatkan sosialisasi pengembangan minapolitan di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan kenyataan tersebut bahwasanya pengembangan kawasan minapolitan harus selalu mengalami perbaikan dari berbagai aspek disetiap tahun. Dalam konteks pemerintah daerah yang harus selalu menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di kawasan minapolitan. Sehingga diperlukanya strategi yang lebih inovatif dan berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola dan mengembangkan kawasan minapolitan.

Adapun konsep penelitian ini dilaksanakan dengan perspektif atau pendekatan strategi pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lamongan dengan melihat potensi perikanan yang diimplementasikan melalui

pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan minapolitan terutama pada bidang perikanan budidaya. Hal tersebut didasari oleh keilmuan peneliti serta keberlangsungan suatu program pemerintah daerah dimasa yang akan datang. Strategi dasar ini membantu pemerintah dalam mengambil keputusan dalam mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang lebih maksimal terutama pada sektor perikanan budidaya. Menurut Chadler (1962) dalam Rangkuti (2002:3) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan/organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Merujuk dari konsep strategi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam upaya pengembangan kawasan minapolitan di suatu daerah dibutuhkan strategi yang baik untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut dalam proses pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lamongan masih banyak mengalami beberapa hambatan-hambatan terutama pada sektor perikanan budidaya. Hambatan tersebut meliputi belum maksimalnya kegiatan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran ikan yang lebih kreatif dan inovatif, kurangnya dukungan pemerintah dalam hal permodalan kepada kelompok pmbudidaya ikan, serta belum optimalnya peran kawasan *hinterland* menjadi sentra produksi, pengolahan dan pemasaran, sehingga nantinya menjadikan Kabupaten Lamongan sebagai kawasan ekonomi unggulan. Secara tidak langsung dapat juga sebagai bentuk promosi potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Lamongan kepada pengunjung lokal maupun luar daerah Kabupaten Lamongan.



Melihat fenomena-fenomena yang terjadi diatas bahwasanya perlu adanya upaya pengembangan dalam sektor perikanan dan kelautan untuk lebih meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Lamongan terutama wilayah kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya. Bentuk kegiatan ekonomi yang ada disana merupakan seluruh kegiatan yang didominasi oleh masyarakat lokal. Berdasarkan keinginan, potensi, dan teori yang digunakan, bahwasanya peneliti akan melaksanakan penelitian dalam menganalisis pengembangan sektor perikanan dan kelautan di kawasan minapolitan dengan judul **“Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal (Studi pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Merujuk dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan produksi perikanan sebagai penggerak perekonomian lokal di Kabupaten Lamongan ?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Perikanan dalam pengembangan kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi pengembangan kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam

meningkatkan produksi perikanan sebagai penggerak perekonomian lokal di Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Dinas Perikanan dalam pengembangan kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai (value) baik secara teoritis maupun secara praktis terhadap pengembangan kawasan minapolitan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Lamongan. Adapun kontribusi peneliti yang ingin dicapai antara lain:

1. Kontribusi Akademik (Teoritis)
  - a. Bagi peneliti, diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan secara konseptual mengenai strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan produksi perikanan sebagai penggerak perekonomian lokal
  - b. Bagi instansi, hasil dari penelitian diharapkan bisa dijadikan sumbangan pemikiran bagi seluruh *stakeholder* yang ada di instansi tentang strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan produksi perikanan sebagai penggerak perekonomian lokal.
2. Kontribusi Praktis
  - a. Bagi peneliti, dapat mengetahui dan menganalisa keadaan yang sebenarnya dilapangan dalam hal pengembangan kawasan minapolitan

berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan produksi perikanan sebagai penggerak perekonomian lokal

- b. Bagi instansi, dapat menjadikan bahan masukan dalam hal pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan produksi perikanan sebagai penggerak perekonomian lokal sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan dan menjadi solusi terhadap permasalahan yang selama ini terjadi di dalam instansi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dimaksudkan agar memudahkan peneliti dalam menguraikan masing-masing bab serta bagi pembaca agar lebih mudah memahami penelitian ini secara jelas. Berikut adalah pokok-pokok pembahasan pada setiap bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang penelitian yaitu potensi perikanan dan kelautan yang berpeluang dikembangkan menjadi kawasan minapolitan dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal. Di bab ini juga diuraikan rumusan masalah agar memberikan batasan kepada peneliti tentang apa yang ditelitinya. Serta dijelaskan juga tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan uraian mengenai teori-teori sebagai landasan teoritik dalam penulisan skripsi. Adapun teori pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pengembangan yang berfokus pada konsep pengembangan

kawasan minapolitan. Serta ada pula teori pendukung tentang konsep kawasan minapolitan dan pembangunan ekonomi lokal.

### BAB III METODE PENELITIAN

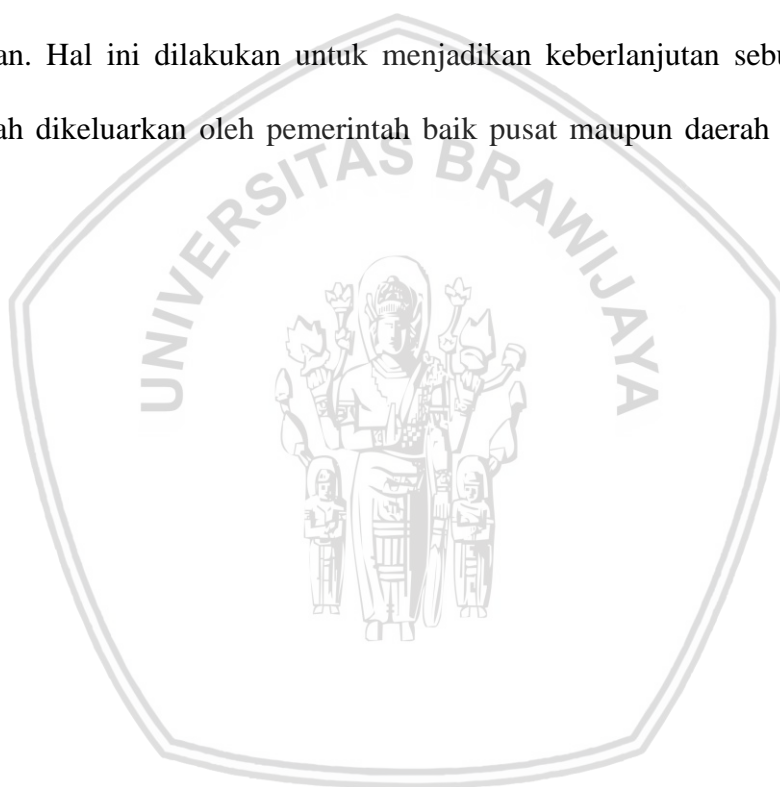
Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun isi dari metode penelitian ini terdiri dari : jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan desain analisis data. Serta kesemua isi metode penelitian akan menggambarkan bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan kedepanya.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai uraian hasil penelitian dan pembahasannya dari apa yang telah didapatkan oleh peneliti baik dari hasil wawancara maupun hasil olahan data sekunder. Adapun hasil penelitian yang dapat diberikan mengenai strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam rangka meningkatkan perekonomian local di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut: pengembangan sentra produksi, rantai pelaku bisnis, pola pemasaran, permodalan dan teknologi produksi. Semua strategi yang telah diimplementasikan tersebut memiliki faktor pendukung maupun faktor penghambat di dalam penerapanya untuk masyarakat dalam proses pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan.

## BAB V PENUTUP

Bab ini adalah sebuah penutup dari skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian berdasarkan apa yang telah disajikan dalam bab sebelumnya. Kesimpulan dan saran tersebut berisikan semua hal yang bertujuan untuk membangun dan memberikan tanggapan dari pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan. Hal ini dilakukan untuk menjadikan keberlanjutan sebuah program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah di kemudian hari.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pembangunan dalam Administrasi Publik

##### 1. Administrasi Publik

Kata “administrasi” yang kita kenal saat ini di Indonesia berasal dari kata *administrate* (latin : *ad* = pada, *ministrate* = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti “memberikan pelayanan kepada” (Indradi, 2010:1). Sementara publik merupakan terjemahan dari bahasa inggris “*public*” Kamus Besar Bahasa Indonesia Pustaka (2001) dalam Indradi (2010:110) publik diartikan sebagai orang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi dan sebagainya). Administrasi publik menurut Indradi (2010:113) adalah terjemahan dari bahasa inggris *public administration* yang sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi negara atau administrasi pemerintahan.

Menurut Nicholas Henry dalam Indradi (2010:116) administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Sedangkan menurut Dwight Waldo dalam Syafiie (2008:33) administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan dari pemerintah.

Paradigma berikutnya Denhart dan Denhart membagi paradigma administrasi negara menjadi tiga paradigma yaitu *Old Public Administration (OPA)*, *New Public Management (NPM)*, *New Public Service (NPS)*. Paradigma yang paling mutakhir menurut Denhart dan Denhart adalah *New Public Service (NPS)* yang sejalan dengan sudah sejalan dengan konsep *governance*. Secara etimologis *governance* memiliki makna tentang bagaimana menyelesaikan sesuatu. Sedangkan secara epistemologi *governance* menggambarkan proses interaksi untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Menurut Domai (2011:23) *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara pemerintah dan warga yang mengatur sumberdaya serta memecahkan masalah politik

Konsep *Governance* mengalami perkembangan menjadi *Good Governance (GG)* dan *Sound Governance (SG)*. *World bank* dalam Mardiasmo (2009:18) mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang sangat efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan terjadinya praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) baik secara politik maupun administratif menjalankan anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* adalah perlunya menjalankan sistem pemerintahan *bottom up*.

Konsep *Good Governance* diharapkan akan melahirkan model alternatif pembangunan yang mampu menggerakkan partisipasi komunitas umum dan memberi jaminan bahwa prioritas dibidang politik, ekonomi, dan sosial yang dibuat berdasarkan musyawarah bersama. *Good Governance* menawarkan sebuah



gagasan tentang sinergitas antara pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan. Prinsip demokrasi ini dikedepankan untuk memposisikan partisipasi masyarakat yang bermitra dengan pemerintah.

*Sound Governane* memiliki kaitan erat dengan tata pemerintahan yang memiliki beberapa aspek didalamnya yaitu aspek tradisi atau inovasi lokal tentang bagaimana sebuah negara dan pemerintah ditata sesuai dengan kebiasaan, budaya dan konteks lokal. Terdapat empat aktor dari *Sound Governance* sendiri yang meliputi negara, *civil society*, sektor privat, dan aktor internasional. *Sound Governance* tidak menggunakan prinsip seperti yang ada pada *Good Governance* melainkan menggunakan dimensi-dimensi antara lain proses, struktur, kesadaran dan nilai, konstitusi, organisasi dan intuisi, manajemen dan performa, kebijakan sektor, serta faktor internasional dan etika.

Di era demokrasi sekarang ini paradigma administrasi publik dalam pembangunan yang dijalankan pemerintah mengacu pada paradigma NPS dan sejalan dengan konsep *Governance*, baik itu *Good Governance* maupun *Sound Governance*. Paradigma ini sangat menekankan pada pembangunan yang diarahkan untuk lebih memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta membuka dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Hal tersebut sejalan juga dengan konsep *Governance* baik itu *Good Governance* maupun *Sound Governance*.

Konsep *Good Governance* yang mengedepankan prinsip partisipasi dalam tata kelola pemerintahan, sedangkan *Sound Governance* mengedepankan aspek kesetaraan antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengelola pemerintahan



yang semua itu tertuang di dalam dimensi-dimensi *Sound Governance* yang saling terkait. Ini bukan menjadikan masyarakat sebagai penguasa yang baru, melainkan memberikan porsi yang lebih proporsional kepada masyarakat bagi keterlibatannya dalam pembangunan. Sekarang ini masyarakat tidaklah menjadi sebuah objek saja tetapi juga sebagai partner/mitra pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan.

## 2. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan salah satu unsur pokok dalam perencanaan pembangunan Syafi'i (1999:101) mengemukakan bahwa perhatian utama administrasi pembangunan adalah pada negara-negara berkembang, sedangkan administrasi publik pada negara-negara maju. Administrasi publik berorientasi pada masa sekarang sedangkan administrasi pembangunan berorientasi pada masa yang akan datang. Administrasi pembangunan menurut Siagian (2014:5) adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Hakim (2016:62) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik dan ekonominya agar pembangunan dapat berhasil. Administrasi pembangunan berkembang dari studi administrasi perbandingan (*comparative administration*), yang merupakan upaya untuk menyegarkan kembali ilmu administrasi dan untuk

menyempurnakan ilmu administrasi di negara-negara tersebut. Adapun kaidah-kaidah umum dalam administrasi negara berlaku pula pada administrasi pembangunan. Namun, administrasi pembangunan memberi perhatian lebih luas daripada hanya membahas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam pengertian umum, seperti memelihara keamanan, hukum dan ketertiban, mengumpulkan pajak, memberikan pelayanan publik dan menyelenggarakan hubungan dengan negara lain. Administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif karena menyangkut upaya mengendalikan perubahan-perubahan sosial.

Selanjutnya Hakim (2016:65) mengungkapkan pembangunan sistem administrasi tradisional menjadi sistem administrasi modern yang mampu menyelenggarakan pembangunan merupakan salah satu tujuan administrasi pembangunan. Pada dasarnya, administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Ini berarti dalam studi dan praktek administrasi pembangunan diperlukan adanya perhatian yang komitmen terhadap nilai-nilai yang mendasari dan perlu diwujudkan menjadi dasar etika birokrasi.

Dengan demikian, ada dua sisi dalam batasan pengertian administrasi pembangunan menurut Hakim (2016:65) tersebut. Pada sisi yang pertama, tercakup upaya untuk mengenali peranan administrasi negara dalam pembangunan. Dengan kata lain, administrasi dari proses pembangunan yang membedakannya dengan administrasi negara dalam pengertian umum. Pada sisi kedua, tercakup kehendak untuk mempelajari dengan cara bagaimana membangun administrasi negara dan tugas pembangunan. Namun, tak kurang pentingnya

adalah perhatian dan komitmen terhadap kepentingan publik yang dapat menjadi ukuran bagi kredibilitas dan akuntabilitasnya.

Kesimpulan dari beberapa teori yang telah dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli tentang administrasi pembangunan. Bahwasanya administrasi pembangunan merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa untuk tumbuh dan berkembang membangun negaranya. Serta harus adanya komitmen yang dilakukan bersama dalam hal membangun suatu negara dan bukan hanya pembangunan secara fisik melainkan pembangunan yang mengedepankan pada pelayanan administrasi publik yang kredibilitas dan berkeadilan sosial.

## **B. Perencanaan Pembangunan**

### **1. Pengertian Perencanaan Pembangunan**

Menurut Sirojuzilam dan Mahali (2010) perencanaan adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud:

- a. Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas;
- b. Meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas; dan
- c. Merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Sedangkan menurut Soejarto dalam Wisuda (2012:20) perencanaan merupakan suatu hasil rangkaian kerja untuk merumuskan sesuatu yang didasari oleh suatu pola tindakan yang definitif, menurut pertimbangan yang sistematis akan membawa keuntungan, tetapi dengan anggapan bahwa akan ada tindakan

selanjutnya yang juga merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis lainnya. Pada dasarnya kegiatan pembangunan memerlukan perencanaan. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan lebih terarah dan juga untuk mempermudah dalam mengontrol dan mengevaluasi pembangunan. Kata pembangunan secara sederhana sering diartikan sebagai proses perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Menurut siagian (2014:4) Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*).

Jadi dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara/bangsa dalam mencapai suatu perubahan dan pertumbuhan dimasa yang akan datang. Semua itu dilakukan secara terencana dan sadar akan kondisi negaranya untuk mencapai modernitas dimasa yang akan datang. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan dan tolak ukur keberhasilan dari suatu perencanaan pembangunan.

Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan, maka ada lima hal pokok yang perlu untuk diperhatikan menurut Tjokroamidjojo (1987:57), yaitu:

- a. Permasalahan dan potensi yang ada;
- b. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai;
- c. Penetapan kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran;
- d. Penerjemahan rencana kedalam bentuk program yang nyata; dan
- e. Persetujuan rencana.

## 2. Tahap-Tahap Perencanaan Pembangunan

Penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga yang akan melakukan program-program pembangunan. Penelaahan dalam perencanaan pembangunan tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti. Hal tersebut menunjukkan urutan-urutannya, sebab didalam kegiatan perencanaan pembangunan nanti diharapkan bisa terkontrol dan kegiatan pembangunannya bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang telah diharapkan.

Proses perencanaan yang digunakan di Indonesia saat ini seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN di dalamnya memuat bahwa perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia memakai 5 (lima) pendekatan yaitu politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down planning*. Tahap-tahap perencanaan pembangunan ini tentunya akan sangat membantu dan menunjang kelancaran suatu perencanaan pembangunan, hal tersebut dilakukan agar perencanaan pembangunan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Tahap-tahap perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahap perencanaan pembangunan ada empat, yaitu:

- a. Penyusunan rencana, meliputi:
  - 1) Rancangan Rencana Pembangunan Nasional/Daerah.
  - 2) Rancangan Rencana Kerja Departemen/Lembaga/SKPD.

3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

4) Rancangan Akhir Rencana Pembangunan.

b. Penetapan rencana, meliputi:

1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dengan Undang-Undang dan RPJP Daerah dengan Peraturan Daerah.

2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dengan Peraturan Presiden dan RPJM Daerah dengan Peraturan Daerah.

3) Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional dengan Peraturan Presiden dan RKP Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

c. Pengendalian pelaksanaan rencana, melalui:

1) Dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai tugas dan kewenangannya.

d. Evaluasi pelaksanaan rencana, meliputi:

1) Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.

2) Kepala BAPPEDA menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD.

3) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.



Keempat tahapan dalam perencanaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara keberlanjutan dan bersinergi. Adapun tahapan tersebut dimulai dari tahap sebagai berikut: 1) penyusunan rencana, 2) penetapan rencana, 3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Pelaksanaan dari satu tahap ketahap lainnya agar membentuk siklus perencanaan yang utuh.

### **C. Pembangunan Ekonomi Lokal**

#### **1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Lokal**

Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. Definisi pembangunan menurut kartasamita (1996) dalam Syafi'i (2008:38) adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketebelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Definisi pembangunan ekonomi lokal menurut Lopulisan dan Alam (2002) dalam Syafi'i (2008:61) mengatakan bahwasanya pembangunan ekonomi lokal adalah pembangunan daerah yang terpusat kepada usaha-usaha pembangunan berbasis kepada masyarakat (*community base development*), dimana masyarakat dipandang sebagai sebuah *economic entity*. Pandangan tersebut memiliki tujuan dan sasaran pembangunan daerah hendaknya diarahkan kepada terciptanya

masyarakat sejahtera yang berkeadilan sosial serta memiliki kemerdekaan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Sedangkan tujuan utamanya adalah penguatan kelembagaan lokal, yang berkelanjutan (*sustainability*) dari generasi ke generasi berikutnya. Hirschman (1958) dalam Syafi'i (2008:72) mengatakan bahwa "pembangunan ekonomi lokal merupakan pembangunan yang memerlukan prioritas, pilihan lokasi individu maupun sektor strategis yang mempunyai efek *forward* dan *backward*. Pembangunan ekonomi haruslah dilakukan secara serentak pada setiap sektor tetapi untuk negara (daerah) berkembang pembangunan ekonomi tidak dilakukan secara serentak (*unbalanced growth*) yaitu dengan menetapkan sektor unggulan, dimana sektor unggulan ini berimplikasi ke depan (*forward linkages*) dan hubungan ke belakang (*backward linkages*).

Definisi pembangunan ekonomi lokal menurut Syafi'i (2008:71) adalah pembangunan daerah yang mencakup tiga hal yang ada di daerah yaitu: pertama, pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah yang bersangkutan, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan pembangunan. Kedua, pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sektor ekonomi semata melainkan keberhasilannya juga terkait dengan faktor lainnya seperti sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi dan lainnya. Ketiga, pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan yang memiliki pengaruh untuk menggerakkan sektor lainnya secara lebih cepat.

Menurut kuncoro (2004) dalam Syafi'i (2008:58) salah satu pokok yang harus diperhatikan dalam rangka menerapkan paradigma pembangunan ekonomi lokal yang lebih komprehensif ini adalah bagaimana proses identifikasi

fundamental ekonomi secara lebih realistis. Dalam Renstra, ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pokok-pokok yang harus diperhatikan untuk menyusun identifikasi fundamental ekonomi pembangunan daerah tersebut adalah:

- a. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Peningkatan pendapatan perkapita; dan
- c. Pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial secara signifikan.

Dari beberapa pengertian tentang pembangunan ekonomi lokal menurut beberapa ahli dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya pembangunan ekonomi lokal adalah kegiatan secara sadar dan terencana dalam upaya meningkatkan perekonomian lokal melalui potensi daerah masing-masing, serta perannya dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan membangun masyarakat yang mandiri. Pembangunan ekonomi lokal merupakan pembangunan yang terpusat pada usaha-usaha pembangunan berbasis pada masyarakat. Proses pembangunan ekonomi lokal sendiri menitikberatkan pada potensi lokal, serta kebutuhan dan kemampuan lokal dalam menjalankan pembangunan. Potensi lokal tersebut akan dibawa sesuai dengan kehendak dan kemauan masyarakat lokal, karena masyarakat lokal yang lebih mengetahui sektor mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, dipertahankan, sesuai dengan sosio-kultur masyarakat lokal di kawasanya.

## 2. Potensi Ekonomi Lokal

Potensi ekonomi lokal adalah kemampuan ekonomi yang ada pada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (M. Suparmoko 2002:99). Sedangkan menurut North (1956) dalam Sjafrizal (2008:87) potensi ekonomi lokal merupakan kemampuan suatu daerah untuk mengekspor sumber daya yang ada untuk saling berkompetisi antar daerah dalam menumbuhkan perekonomiannya. Kegiatan ekspor juga dapat menumbuhkan lapangan usaha lokal bukan hanya dapat menjadikan masyarakat mandiri secara ekonomi, tetapi juga dapat berguna dalam menyerap tenaga kerja Tarigan (2005) dalam Woyanti (2008:155).

Salah satu potensi sumber daya ekonomi lokal di Indonesia adalah pada bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan laut, dan jasa kelautan yang merupakan andalan dalam menjawab tantangan dan peluang dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu sektor yang menjadi peluang terbesar dalam peningkatan perekonomian lokal adalah sektor perikanan. Dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi yang berdampak dalam meningkatnya daya saing masyarakat daerah untuk meningkatkan hasil produknya daerah harus mampu menciptakan hasil produknya yang unggul yang berpotensi meningkatkan ekonomi lokal. Produk hasil sumberdaya perikanan salah satunya yang menjadi unggulan, produk tersebut tidak harus dari hasil industri yang

berteknologi tinggi tetapi bisa dari produk lokal dengan memiliki daya saing yang handal terhadap produk lain.

Kesimpulan dari beberapa pendapat ahli tersebut bahwasanya potensi ekonomi lokal adalah kemampuan sumber daya ekonomi setempat yang layak untuk dikembangkan melalui kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat lokal yang memiliki potensi sumber daya yang menjanjikan untuk dikembangkan dalam upaya membantu peningkatan ekonomi lokal masyarakat. Selain itu juga dapat membantu dalam kegiatan ekonomi dalam hal ini kegiatan ekspor antar lokal beserta proses investasi ekonomi lokal, sehingga meningkatkan daya saing lokal. Daya saing tersebut dilakukan dengan mengandalkan produk unggulan atas dasar potensi ekonomi lokal yang ada. Produk tersebut tidak harus dari industri yang sangat canggih melainkan dari produk lokal yang handal. Dari pengembangan potensi lokal tersebut juga memiliki dampak positif dengan tumbuhnya peluang usaha produk lokal yang akan membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta menjadikan masyarakat mandiri secara ekonomi. Salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan secara maksimal adalah pada bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan.

#### **D. Konsep Strategi Pengembangan**

##### **1. Pengertian strategi**

Menurut Minzberg (1979) dalam Rangkuti (2002:3) strategi merupakan respon secara terus menerus maupun atraktif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Kusdi (2009:87) berpendapat bahwa strategi adalah penetapan

berbagai tujuan dan sarana jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran yang ingin dicapai. Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan menurut Salusu (2003:101).

Beberapa pengertian tentang strategi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya strategi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap dalam mencapai suatu tujuan organisasi dalam berbagai cara dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Strategi juga dapat disebut sebagai perencanaan yang dilakukan baik itu jangka pendek, menengah dan panjang dari suatu organisasi ataupun golongan dalam mencapai suatu tujuan serta sesuai dengan visi dan misi organisasi maupun golongan tersebut.

## **2. Tipe-Tipe Strategi**

Di setiap organisasi pasti memiliki strategi dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Setiap organisasi menggunakan tipe strategi yang berbeda-beda. Tipe-tipe strategi menurut Kooten dalam Salusu (2003:104-105) yang meliputi:

- a. *Corporate Strategy* (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan, misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.



- b. *Program Strategy* (strategi program). Strategi ini lebih memperhatikan pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.
- c. *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya). Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.
- d. *Institutional Strategy* (strategi kelembagaan). Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Dari berbagai pendekatan yang telah digunakan dalam membagi strategi dalam beberapa tipe-tipe strategi, tetapi sebuah organisasi tidak cukup melakukan sesuatu hanya dengan satu strategi. Tipe-tipe strategi memiliki kelebihan sendiri-sendiri dengan demikian kesemua tipe strategi saling melengkapi satu sama lain. Sehingga dengan demikian adanya keterkaitan strategi satu dengan yang lain membuat suatu organisasi yang kokoh dan mampu bertahan dari suatu perubahan kondisi lingkungan disetiap waktunya.

### 3. Instrumen Strategi

instrumen yang mendukung agar penyusunan strategi dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran serta diterapkan secara efektif, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan menurut Siagian (2002:225-226):

- a. Tahapan yang mencakup
  - 1) Perencanaan sumber daya manusia;
  - 2) Rekrutmen;
  - 3) Seleksi dan;
  - 4) Orientasi.
- b. Tahapan penggunaan tenaga kerja
- c. Agar para karyawan merasa senang untuk terus berkarya dalam organisasi, keinginan mereka untuk pindah keorganisasian lain perlu diredam.

Instrumen strategi kesemua itu harus dilalui dengan baik sehingga suatu pembuatan strategi dapat berjalan dengan semestinya. Semua instrumen strategi memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sehingga tidak ada yang mampu berdiri sendiri karena itu semua demi kesuksesan berjalanya sebuah strategi. Adapun tahapannya harus di selaraskan yang pertama pada tahapan awal hingga tahapan akhir suatu strategi dalam mencapai suatu tujuan.

#### 4. Manajemen Strategi

Sebelum membahas manajemen strategi lebih utama harus mengerti dulu tentang pengertian manajemen, dimana manajemen menurut Nawawi (2003:53) manajemen merupakan serangkaian proses yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*), penganggaran (*budgeting*). Sedangkan menurut Stoner dalam Handoko (2003:8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut David (2006:6) yang dimaksud manajemen strategi adalah *strategic management can be defined as the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decisions that enable an organization to achieve it's objectives*. Manajemen strategi dapat didefinisikan

sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang mampu membuat sebuah organisasi mencapai tujuan. Seperti yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang fokus dari manajemen strategis itu sendiri yaitu sebuah usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan, produksi, penelitian dan pengembangan, serta sistem teknologi informasi dalam mencapai keberhasilan suatu organisasi.

Menurut siagian (2002:15) manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan ke semua jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu usaha yang mencakup tiga hal yaitu: perencanaan, implementasi dan evaluasi dalam pengambilan sebuah keputusan oleh manajemen puncak dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Serta dapat dikatakan juga manajemen strategi dilakukan untuk mengeksplorasi dan menciptakan berbagai peluang baru dan berbeda dari sebelumnya.

### **5. Teori Analisis Lingkungan Internal (IFAS) dan Eksternal (EFAS)**

IFAS (Internal Strategic Factor Analysis Summary) dan EFAS ( External Strategic Factor Analysis Summary) digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh factor-faktor strategis internal dan eksternal yang sebelumnya sudah ditentukan. Lingkungan internal merupakan lingkungan dari factor-faktor meliputi kekuatan dan kelemahan. Sedangkan yang dimaksud dengan factor lingkungan eksternal merupakan peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi.

Adapun teknik analisis matriks internal dan teknik analisis matriks eksternal sebagai berikut:

a. Analisis Matriks Internal (IFAS)

Sebelum membuat matriks faktor strategi internal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu Faktor Strategi Internal (IFAS). Berikut cara-cara penentuan Faktor Strategi Internal (Rangkuti, 2014:27):

- 1) Membuat daftar faktor-faktor strategi internal dalam kolom 1 kondisi kawasan minapolitan perikanan budidaya apa saja yang menjadi kekuatan (*Strenghts*) dan kelemahan (*Weakness*).
- 2) Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, dengan skala mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak terhadap posisi strategis kawasan minapolitan perikanan budidaya. Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00.
- 3) Hitung rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan penilaian terhadap jawaban dari informan mulai dari 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup baik) dan 1 (sangat kurang baik) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi kawasan minapolitan perikanan budidaya.
- 4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan (dalam kolom 4).
- 5) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan. Total skor digunakan bagaimana pengembangan

kawasan minapolitan perikanan budidaya terhadap faktor-faktor strategis internalnya.

Identifikasi faktor internal rentang nilai 2,51 sampai 4,00 merupakan kekuatan dan rentang nilai 1,00 sampai dengan 2,50 sebagai kelemahan. Pembobotan dan rating kemudian dipindahkan ke dalam table matriks faktor strategi internal (IFAS) untuk mengetahui total skor keseluruhan faktor internal.

**Tabel 2. Matriks Internal (IFAS)**

Faktor-Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan:			
1.			
2.			
Kelemahan:			
1.			
2.			
Total	1,00		

Sumber : Freddy Rangkuti (2014:27)

b. Analisis Matriks Eksternal (EFAS)

Sebelum membuat matriks faktor strategi eksternal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu Faktor Strategi Eksternal (EFAS). Berikut ini cara-cara penentuan Faktor Strategi Eksternal (Rangkuti, 2014:24):

1) Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman).

Faktor-faktor strategi eksternal kondisi kawasan minapolitan perikanan budidaya apa saja yang menjadi peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*).

2) Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap posisi

strategis kawasan minapolitan perikanan budidaya. Semua bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00.

- 3) Hitung rating dalam kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan memberikan penilaian terhadap jawaban dari informan mulai dari 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup baik) dan 1 (sangat kurang baik) berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi kawasan minapolitan perikanan budidaya.
- 4) Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan (dalam kolom 4).
- 5) Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan. Total skor digunakan bagaimana pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya.

Identifikasi faktor eksternal rentang nilai 2,51 sampai 4,00 merupakan peluang dan rentang nilai 1,00 sampai dengan 2,50 sebagai ancaman. Pembobotan dan rating kemudian dipindahkan ke dalam tabel matriks faktor strategi eksternal (EFAS) untuk mengetahui total skor keseluruhan faktor eksternal.

**Tabel 3. Matriks Eksternal (EFAS)**

Faktor-Faktor Strategi Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang:			
1.			
2.			
Kelemahan:			
1.			
2.			
Total	1,00		

Sumber : Freddy Rangkuti (2014:26)



Setelah mengolah data dan menghasilkan skor matriks internal dan eksternal, selanjutnya mengkombinasikan ke dalam Sembilan sel Matriks Interna Eksternal (IE) untuk melihat strategi yang tepat diterapkan sebelum memberikan strategi alternatifnya melalui matriks SWOT.

**Tabel 4. Matriks Internal-Eksternal**  
Total Nilai IFE

		Kuat			Sedang			Lemah		
		4.0			3.0			2.0		
T o t a l  N i l a i  E F E	Tinggi	<b>I</b> <b>Pertumbuhan</b> Konsentrasi melalui integrasi vertical			<b>II</b> <b>Pertumbuhan</b> Konsentrasi melalui integrasi horizontal			<b>III</b> <b>Pengurangan</b> Turn Around		
	3.0	<b>IV</b> <b>Stabilitas</b> Hati-hati			<b>V</b> <b>Pertumbuhan</b> Konsentrasi melalui integrasi horizontal  <b>Stabilitas</b> Tidak ada perubahan profit strategi			<b>VI</b> <b>Pengurangan</b> Captive Company atau Divestasi		
	Sedang	<b>VII</b> <b>Pertumbuhan</b> Disverifikasi Konsentrik			<b>VIII</b> <b>Pertumbuhan</b> Disverifikasi Konglomerat			<b>IX</b> <b>Pengurangan</b> Bangkrut atau Likuidasi		
	2.0									
	Rendah									
		1.0								

Sumber: Freddy Rangkuti (2014:206)

## 6. Analisis SWOT

Strategi yang diciptakan oleh organisasi di dapat melalui analisis yang bersumber dari pemanfaatan potensi dari organisasi tersebut, hal ini dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai tujuan yang telah ditentukan. Menganalisis potensi yang akan dimanfaatkan untuk menjadi strategi organisasi

yang efektif diperlukan informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan kondisi dan situasi perusahaan atau organisasi tersebut. salah satu metode untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman perusahaan atau organisasi adalah analisis SWOT. Menurut Griffin (2004:228) analisis SWOT adalah evaluasi atas kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknes*) internal suatu organisasi yang dilakukan secara berhati-hati, dan juga evaluasi atas peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari lingkungan. Analisis SWOT merupakan strategi terbaik untuk mencapai misi suatu organisasi dengan mengeksplotasi peluang dan kekuatan suatu organisasi serta pada saat yang sama menetralkan ancamannya, dan menghindari atau memperbaiki kelemahannya.

Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mengacu pada matriks analisis lingkungan yang ada. Matriks analisis SWOT tidak hanya dapat menggunakan daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman saja tentu tidak cukup. Daftar tersebut harus dibahas, dianalisis, dibandingkan dan dipertentangkan secara cermat, dengan kata lain analisis strategi SWOT ini harus dikerjakan untuk mendapatkan strategi yang tepat. Matriks analisis SWOT dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:

**Tabel 5. Matriks SWOT**

<b>Internal</b>	<b>Kekuatan (<i>strengths</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>weaknes</i>)</b>
	Dituliskan beberapa kekuatan yang dimiliki	Dituliskan beberapa kelemahan yang dimiliki
<b>Eksternal</b>		
<b>Peluang (<i>opportunities</i>)</b>	Strategi S-O	Strategi W-O
Dituliskan beberapa peluang yang mungkin dihadapi	Strategi yang menggunakan kekuatan untuk pemanfaatan peluang	Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<b>Ancaman (<i>threats</i>)</b>	Strategi S-T	Strategi W-T
Dituliskan beberapa ancaman yang mungkin dihadapi	Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi yang meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti (2006:31)

a. Strategi S-O

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya.

b. Strategi S-T

Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman.

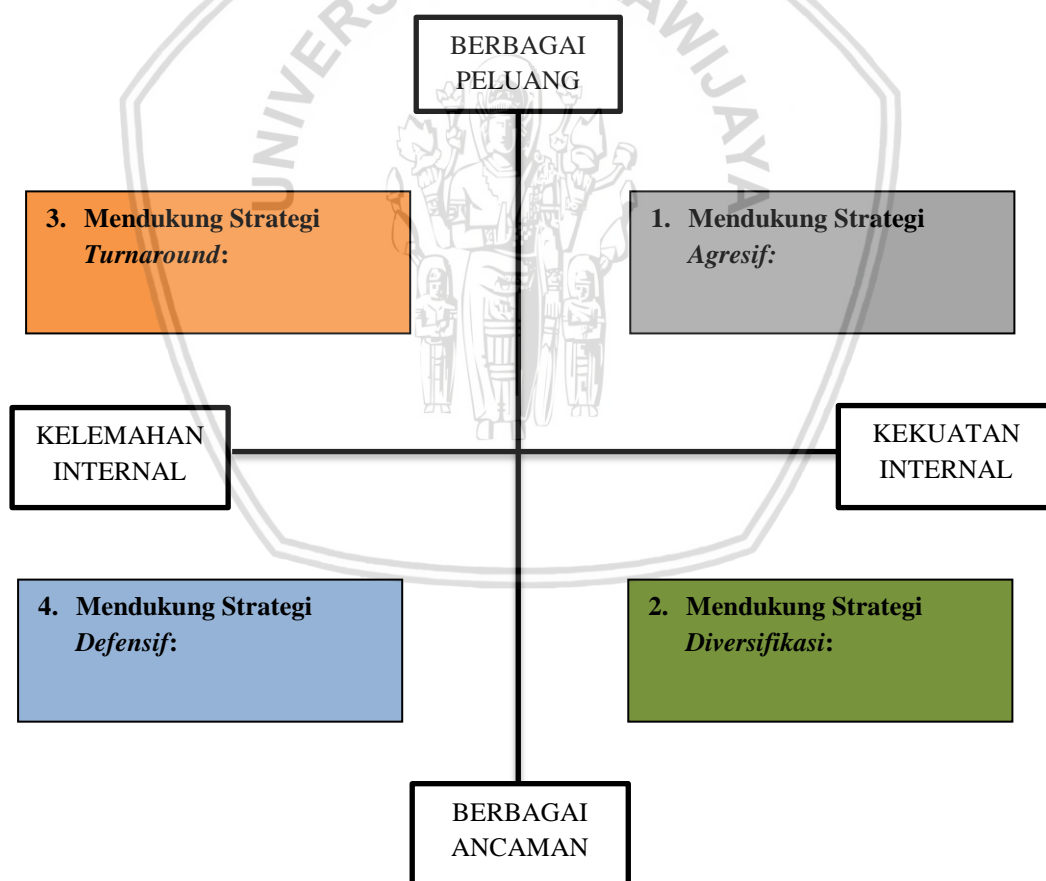
c. Strategi W-O

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

d. Strategi W-T

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Penggunaan analisis SWOT tersebut dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, selain itu analisis SWOT dapat memudahkan menentukan strategi apa yang tepat agar permasalahan yang diteliti dapat menemukan jalan keluar. Umumnya yang sering digunakan adalah sebagai kerangka atau panduan sistematis dalam diskusi untuk membahas kondisi alternative dasar yang mungkin menjadi pertimbangan perusahaan/organisasi. Selain itu menurut Rangkuti (2006:19) macam-macam strategi merupakan gabungan dari beberapa factor dan akan membentuk kuadran-kuadran berikut:



**Gambar 1. Diagram Analisis SWOT**

Sumber: Rangkuti, 2006

Pada gambar sebelumnya dapat dilihat bahwa:

- a. Kuadran 1, pada posisi ini merupakan suatu situasi dimana organisasi berada pada kondisi yang menguntungkan. Hal ini disebabkan organisasi memiliki kekuatan dan peluang yang mendorong untuk menangkap peluang yang ada. Strategi yang tepat adalah Agresif.
- b. Kuadran 2, pada posisi ini organisasi menghadapi berbagai ancaman tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang paling tepat diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi Diversifikasi.
- c. Kuadran 3, pada posisi ini organisasi menghadapi peluang pasar yang sangat besar dan dihadapkan pada kelemahan internal. Maka strategi yang harus diambil adalah strategi Turnaround.
- d. Kuadran 4, pada posisi ini organisasi berada dalam kondisi paling buruk dimana organisasi menghadapi kelemahan internal sekaligus ancaman dari luar. Sehingga strategi yang paling tepat adalah strategi Defensif.

Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya agar memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan.

## **7. Pengertian Pengembangan**

Pengembangan berarti sebuah proses, cara, perbuatan, mengembangkan. Dalam melaksanakan pengembangan upaya pemerintah dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur kepada sasaran yang dituju agar terlaksana sesuai yang

diharapkan. Moekijat (1991:10) menyatakan bahwa pengembangan adalah setiap usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan-kecakapan. Dengan kata lain pengembangan adalah setiap kegiatan yang dimaksud untuk mengubah kelakuan-kelakuan yang terdiri dari pengetahuan, kecakapan-kecakapan dan sikap-sikap.

Menurut Hasibuan (1990:170) pengembangan adalah peningkatan keahlian dan keterampilan melalui pendidikan dan latihan, hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Mathias dan Jakson (2009:353-355) menyatakan bahwa pengembangan yang dibutuhkan untuk seseorang untuk mengembangkan kapabilitasnya berdasarkan pada orang tersebut dan kapabilitas yang dibutuhkan. Akan tetapi ada beberapa kapabilitas manajemen yang penting dan umum serta sering melibatkan pada orientasi tindakan, pembuatan keputusan yang berkualitas, nilai etika dan keterampilan teknis. Pengembangan seringkali meliputi penilaian dan sebuah tanggung jawab.

Suryono (2004:34) mengaitkan konsep pengembangan (*developing concept*) dengan dengan sebuah istilah negara yang sedang berkembang (*developing countries*). Dalam konsep ini negara-negara dunia ketiga pada umumnya berkebudayaan tinggi dan memiliki potensi serta sumber daya yang melimpah. Kelemahan sendiri pada negara-negara dunia ketiga adalah tentang pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan pemaparan tentang pengembangan menurut beberapa ahli, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pengembangan adalah suatu usaha yang



dilakukan untuk memperbaiki permasalahan baik yang sekarang maupun di masa yang akan datang melalui peningkatan keahlian dan keterampilan dengan melihat orientasi tindakan, pembuatan keputusan, nilai etika dan keterampilan teknis. Pengembangan tersebut dilakukan juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang didukung oleh peran dari ilmu pengetahuan dan teknologi dengan demikian kegiatan dari suatu pengembangan akan mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

### 8. Proses Pengembangan

Menurut Baker (2001:119-120) proses pengembangan terdiri dari atas tindakan memutuskan kompetensi, keterampilan atau pengetahuan yang perlu dikembangkan dan bagaimana mencapainya. Adapun proses pengembangan dalam suatu pengelolaan sumber daya sebagai berikut:

#### a. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pengembangan

Proses ini adalah mengidentifikasi kompetensi apa yang dibutuhkan untuk tugas tertentu dan keterampilan apa yang sudah dimiliki tetapi belum dimanfaatkan. Analisis tersebut dapat dibuat dengan bidang-bidang hasil utama dalam tujuan-tujuan organisasi. Kompetensi yang disesuaikan pada bidang hasil utama lebih berarti.

#### b. Menyusun rencana pengembangan

Penyusunan rencana pengembangan adalah beberapa tindakan yang dirancang untuk mengembangkan atau mengkonsolidasikan kompetensi. Rencana pengembangan mencakup tindakan-tindakan spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), realistis

(*realistic*), dan tepat waktu (*timely*). Sulit merencanakan pengembangan untuk waktu yang paling sesuai, tetapi kegiatan-kegiatan yang terlalu cepat atau terlalu lambat akan kehilangan banyak nilai.

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwasanya proses pengembangan terdiri dari dua langkah. Pertama yaitu proses dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dengan melihat serta melakukan seleksi kompetensi apa saja yang dibutuhkan dan keterampilan mana saja yang belum dimanfaatkan. Kedua yaitu proses dalam menyusun rencana pengembangan dengan tindakan yang dirancang untuk mengembangkan dan mengkonsolidasikan kompetensi.

## **E. Konsep Minapolitan**

### **1. Pengertian Minapolitan**

Konsep minapolitan awal mulanya berawal dari adanya konsep agropolitan yang mengacu pada pedoman umum pengembangan kawasan agropolitan yang telah diterbitkan oleh kementerian pertanian. Minapolitan sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu mina yang berarti ikan dan politan artinya kota, jadi minapolitan merupakan kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya, dengan ciri utama kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2011 Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tahun (2012), Minapolitan didefinisikan sebagai kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha minabisnis sehingga mampu melayani, mendorong, menarik ataupun menghela pembangunan perikanan melalui minabisnis di wilayah sekitarnya. Sementara menurut (Widjaja, 2013:16) Minapolitan adalah konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan pendapatan rakyat.

Kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa pengertian tentang minapolitan adalah minapolitan sebagai kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan berdasarkan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan percepatan pengembangan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan di sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Dengan konsep minapolitan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada di wilayah pesisir kelautan yang kebanyakan masih tertinggal dari wilayah perkotaan/metropolitan. Adanya konsep minapolitan itu juga diharapkan mampu membuat pembangunan yang merata dan masyarakat menjadi sejahtera.

## 2. Tujuan dan Sasaran Minapolitan

Tujuan dan sasaran dari pelaksanaan minapolitan bisa dan mampu dilaksanakan jika semua *stakeholder* yang terkait saling bekerja sama baik pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan dan permodalan, komitmen dari pemerintah daerah dalam pelaksanaannya, kemitraan serta dukungan masyarakat sendiri dalam pembudidayaan perikanan dan didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana yang menunjang. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 18 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan, tujuan minapolitan itu sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- 2) Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata;
- 3) Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Adapun juga sasaran pelaksanaan Minapolitan menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011, meliputi:

- 1) Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, antara lain berupa:
  - a. Penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar;
  - b. Pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil;
  - c. Penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat;
  - d. Pemberian bantuan teknis dan permodalan;
  - e. Pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
- 2) Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi antara, lain berupa:
  - a. Deregulasi usaha kelautan dan perikanan;
  - b. Pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi;
  - c. Penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tarif dan non-tarif *barriers*);
  - d. Pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran;

- e. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif ekspor-impor produk kelautan
- 3) Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional, antara lain berupa:
  - a. Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
  - b. Pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal
  - c. Revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat;
  - d. Pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwasanya dapat ditarik kesimpulan tentang tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan minapolitan adalah sebagai pemicu daerah dalam meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan nelayan, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan serta mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan perekonomian di daerah dan juga untuk meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, serta menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja di wilayah sentra minapolitan sesuai kapasitas daya dukung produksi perikanan.

### **3. Kawasan Minapolitan**

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, minapolitan masuk dalam kategori agropolitan dijelaskan bahwa kawasan agropolitan/minapolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian/perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keuangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kawasan Minapolitan, kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Agar kawasan minapolitan dapat berkembang sebagai kawasan ekonomi yang sehat, maka diperlukan keanekaragaman kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi dan perdagangan lainnya yang saling mendukung. Keanekaragaman kegiatan produksi dan usaha di kawasan minapolitan akan memberikan dampak positif (*multiplier effect*) bagi perkembangan perekonomian setempat dan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan penjelasan tentang konsep kawasan minapolitan tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang memiliki lebih dari satu kegiatan dimana berbasis pada keanekaragaman fisik dan ekonomi yang memiliki hubungan erat untuk saling memberikan dukungan antara satu sama lain secara fungsional dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam kawasan minapolitan sendiri memiliki beberapa kegiatan yang bersinergis dan terintegrasi dari kegiatan satu dengan kegiatan yang lain. Kegiatan tersebut yang dimulai dari proses produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Dengan demikian semua kegiatan perikanan akan terpusat di satu lokasi sehingga



akan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

## **F. Pengembangan Kawasan Minapolitan**

### **1. Pengertian Pengembangan Kawasan Minapolitan**

Pengembangan kawasan minapolitan merupakan suatu konsep pembangunan yang berbasis pada kelautan dan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi lokal di wilayah pedesaan yang memiliki potensi dalam pengembangan kawasan perikanan. Adapun menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (2012:53) pengembangan kawasan minapolitan adalah:

“Pengembangan kawasan andalan yang telah tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Dalam peraturan tersebut, diamanatkan bahwa pengembangan Kawasan Minapolitan sebagai kawasan andalan yang tidak akan bisa terlepas dari pengembangan sistem pusat kegiatan baik tingkat Nasional, Provinsi ataupun pada tingkat Kabupaten/kota”.

Menurut (Widjaja, 2013:16) pengembangan kawasan minapolitan adalah sebagai berikut:

“Suatu pendekatan pembangunan kawasan pedesaan melalui upaya-upaya penataan ruang kawasan pedesaan dan menumbuhkan pusat-pusat pelayanan fasilitas perkotaan (*urban function center*) yang dapat mengarah pada terbentuknya kota-kota kecil berbasis perikanan (minapolis) sebagai bagian dari sistem perkotaan dengan maksud meningkatkan pendapatan kawasan pedesaan (*regional income*)”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. Adapun pendekatan pengembangan kawasan minapolitan dilakukan melalui:

- 1) Ekonomi Kelautan dan Perikanan Berbasis Wilayah  
Mendorong penerapan manajemen hamparan untuk mencapai skala ekonomi, mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sekaligus mengintegrasikan pemenuhan kebutuhan sarana produksi, proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil dan pengelolaan lingkungan dalam suatu kesisteman yang mapan.
- 2) Kawasan Komoditas Unggulan  
Memacu pengembangan komoditas yang memiliki kriteria bernilai ekonomis tinggi, teknologi tersedia, permintaan pasar besar, dan dapat dikembangkan secara masal.
- 3) Sentra Produksi  
Minapolitan berada dalam kawasan pemasok hasil perikanan (sentra produksi perikanan) yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Seluruh sentra produksi kelautan dan perikanan menerapkan teknologi inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin.
- 4) Unit Usaha  
Seluruh unit usaha dilakukan dengan menggunakan prinsip bisnis secara profesional dan berkembang dalam suatu kemitraan usaha yang saling memperkuat dan menghidupi.
- 5) Penyuluhan  
Penguatan kelembagaan dan pengembangan jumlah penyuluh merupakan salah satu syarat mutlak keberhasilan pengembangan minapolitan. Penyuluh akan berperan sebagai fasilitator dan pendamping penerapan teknologi penangkapan dan budidaya ikan serta pengolahan hasil perikanan.
- 6) Lintas Sektor  
Minapolitan dikembangkan dengan dukungan dan kerjasama berbagai instansi terkait dengan sarana dan prasarana pemasaran produk perikanan, tata ruang wilayah, penyediaan air bersih, listrik, akses jalan, dan BBM (Bahan Bakar Minyak).

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan, pengembangan kawasan minapolitan diharapkan dapat dilaksanakan melalui beberapa prinsip yang diantaranya:

- a. Prinsip integrasi  
Pengembangan kawasan yang ditujukan untuk mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan *stakeholders*, baik instansi sektoral, pemerintah pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat.

b. Prinsip Efisiensi

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi.

c. Prinsip Berkualitas

Pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia. Adanya konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara lebih intensif.

d. Prinsip Berakselerasi Tinggi

Percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan. Prinsip percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara kompetitor, melalui peningkatan *market share* produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia tingkat dunia.

Beberapa pengertian tentang konsep pengembangan kawasan minapolitan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya pengembangan kawasan minapolitan adalah suatu konsep pengembangan wilayah yang unggul dan potensial yang memanfaatkan potensi pada sektor perikanan di daerah. Kawasan minapolitan juga akan dijadikan kawasan ekonomi unggulan yang mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Pengembangan kawasan minapolitan dilakukan melalui beberapa pendekatan diantaranya ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wiayah, kawasan komoditas unggulan, sentra produksi, unit usaha, penyuluhan, lintas sektor. Pengembangan kawasan minapolitan juga dapat diharapkan bisa terlaksana melalui prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan berakselerasi tinggi.

## 2. Tujuan Pengembangan Kawasan Minapolitan

Kawasan minapolitan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dikembangkan terutama di Negara Indonesia ini. Menurut Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2011, Tujuan dari pengembangan kawasan minapolitan adalah:

1. Pelayanan secara terpadu dan efisien dari instansi pusat dan daerah serta instansi lintas sektor pada kawasan minapolitan;
2. Berkembangnya sektor ekonomi dari komoditas sektor perikanan;
3. Kawasan sentra minapolitan bersama wilayah sekitarnya tumbuh sebagai kota mandiri; dan
4. Pengisian tenaga kerja pada wilayah sekitar sentra minapolitan sesuai dengan kapasitas daya dukung produksi perikanan.

Adapun tujuan pengembangan kawasan minapolitan menurut (Widjaja, 2013:16), sebagai berikut:

1. meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil;
2. meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi; dan
3. meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional.

Dari beberapa tujuan pengembangan kawasan minapolitan diatas, dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya pengembangan kawasan minapolitan diharapkan desa dan kota saling bersinergi dalam dalam mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kawasan minapolitan dengan kegiatan perikanan sebagai instrumen utama dalam meningkatkan pendapatan lokal masyarakat secara menyeluruh serta berkembangnya sistem dan usaha masyarakat berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Adapun tujuan dari pengembangan kawasan minapolitan diantaranya : 1) pelayanan secara terpadu dan efisien dari instansi pusat dan daerah serta instansi lintas sektor pada kawasan minapolitan; 2) berkembangnya sektor ekonomi dari komoditas sektor perikanan; 3) kawasan sentra minapolitan bersama wilayah sekitarnya tumbuh sebagai kota

mandiri; dan 4) pengisian tenaga kerja pada wilayah sekitar sentra minapolitan sesuai dengan kapasitas daya dukung produksi perikanan.

### 3. Karakteristik Kawasan Minapolitan

Karakteristik kawasan minapolitan dapat dilihat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan, Karakteristik Kawasan Minapolitan meliputi:

1. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan;
2. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi;
3. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya; dan
4. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

Menurut Jenderal Sekretariat Kementerian Kelautan dan Perikanan (2013:16) karakteristik kawasan minapolitan adalah kawasan yang memiliki sentra-sentra produksi dan pemasaran berbasis perikanan serta mempunyai *multiplier effect* tinggi terhadap kegiatan ekonomi, produksi, pengadaan, jasa pelayanan, kesehatan dan sosial yang saling terkait dan mempunyai sarana dan prasarana memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi layaknya sebuah kota.

Karakteristik kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap dan perikanan budidaya menurut Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (2013:63) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:



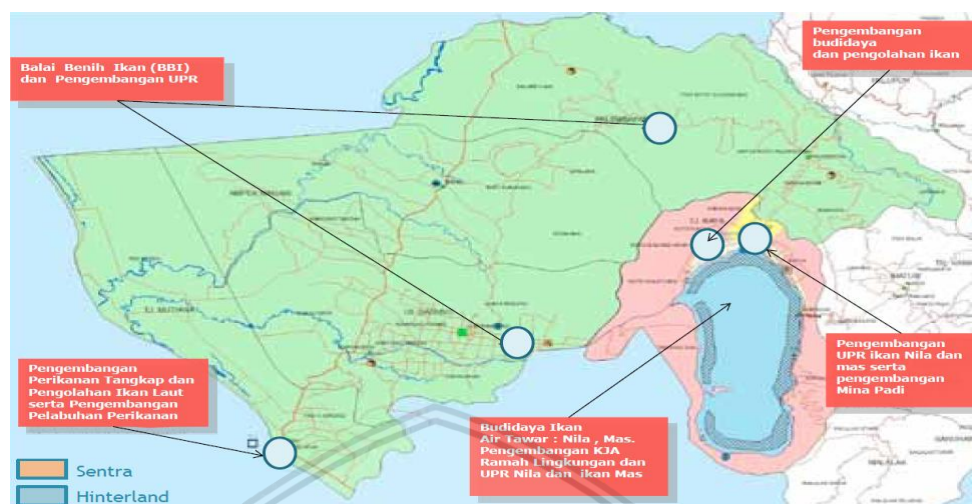


**Gambar 2. Sketsa Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Tangkap**

Sumber: Buku Pedoman Pengembangan Kawasan Minapolitan KKP (2013:58)

1. Pusat pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan usaha pedesaan;
2. Sinergitas antara pemerintah (pusat dan daerah, provinsi dan kabupaten), serta pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan pengembangan minapolitan;
3. Dukungan daerah yang konsisten sebagai ujung tombak pembangunan minapolitan agar mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan;
4. Sebagai kawasan yang terintegrasi-harmonisasi merupakan kata kunci pengembangan minapolitan yang berhasil;
5. Prinsip pengembangan kawasan minapolitan harus menyentuh seluruh sistem agribisnis dalam satu kesatuan pengembangan yang efektif dan efisien; dan
6. Sebagai cikal bakal pengembangan wilayah berbasis perikanan.





**Gambar 3. Sketsa Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya**

Sumber: Buku Pedoman Pengembangan Kawasan Minapolitan KKP (2013:53)

1. Kawasan subsistem minabisnis pada sektor hulu (*up stream minabusiness*) merupakan karakter budidaya perikanan pada sektor hulu terdiri dari keseluruhan kegiatan yang terjadi di sektor perikanan yang menghasilkan barang-barang modal untuk kebutuhan produksi ikan seperti kegiatan pembenihan, penyediaan pakan dan obat-obatan serta teknologi peralatan sumber daya energi seperti air sebagai salah satu modal dalam pelaksanaan budidaya perikanan tambak.
2. Kawasan subsistem minabisnis pada sektor usaha perikanan budidaya (*on farm*), karakteristik budidaya perikanan *on farm* yakni kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumber daya alam untuk menghasilkan komoditas perikanan primer termasuk usaha perikanan budidaya tambak. Adapun usaha perikanan dalam pengembangannya mencakup sumber daya manusia, permodalan dan pengelolaan lahan budidaya perikanan tambak.
3. Kawasan subsistem minabisnis pada sektor *off farm* merupakan karakteristik budidaya perikanan pada sektor *off farm* yakni pengolahan komoditas perikanan menjadi produk olahan baik produk antara (*intermediate product*) maupun produk akhir (*finish product*).
4. Kawasan subsistem minabisnis hilir (*down stream minabusiness*) karakteristik kegiatan budidaya perikanan yang ada di hilir yakni untuk memperlancar pemasaran komoditas perikanan tambak baik hasil pengemasan ikan segar maupun hasil olahan di dalam dan luar negeri. Kegiatan budidaya perikanan pada sektor hilir dalam hal pemasaran ini meliputi sistem pemasaran, area pemasaran, aksesibilitas, saran dan prasarana serta informasi pasar.
5. Kawasan subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi minabisnis), karakteristik budidaya pasas sistem ini merupakan sebagai penyedia jasa bagi subsistem minabisnis hulu, subsistem *on*

*farm*, subsistem *off farm* dan subsistem minabisnis hilir. Budidaya pada sistem penunjang adalah informasi perikanan, kredit permodalan, pendidikan dan pelatihan, kemitraan, sarana dan prasarana penunjang secara keseluruhan bertujuan untuk pengembangan kawasan budidaya tambak.

#### 4. Persyaratan Pengembangan Kawasan Minapolitan

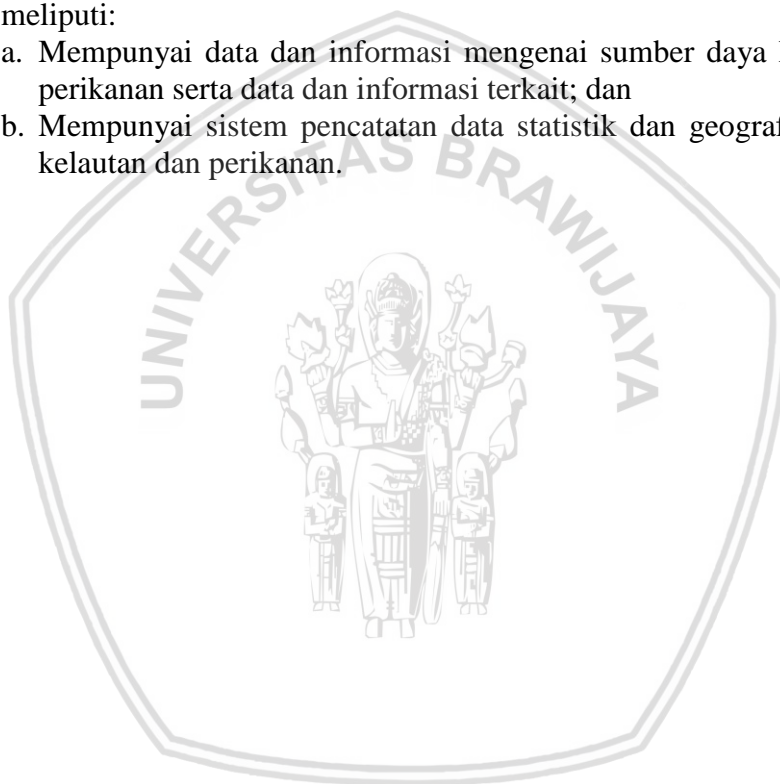
Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan serta memiliki peluang yang besar untuk mampu lebih dikembangkan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah ditetapkan;
2. Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi, meliputi:
  - a. Keberadaan komoditas unggulan, yaitu melimpah atau dapat dibudidayakan dengan baik dengan prospek pengembangan tinggi di masa depan;
  - b. Nilai perdagangan komoditas tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:
    - 1) Memiliki pasar: lokal, nasional dan internasional;
    - 2) Volume atau kemampuan produksi tinggi: dapat atau berpotensi memenuhi permintaan pasar;
    - 3) Tingkat produktivitas tinggi: kemampuan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi atau dapat dikembangkan sehingga secara ekonomi menguntungkan;
    - 4) Jumlah pelaku utama/usaha perikanan relatif besar atau sebagian besar penduduk setempat bekerja di kawasan tersebut;
    - 5) Mempunyai keunggulan komparatif: mempunyai nilai lebih karena keberadaan komoditas, iklim, SDM, dan ongkos produksi murah;
    - 6) Mempunyai keunggulan kompetitif: produk berkualitas dan sistem pemasaran efektif.
3. Letak geografis kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan, meliputi:
  - a. Lokasi kawasan strategis
    - 1) Jarak dan sistem transportasi; dan

- 2) Mempunyai akses terhadap jaringan pengadaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran (mata rantai pemasokan – *supply chain*)
- b. Kawasan yang secara alami cocok untuk usaha kelautan dan perikanan
  - 1) Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan
  - 2) Kesesuaian lahan dan potensi sumberdaya
  - 3) Sarana dan prasarana perikanan (Pelabuhan Perikanan, BBI, *Cold Storage*, Pabrik Es dll);
  - 4) Dekat dengan *fishing ground*;
  - 5) Sentra produksi garam; dan
  - 6) Sentra produksi pengolahan dan pemasaran.
4. Letak geografis kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan, meliputi:
  - a. Sistem dan mata rantai produksi perikanan budidaya
    - 1) Keberadaan sejumlah unit produksi ikan budidaya yang aktif berproduksi dan terkonsentrasi di sentra produksi; dan
    - 2) Mata rantai produksi:
      - a) Keberadaan sarana atau bahan produksi: kolam dan tambak yang luas;
      - b) Fasilitas pengairan yang baik dan mencukupi atau potensi pengairan yang mungkin dikembangkan;
      - c) Ketersediaan benih berkualitas tinggi atau kemungkinan pengadaan benih dengan harga murah;
      - d) Ketersediaan pakan dan obat-obatan murah;
      - e) Telah diterapkan sistem budidaya yang baik sehingga tingkat produksinya cukup tinggi dan berkualitas;
      - f) Keterlibatan pembudidaya dan para pekerja setempat;
      - g) Sistem distribusi dan pemasaran yang telah berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan lebih baik; dan
      - h) Sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah sekitarnya
  - b. Sistem dan mata rantai produksi perikanan tangkap
    - 1) Keberadaan sejumlah kapal ikan yang aktif berproduksi dan mendaratkan hasil tangkapannya di lokasi tersebut; dan
    - 2) Mata rantai produksi:
      - a) Hasil tangkapan yang cukup besar dan mempunyai skala ekonomi cukup tinggi;
      - b) Keberadaan sarana tambak, air bersih, tempat pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan yang memadai;
      - c) Sistem bongkar muat yang memadai atau mungkin dikembangkan dalam waktu dekat;
      - d) Keterlibatan nelayan dan para pekerja setempat;
      - e) Kegiatan di lokasi/pelabuhan perikanan/TPI mempunyai skala ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di sekitarnya;

- f) Sistem distribusi dan pemasaran telah berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan lebih baik; dan
  - g) Sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.
- c. Sistem dan mata rantai produksi hilir
- 1) Keberadaan unit-unit pengolahan atau potensi pengembangannya dalam waktu dekat;
  - 2) Keberadaan kelembagaan/SDM pengawasan mutu;
  - 3) Sistem tata niaga produk hasil olahan dan fasilitas pendukungnya;
  - 4) Keberadaan fasilitas pasar atau sistem pemasaran produk; dan
  - 5) Sistem dan sarana distribusi (logistik) produk di dalam maupun di luar kawasan.
5. Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan dan atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan, meliputi:
- a. Permodalan: aksesibilitas modal bagi nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar ikan;
  - b. Kelembagaan: lembaga pemerintah daerah;
  - c. Lembaga usaha: koperasi, kelompok usaha, atau usaha skala menengah dan atas;
  - d. Penyuluhan dan pelatihan: lembaga dan SDM penyuluhan dan pelatihan
  - e. Prasarana pengairan: keberadaan jaringan pengairan (budidaya) utama/primer, sekunder atau lainnya sebagai pendukung sistem pengairan di kawasan;
  - f. Energi: jaringan listrik yang memadai; dan
  - g. Teknologi tepat guna: penerapan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan daya saing.
6. Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan, meliputi:
- a. Kondisi sumberdaya alam (daya dukung dan daya tampung);
  - b. Dampak atau potensi dampak negatif terhadap lingkungan; dan
  - c. Sesuai tata ruang daerah dan nasional.
7. Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan minapolitan, meliputi
- a. Sesuai Renstra dan Tata Ruang Daerah (RTRW Kabupaten/Kota), RTRW Provinsi dan RTRW Nasional;
  - b. Mempertimbangkan Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K);
  - c. Masuk dalam RPJM;
  - d. Ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
  - e. Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM);

- f. Kontribusi anggaran APBD atau sumber dana lain yang sah;
  - g. Keberadaan kelembagaan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dengan dukungan SDM yang memadai; dan
  - h. Berkoordinasi dengan provinsi dan pusat.
8. Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan, meliputi:
- a. Keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu dinas yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan; dan
  - b. Kelompok kerja yang menangani pengembangan kawasan minapolitan.
9. Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan, meliputi:
- a. Mempunyai data dan informasi mengenai sumber daya kelautan dan perikanan serta data dan informasi terkait; dan
  - b. Mempunyai sistem pencatatan data statistik dan geografis di bidang kelautan dan perikanan.





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (1986:9) dalam Moeleong (2012:4) adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sementara menurut Moeloeng (2012:6) penelitian kualitatif sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang telah ditetapkan, maka peneliti menetapkan bahwa jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif. Penggunaan penelitian deskriptif ini agar peneliti dapat memaparkan secara objektif dan rasional mengenai objek penelitian sehingga tercapai hasil penelitian yang memaparkan fakta mengenai objek penelitian yang sesungguhnya. Kemudian peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif ini diharapkan agar pelaksanaan penelitian mendapatkan hasil yang objektif dan jelas sesuai pemikiran dari peneliti.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan sesuatu yang penting dalam pelaksanaan penelitian, fokus penelitian merupakan tahap awal yang digunakan untuk membatasi pelaksanaan penelitian baik pembatasan satu variabel maupun lebih dari satu variabel. Menurut Moeloeng (2012:94) ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumusan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus akan membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk keluar (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Jadi dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Sugiyono (2011:207) mengemukakan pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih dikarenakan pada seberapa besar kepentingan dan rencana permasalahan yang dipecahkan serta tenaga, dana dan waktu yang terbatas.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan mengacu pada kajian teoritis, maka sasaran dan fokus yang menjadi titik utama penelitian ini adalah membahas tentang strategi pengembangan kawasan minapolitan dalam meningkatkan perekonomian lokal di Kabupaten Lamongan. Dimana pengembangan kawasan minapolitan sudah tertuang di dalam RTRW Kabupaten Lamongan tahun 2011-2031, itu merupakan bentuk upaya pemerintah kabupaten lamongan yang serius dalam pengembangan kawasan minapolitan. Selanjutnya



berdasarkan masterplan kawasan minapolitan Kabupaten Lamongan tahun 2017-2021 yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

- I. Strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan produksi perikanan sebagai penggerak perekonomian lokal di Kabupaten Lamongan diantaranya:
  1. Pengembangan sentra produksi
  2. Rantai dan pelaku bisnis
  3. Pola pemasaran
  4. Permodalan
  5. Teknologi produksi
- II. Faktor pendukung dan penghambat strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan produksi perikanan sebagai penggerak perekonomian lokal di Kabupaten Lamongan:
  - a. Faktor pendukung
    - 1) Menganalisis Kekuatan (*Strenghts*)
      - a) Adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2013
    - 2) Menganalisis Peluang (*Opportunity*)
      - a) Hasil produksi komoditas unggulan sangat menjanjikan
      - b) Teknik budidaya baru dari pihak pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan hasil produksi

## b. Faktor Penghambat

### 1) Menemukan faktor Kelemahan (*Weakness*)

- a) Masih sulitnya para pembudidaya mendapatkan modal
- b) Keterbatasan penyediaan benih yang berkualitas
- c) Masyarakat pembudidaya yang belum menguasai teknologi modern
- d) Kurang optimalisasi tenaga ahli dalam melakukan pembinaan kepada pembudidaya ikan

### 2) Menemukan faktor Ancaman (*Threats*)

- a) Ketidakstabilan harga jual hasil perikanan di pasar
- b) Perubahan iklim yang tidak menentu
- c) Adanya perkembangan penyakit/virus

## C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tepat dimana peneliti melakukan penelitian. Dengan ditetapkannya lokasi dalam suatu penelitian akan mempermudah untuk mengetahui dimana penelitian dilakukan. Menurut Lofland and Lofland dalam Ainiyah (2015:62) ada empat alasan mengapa memilih tempat penelitian yang menarik yaitu: (1) menarik minat peneliti dan secara nyata berlokasi disuatu tempat, (2) terdapat pengalaman sosial yang memiliki pola tidak tetap (3) adanya keunikan pada individu dan jenis setting yang tidak asli serta banyaknya bentuk pengalaman sosial, dan (4) adanya masalah yang diteliti belum mendapat solusi.

Lokasi penelitian yang di pilih oleh peneliti adalah di Kabupaten Lamongan terutama kawasan yang termasuk dalam kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya, karena kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya yang menjadi

salah satu fokus pengembangan ekonomi lokal masyarakat Kabupaten Lamongan. Selain itu lamongan juga memiliki potensi yang besar untuk lebih mengembangkan hasil perikanan dan kelautan melalui kawasan minapolitan terutama perikanan budidaya. Dengan demikian peneliti lebih tertarik dalam melihat bagaimana strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan perekonomian lokal yang ada di Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya situs penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan, Kecamatan Glagah sebagai pusat perikanan budidaya, serta masyarakat pembudidaya di Kecamatan Glagah. Penetapan lokasi dan situs penelitian dikarenakan lokasi tersebut terdapat data dan informasi yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian. Penetapan lokasi dan situs penelitian tersebut tidak lupa juga didasari oleh pertimbangan pribadi peneliti:

1. Lokasi dan situs tersebut memberikan data yang akurat dan relevan untuk melakukan penelitian sesuai dengan fokus penelitian.
2. Kabupaten Lamongan memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya untuk meningkatkan perekonomian lokal.
3. Kabupaten Lamongan merupakan daerah asal peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam menjangkau lokasi dan situs penelitian yang akan diteliti, serta memberikan dampak yang positif terhadap efisiensi waktu dan biaya dalam penelitian.

## D. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moeloeng (2012:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, untuk selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan menurut apa yang dikatakan Arikunto (2006) dalam Ainiyah (2015:63) bahwa sumber data dalam penelitian terbagi sebagai berikut:

### 1. Sumber Data

- a. Informan, merupakan orang yang bersedia memberikan informasi, memiliki informasi dan menguasai permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan dipilih berdasarkan proses *riset* secara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak dimana penentuan jumlah sampel tidak tentu untuk menentukan “*key informan*”. Artinya bila data yang diperoleh dari sampel yang ada sudah sesuai dengan fokus penelitian, sehingga sampel yang ada bisa dikatakan cukup baik pada pemerintah, masyarakat dan swasta. Dalam hal ini peneliti menetapkan informan kunci sesuai bidangnya dan jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang diteliti.
- b. Dokumen, merupakan sumber data yang berasal dari bahan-bahan tertulis dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang tersedia dan memiliki hubungan dengan fokus penelitian. Dokumen ini yang berhubungan dengan sektor perikanan dan kelautan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal. Teknik tersebut digunakan peneliti dalam rangka melengkapi informasi peneliti.

- c. Tempat dan Peristiwa, merupakan dimana letak peristiwa atau fenomena terjadi yang ada kaitanya dengan pengembangan kawasan minapolitan dan peningkatan ekonomi lokal.

## 2. Jenis Data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan secara langsung kepada fenomena yang terjadi dan data yang diperoleh langsung dari informan. Data primer digunakan untuk mendukung kegiatan pada tahap analisis. Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara secara mendalam terhadap *key person* yaitu:

- 1) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
- 2) Kepala Sub Bidang Perikanan Budidaya
- 3) Masyarakat kawasan minapolitan
- 4) Hasil observasi peneliti terhadap kejadian atau fenomena di kawasan minapolitan

### b. Data Sekunder

Untuk memperoleh sumber data sekunder peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencari informasi dari informan secara tertulis serta didapatkan dari gambar-gambar yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder yang akan dipakai adalah dokumen resmi mengenai pengembangan kawasan minapolitan, landasan hukum minapolitan, data mengenai strategi

pengembangan kawasan minapolitan, konsep administrasi publik, strategi pengembangan, minapolitan, pengembangan kawasan minapolitan, ekonomi lokal.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian, seorang peneliti dapat menggunakan beragam teknik. Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh jenis data yang akan dikumpulkan. Ada bermacam-macam teknik mendapatkan data penelitian kualitatif. Menurut Paton dalam Djamal (2015:65), terdapat tiga macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

#### 1. Pengamatan (Obsevasi)

Pengamatan merupakan metode yang pertama kali digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah terutama mengenai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Pengamatan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi melalui indera penglihatan. Karena harus melihat secara langsung objek, maka peneliti harus terjun langsung ke lapangan/kancah penelitian. Menurut Spradly dalam Sugiyono (Djamal, 2015:67), setidaknya ada tiga hal yang menjadi objek pengamatan (observasi) yaitu: (1) *place* (tempat); (2) *actor* (pelaku); (3) dan *activities* (kegiatan). Ketiga objek tersebut dinamakan *social situation* (situasi sosial).

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik mendapatkan data dengan cara mengadakan percakapan secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang diwawancarai

(*interviewee*) yang menjawab pertanyaan itu (Djamal, 2015:75). Esterberg dalam sugiyono (Djamal 2015:75), menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik tanya jawab yang menghasilkan kontruksi makna tentang suatu topik tertentu. Di sisi lain, wawancara diperlukan bagi peneliti untuk mengatasi keterbatasan dalam pengamatan yang tidak memungkinkan peneliti mendalami pikiran, perasaan subjek yang diteliti. Apa saja yang diamati oleh peneliti sesungguhnya merupakan persepsi dari peneliti tentang fenomena yang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Peneliti dapat menggunakan dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moelong (Djamal, 2015:86) dokumentasi ialah setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang peneliti. Dokumen dapat berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat, notulen rapat, dan sebagainya. Dokumen pada hakikatnya merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dibedakan dengan record, yang artinya setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting misalnya surat nikah, akte kelahiran, bukti setoran pajak, bukti sumbangan dan lain-lain.



## F. Instrumen Penelitian

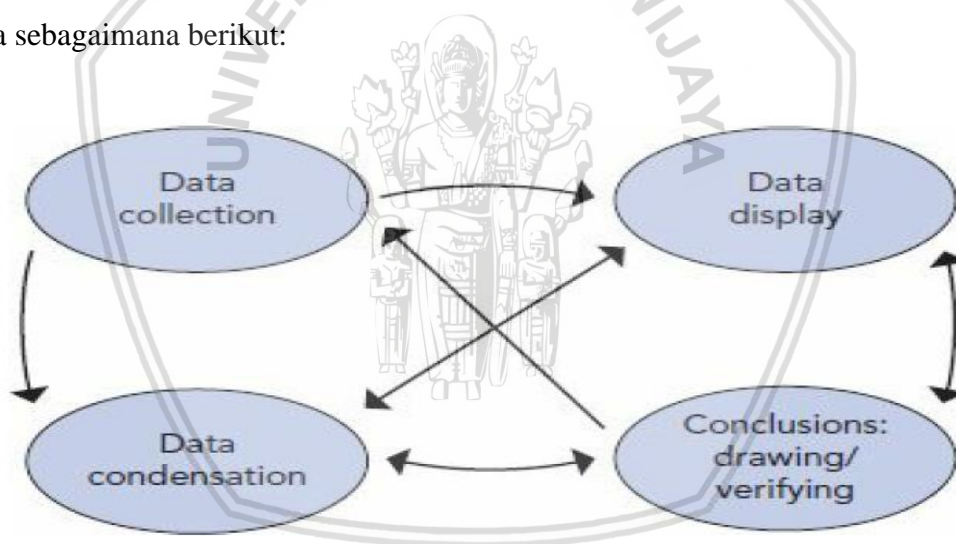
Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data (Afrizal, 2016:134). Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Di dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara. Untuk mengumpulkan data dari sumber informasi (informan), peneliti atau pewawancara sebagai instrumen utama penelitian memerlukan instrumen bantuan. Ada dua macam instrumen bantuan bagi peneliti atau pewawancara yang lazim digunakan (Afrizal 2016:135) yaitu:

1. Panduan atau pedoman wawancara mendalam. Ini merupakan suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang akan atau yang perlu dikumpulkan. Daftar ini dapat pula dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk menggali informasi dari para informan. Pertanyaan-pertanyaan lazimnya bersifat umum yang memerlukan jawaban panjang, bukan ya atau tidak.
2. Alat rekaman. Peneliti dapat menggunakan berbagai alat rekaman seperti *tape recorder*, telepon seluler, kamera foto, dan kamera video untuk merekam hasil wawancara mendalam atau hasil observasi. Alat rekaman dipergunakan apabila peneliti atau pewawancara mengalami kesulitan untuk mencatat hasil wawancara mendalam.

## G. Analisis Data

### 1. Model Analisis Data Interaktif (Miles, Huberman, dan Saldana)

Bogdan dan Biklen (2007) dalam Gunawan (2013:210) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Sesuai dengan penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) menjelaskan keempat alur kegiatan analisis data sebagaimana berikut:



**Gambar 4. Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014)**

Sumber :Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14)

#### a. Pengumpulan data/*data collection*

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Data hasil wawancara dikumpulkan dan disusun sesuai hasil yang diperoleh. Data

hasil observasi (pengamatan) berupa catatan hasil lapangan dan berupa foto-foto tentang apa yang terjadi di kawasan minapolitan yang ada di Kabupaten Lamongan. Data hasil dokumentasi berupa arsip-arsip dan peraturan daerah yang terkait dengan kegiatan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lamongan.

b. Kondensasi data/*data condensation*

Kondensasi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat dari lapangan. Kondensasi data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh di lokasi penelitian baik data yang belum terkumpul maupun data yang sudah terkumpul kedalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya sesuai fokus yang ada pada penelitian ini.

c. Penyajian data/*data display*

Penyajian data adalah memaparkan informasi yang sudah tersusun setelah mereduksi data. Data yang dipaparkan dalam bentuk uraian yang didukung oleh kutipan wawancara, gambar, tabel atau grafik yang menjelaskan fokus penelitian. Dukungan informasi tersebut memberikan pemahaman mengenai kondisi dan strategi pengembangan kawasan minapolitan dalam meningkatkan perekonomian lokal di Kabupaten Lamongan beserta beberapa faktor yang mempengaruhi.

d. Kesimpulan/*conclusions : drawing/verifying*

Setelah data yang dihasilkan dari uraian pemaparan disajikan, maka selanjutnya dapat ditarik verifikasi dan kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat

menjawab permasalahan yang dirumuskan dari awal penelitian, dimana rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan produksi perikanan sebagai penggerak perekonomian lokal di Kabupaten Lamongan; 2) Apa sajakah faktor-faktor yang dihadapi Dinas Perikanan dalam meningkatkan perekonomian lokal melalui pengembangan kawasan Minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan. Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga diteliti menjadi jelas. Kesimpulan yang kredibilitas adalah kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

## **2. Analisis SWOT**

Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mengacu pada matriks analisis lingkungan yang ada. Matriks analisis SWOT tidak hanya dapat menggunakan daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman saja tentu tidak cukup. Daftar tersebut harus dibahas, dianalisis, dibandingkan dan dipertentangkan secara cermat, dengan kata lain analisis strategi SWOT ini harus dikerjakan untuk mendapatkan strategi yang tepat. Matriks analisis SWOT dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:

**Tabel 6. Matriks SWOT**

<b>Internal</b>	<b>Kekuatan (<i>strengths</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>weaknes</i>)</b>
	Dituliskan beberapa kekuatan yang dimiliki	Dituliskan beberapa kelemahan yang dimiliki
<b>Eksternal</b>		
<b>Peluang (<i>opportunities</i>)</b>	Strategi S-O	Strategi W-O
Dituliskan beberapa peluang yang mungkin dihadapi	Strategi yang menggunakan kekuatan untuk pemanfaatan peluang	Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<b>Ancaman (<i>threats</i>)</b>	Strategi S-T	Strategi W-T
Dituliskan beberapa ancaman yang mungkin dihadapi	Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi yang meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti (2006:31)

e. Strategi S-O

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya.

f. Strategi S-T

Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman.

g. Strategi W-O

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

h. Strategi W-T

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

###### a. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada  $6^{\circ} 51' 54''$  sampai dengan  $7^{\circ} 23' 6''$  Lintang Selatan dan diantara garis Bujur Timur  $122^{\circ} 4' 4''$  sampai  $122^{\circ} 33' 12''$ . Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8  $\text{km}^2$  atau  $\pm 3,78\%$  dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4  $\text{km}^2$ , apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh sungai bengawan solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

- 1) Bagian tengah dan selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo, dan Kembangbahu.
- 2) Bagian selatan dan utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup,



Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.

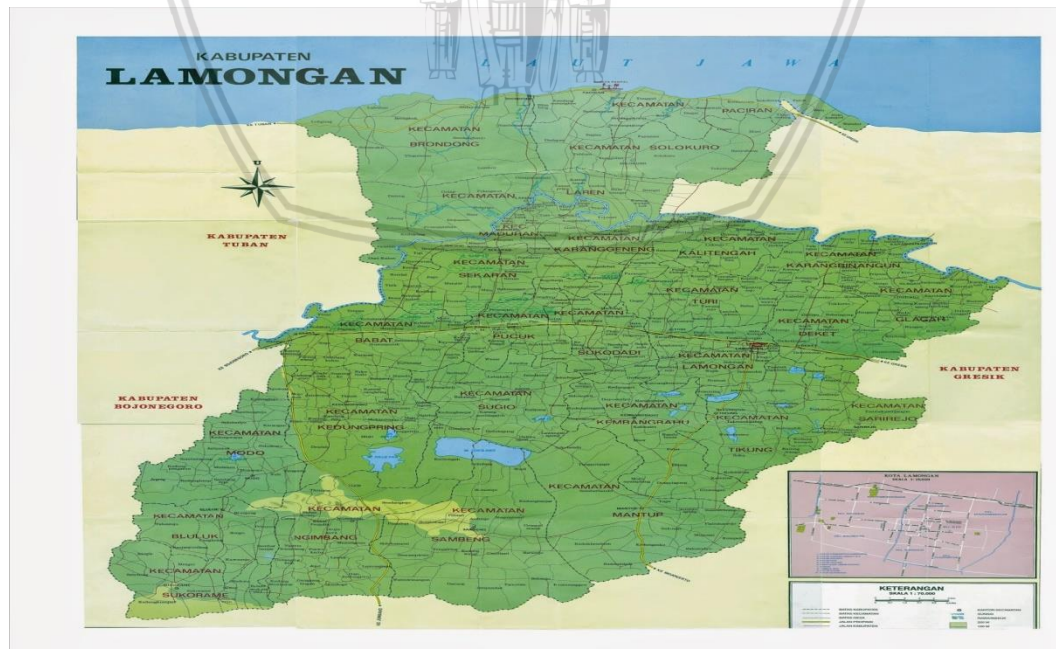
- 3) Bagian tengah dan utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.

**Tabel 7. Luas Wilayah Kabupaten Lamongan Tiap Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas wilayah (Ha)
1	Sukorame	4.147
2	Bluluk	5.415
3	Ngimbang	11.433
4	Sambeng	19.544
5	Mantup	9.307
6	Kembangbahu	6.384
7	Sugio	9.129
8	Kedungpring	8.443
9	Modo	7.780
10	Babat	6.295
11	Pucuk	4.484
12	Sukodadi	5.232
13	Lamongan	4.036
14	Tikung	5.299
15	Sarirejo	4.739
16	Deket	5.005
17	Glagah	4.052
18	Karangbinangun	5.288
19	Turi	5.869
20	Kalitengah	4.335
21	Karanggeneng	5.132
22	Sekaran	4.965
23	Maduran	3.015
24	Laren	9.600
25	Solokuro	10.102
26	Paciran	4.789
27	Brondong	7.459
<b>Jumlah</b>		<b>181.280</b>

*Sumber : Kabupaten Lamongan dalam Angka 2015*

Kondisi topografi Kabupeten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan klerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan jika dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, Sebagian Kecamatan Bluluk, Sambeng, dan Modo. Sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih.



**Gambar 5. Peta Kabupaten Lamongan**  
*Sumber: Profil Kabupaten Lamongan, 2015*

**b. Lambang Daerah**

**Gambar 6. Lambang Kabupaten Lamongan**

*Sumber: Profil Kabupaten Lamongan, 2015*

**1) Arti Lambang Kabupaten Lamongan:**

- a) Sebuah bentuk segilima sama sisi dan undak bertingkat lima
- b) Bintang bersudut lima
- c) Sebuah keris
- d) Bukit atau gunung yang tidak berapi
- e) Ikan lele
- f) Ikan bandeng
- g) Air beriak di dalam tempayan
- h) Tempayan batu
- i) Padi dan kapas
- j) Pita yang bertuliskan LAMONGAN

## 2) Makna Lambang Daerah:

- a) Bentuk segilima sama sisi pada lambang Kabupaten Lamongan tersebut dan gambar undak bertingkat lima melambangkan dasar negara pancasila
- b) Bintang bersudut lima memancarkan sinar kearah penjuru melambangkan ketuhanan yang maha esa
- c) Keris yang melambangkan kewaspadaan dan bahwa Kabupaten Lamongan mempunyai latar belakang sejarah kuno yang panjang
- d) Bukit atau gunung yang tidak berapi melambangkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki pula daerah pegunungan yang di dalamnya terkandung bahan-bahan yang penting untuk pembangunan
- e) Ikan lele melambangkan sikap hidup yang ulet tahan menderita, sabar tetapi ulet, bila diganggu dia berani menyerang dengan senjata patilnya yang ampuh
- f) Ikan bandeng melambangkan potensi komoditi baru bagi Kabupaten Lamongan yang penuh harapan dimasa depan
- g) Air beriak di dalam tempayan melambangkan bahwa air selalu menjadi masalah di daerah ini, di musim hujan terlalu banyak air di musim kemarau kekurangan air
- h) Tempayan batu melambangkan tempat air bersih yang dapat diambil oleh siapapun yang memerlukan dan bahwa daerah Lamongan memiliki latar belakang sejarah yang panjang

- i) Padi dan kapas melambangkan kemakmuran rakyat dalam arti kecukupan

**c. Visi dan Misi**

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang, oleh karena itu maka visi juga merupakan cita-cita atau impian atau gambaran di masa depan yang ingin dicapai sebuah organisasi atau instansi pemerintah dan dijelaskan pada saat sekarang impian, cita-cita atau pandangan tersebut dapat terwujud pada saat ini. Sedangkan misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi. Adapun visi dan misi Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

**1) Visi**

Adanya pertimbangan tentang potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lamongan, maka visi Kabupaten Lamongan yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 adalah:

**“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”**

Makna dari visi tersebut adalah adanya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten, dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan dan

semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

## 2) Misi

Mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- 2) Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.
- 3) Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.
- 4) Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
- 5) Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

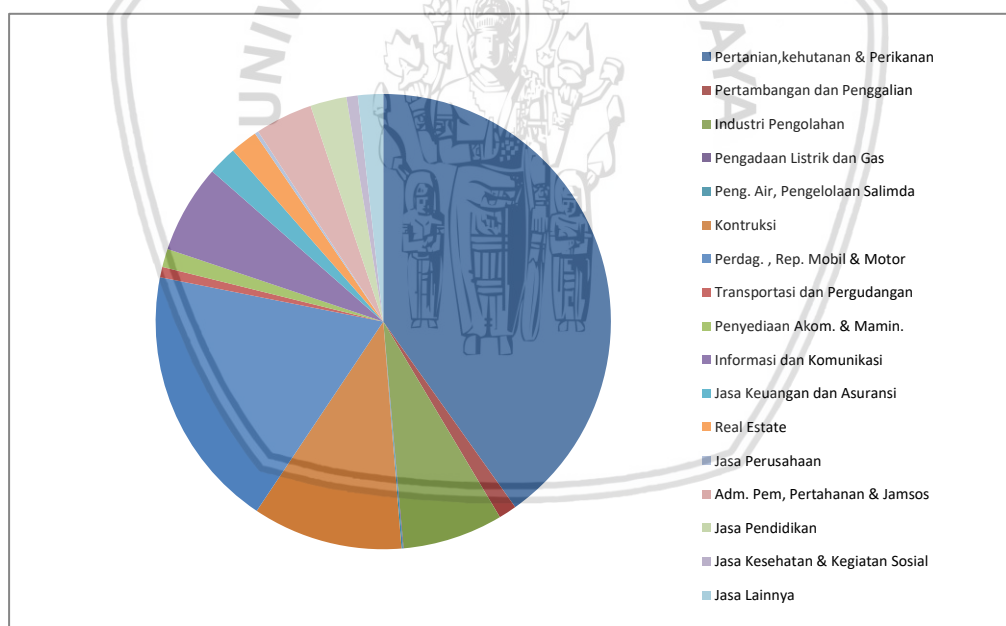
### d. Kondisi Ekonomi

#### 1) Potensi Unggulan Daerah

Sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, maka ada komponen utama yang perlu diketahui yaitu potensi unggulan daerah. Adapun sektor-sektor unggulan Kabupaten Lamongan dilihat menggunakan 2 (dua) indikator utama yaitu *Statis Location Quotion* (SLQ), dan *Dynamic Location Quotion* (DLQ), antara lain:



- a) Sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan perikanan;
- b) Sektor perdagangan, hotel, dan restoran (khususnya sub sektor perdagangan besar dan eceran dan sub sektor hotel);
- c) Sektor bangunan/konstruksi;
- d) Sektor industri pengolahan (khususnya sub sektor industri tanpa migas: industri tekstil, barang kulit, barang kayu, kertas, dan barang cetakan);
- e) Sektor informasi dan komunikasi; dan
- f) Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial.



**Gambar 7. Struktur Ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2014**

*Sumber: Review Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021*

## 2) Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

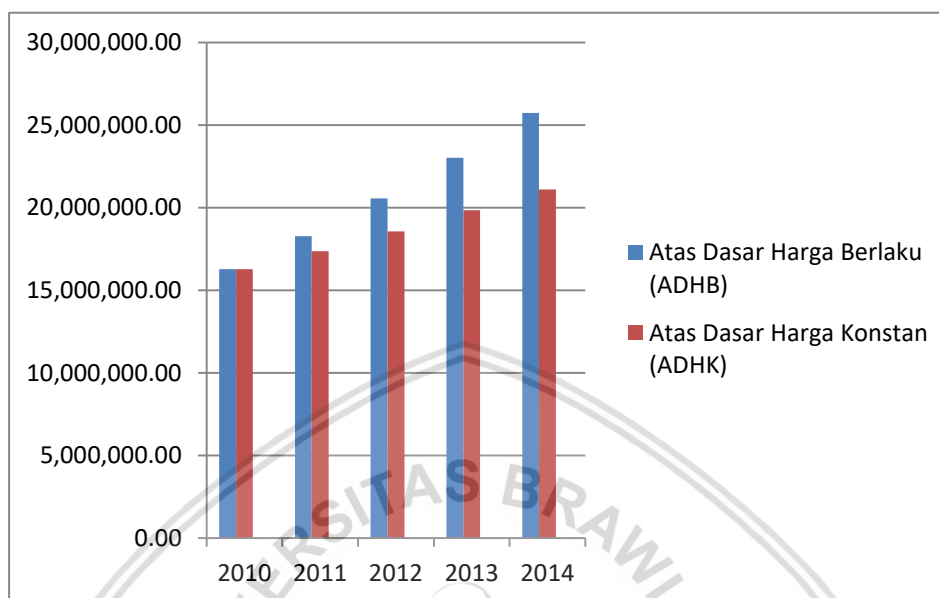
Nilai total PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Lamongan pada tahun 2014 (yang masih merupakan angka estimasi/sangat sementara) adalah sebesar Rp. 21.107 triliun. Sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), PDRB Kabupaten Lamongan mencapai Rp. 25.733 triliun. Perkembangan pencapaian kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari nilai pertumbuhan perekonomian yang dicapai tiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan pada tahun 2014 mencapai 6,41%, melambat dibandingkan tahun 2013 yaitu 6,86%. Agregat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 terbentuk dari pertumbuhan masing-masing kategori lapangan usaha yang bervariasi dan semua mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya sebesar 9,69%, disusul lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,87%. Sedangkan yang mengalami pertumbuhan yang paling rendah adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 0,88 %.

**Tabel 8. Perkembangan PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)</b>	<b>Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)</b>
2010	16.275.241,4	16.275.241,4
2011	18.264.971,4	17.360.487,5
2012	20.561.689,4	18.562.694,7
2013	23.008.446,5	19.836.100,0
2014	25.733.408,0	21.107.584,5

*Sumber : PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2014*



**Gambar 8. Grafik Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2014**

*Sumber: Review Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021*

## 2. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

### a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya diyindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Dinas periknanan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

### 1) Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan bidang perikanan

### 2) Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan mempunyai fungsi terdiri dari sebagai berikut:

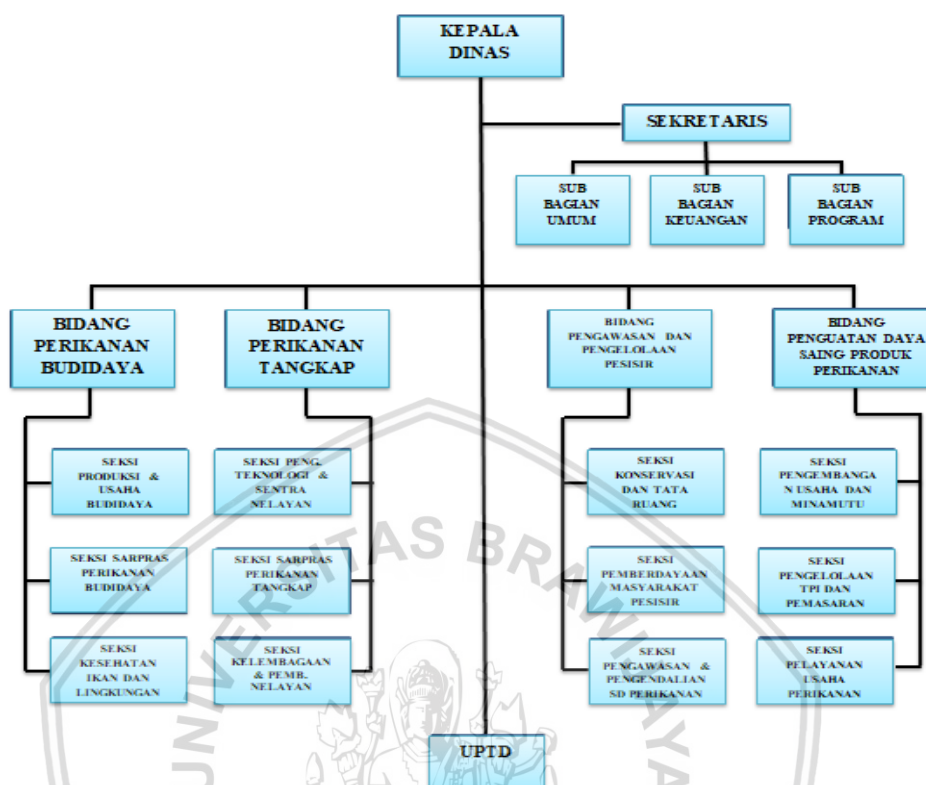
- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
- c) Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan, dan bimbingan usaha perikanan dari hulu sampai hilir;
- d) Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dalam batas kewenangan daerah;
- e) Penyelenggaraan pengawasan dan pengelolaan pesisir serta pengendalian sumber daya perikanan dalam batas kewenangan daerah.

### b. Struktur Organisasi

adapun susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris dibantu oleh:

- a) Sub bagian umum
  - b) Sub bagian keuangan
  - c) Sub bagian program
- 3) Kepala bidang perikanan tangkap
- a) Kasi pengembangan teknologi dan sentra nelayan
  - b) Kasi sarana dan prasarana perikanan tangkap
  - c) Kasi kelembagaan dan pemberdayaan nelayan
- 4) Kepala bidang perikanan budidaya
- a) Kasi produksi dan usaha budidaya
  - b) Kasi sarana dan prasarana budidaya
  - c) Kasi kesehatan ikan dan lingkungan
- 5) Kepala bidang penguatan daya saing produk perikanan
- a) Kasi pengembangan usaha dan bina mutu
  - b) Kasi pengelolaan TPI dan pemasaran hasil perikanan
  - c) Kasi pelayanan usaha perikanan
- 6) Kepala bidang pengawasan
- a) Kasi konservasi dan tata ruang perikanan
  - b) Kasi pemberdayaan masyarakat pesisir
  - c) Kasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan
- 7) Unit pelaksana teknis



**Gambar 9. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan**

*Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Tahun 2016*

### c. Visi dan Misi

#### 1) Visi

Adanya pertimbangan tentang potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di dalam perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan, maka visi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 adalah:

**“Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah melalui optimalisasi usaha dan pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan dan kelautan”.**



Makna dari visi tersebut adalah keadaan masyarakat Kabupaten Lamongan bekerja sebagai pemelihara ikan, penangkap ikan yang mampu bertahan dalam berbagai perubahan dan berupaya merubah dari kegiatan yang bersifat tradisional menuju berwawasan industri dan berjiwa bisnis dengan mengutamakan potensi yang ada di daerah. Adapun tujuan penetapan visi tersebut adalah:

- a) Mencerminkan keinginan yang akan di capai.
- b) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
- c) Memiliki orientasi terhadap masa depan.
- d) Memberdayakan potensi yang tersedia.
- e) Arah pengelolaan yang produktif dan lestari.

## 2) Misi

Rangka untuk mewujudkan suatu visi tersebut juga memerlukan sebuah misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui berbagai upaya. Adapun misi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- a) Mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab.
- b) Mengembangkan sarana prasarana, teknologi dan informasi perikanan dan kelautan.
- c) Mengembangkan kemandirian kelembagaan pembudidaya ikan dan nelayan yang tangguh dan berdaya saing.

- d) Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan dan nelayan serta memperluas lapangan dan kesempatan kerja.

#### d. Tujuan dan Sasaran

Realisasi sebuah misi diperlukannya sebuah tujuan dan sasaran, tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan untuk 5 tahun ke depan adalah:

**Tabel 9. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perikanan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja sasaran pada tahun ke-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan kinerja perikanan didukung peningkatan produksi perikanan dan pemberdayaan masyarakat/pembudidaya	1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap	Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	1,1%	2,2%	3,3%	4,5%	5,6%	6,8%
		2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya	Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	5,0%	10,2 %	15,8 %	21,6 %	27,6 %	34,0 %
		3. Meningkatkan produksi garam rakyat	Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Garam Rakyat	0%	7%	14%	16%	26%	40%
		4. Meningkatkan kuantitas produk olahan hasil perikanan	Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Yang Diolah	1,3%	2,6%	4%	5,3%	6,7%	7,7%

		5. Terlaksananya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan	Prosentase Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dengan Baik	85%	85%	85%	85%	90%	90%
--	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Tahun 2016*

#### e. Program Kerja

Program adalah sebuah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam berbagai kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Perikanan memiliki sejumlah program kerja yang sudah ditetapkan melalui renstra tahun 2016-2021. Program-program tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 4) Program pengembangan data atau informasi perikanan
- 5) Pengembangan perikanan tangkap
- 6) Pengembangan budidaya perikanan
- 7) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- 8) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk perikanan

**f. Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan**

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan terbagi menjadi dua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya asset/modal. Adapun rincian sumber daya yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 10. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	STRATA II	10
2	STRATA I	47
3	DIPLOMA IV	1
4	DIPLOMA III	1
5	DIPLOMA II	-
6	DIPLOMA I	-
7	SLTA	13
8	SLTP	1
9	SD	-
<b>Jumlah</b>		<b>73</b>

*Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Tahun 2016*

**Tabel 11. Asset/Modal Pokok Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan**

No	Asset/Modal Pokok	Jumlah
1	Bangunan Gedung Kantor	7 Gedung
2	Bangunan Gedung TPI	5 Gedung
3	Bangunan UPT	4 Bangunan
4	Lahan Balai Benih Ikan	2 tempat
5	Tanah Kantor	9.150 m <sup>2</sup>
6	Station Wagon	6 Unit
7	Pick Up	2 Unit
8	Sepeda Motor	26 Unit
9	Excavator	2 Unit

*Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Tahun 2016*

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan**

#### **Budidaya dalam Rangka Meningkatkan Produksi Perikanan sebagai**

#### **Penggerak Perekonomian Lokal**

##### **a. Pengembangan Sentra Produksi**

Pengembangan sentra produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan. Sentra produksi yang dimaksudkan adalah kegiatan menumbuh dan mengembangkan pusat-pusat budidaya dan pengelolaanya, mengembangkan jaringan UMKM yang disenergikan dengan usaha pengembangan produk itu sendiri. Pemerintah pusat telah memberikan terobosan yaitu dengan adanya program minapolitan. Kabupaten Lamongan sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan minapolitan di Indonesia sesuai keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurut pernyataan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

“pelaksanaan program minapolitan di Kabupaten Lamongan sejak penetapan lokasi minapolitan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.32/MEN/2010 dan Kep.39/MEN/2011 tentang penetapan kawasan minapolitan.” (wawancara pada tanggal 22 januari 2018, pukul 13.00 diruangan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan)

Dari hasil wawancara tersebut bahwasanya program minapolitan itu sendiri diberlakukan agar daerah mampu memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya terutama pada sektor perikanan yang ada di daerah tersebut. Pengembangan sentra produksi perikanan di kawasan minapolitan tidak

hanya dilakukan oleh satu daerah yang menjadi pusat produksi tetapi ada sinergitas antar daerah yang termasuk di dalam kawasan minapolitan. Sinergitas antar daerah itu sendiri belum berjalan secara maksimal dalam menumbuhkan kembangkan produksi perikanan sehingga kurang memaksimalkan potensi daerah yang ada. Pernyataan tersebut didapat dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

“kawasan minapolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada kawasan perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan oleh adanya keterkaitan fungsional dari hierarki keruangan satuan system permukiman dan sistem minabisnis. Tujuan utama adanya kebijakan ini untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk perikanan.”  
(wawancara pada tanggal 22 januari 2018, pukul 13:00 diruangan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan)

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pengembangan sentra produksi perikanan harus berjalan secara kontinuitas/keberlanjutan agar terjadi suatu peningkatan hasil produksi perikanan yang ada di Kabupaten Lamongan. Budidaya perikanan di Kabupaten Lamongan sendiri di bedakan menjadi 4 klasifikasi, yaitu budidaya tambak, budidaya sawah tambak, kolam dan KJA. Berikut ini merupakan jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan pada tahun 2014 sebagai berikut:

**Tabel 12. Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Lamongan Tahun 2014**

No.	Jenis Budidaya	Luas (Ha)	Produksi (Kg)
1	Tambak	1.754,20	3.972.588
2	Sawah Tambak	23.454,73	36.799.517
3	Kolam	341,95	1.572.458
4	KJA	0,60	2.400
<b>Total</b>		<b>25.551,48</b>	<b>42.346.963</b>

*Sumber: Kabupaten Lamongan dalam Angka 2015*



Dilihat dari tabel produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan tahun 2014 tersebut bahwasanya Kabupaten Lamongan memiliki prospek yang cukup baik dalam pengembangan sentra produksi perikanan. pengembangan sentra produksi tidak terlepas dengan adanya komoditas unggulan perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan. Adapun komoditas unggulan perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan tahun 2015 sebagai berikut:

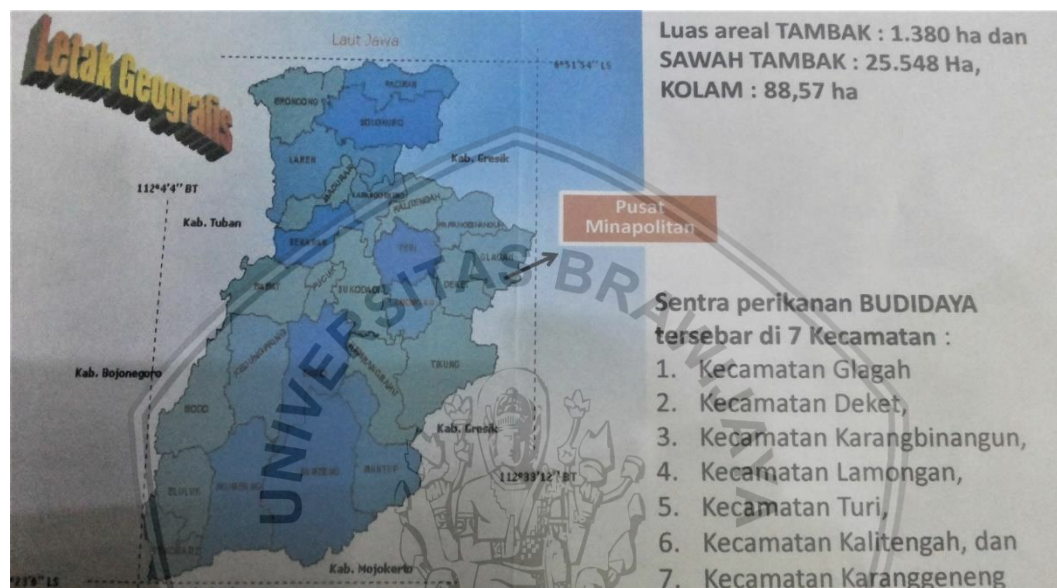
**Tabel 13. Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Tahun 2015**

No	Jenis Komoditas	Produksi (ton)
1	Udang Vanname	13.033,60
2	Bandeng	16.646,20
3	Nila	7.157,50
4	Lele	2.164,40
5	Ikan Mas	1.532,30
6	Patin	23,90
7	Kerapu	335,40
8	Tawes	2.618,90
<b>Total</b>		<b>43.512,20</b>

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 2015*

Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya komoditas unggulan perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan mulai berkembang untuk produksi perikanan total keseluruhan produksi mencapai 43.512,20 ton/tahun, untuk produksi yang paling menjanjikan sendiri adalah bandeng dan udang vanname bisa mencapai 16.646,20 ton/tahun dan 13.033,60 ton/tahun, untuk yang menjadi fokus pengembangan pemerintah adalah udang vanname yang dinilai sangat paling berpotensi untuk terus berkembang. Pengembangan sentra produksi perikanan budidaya itu sendiri sangat diperlukan karena merupakan kunci dasar dalam kemajuan perikanan daerah, dengan adanya program minapolitan yang dibuat pemerintah juga membantu dalam mengembangkan komoditas unggulan

perikanan daerah. Selain pengembangan komoditas unggulan udang vanname di Kabupaten Lamongan sendiri terpilih menjadi salah satu pelaksana program kawasan minapolitan sehingga pemerintah daerah harus serius dalam mensukseskan program tersebut.



**Gambar 10. Peta Minapolis dan Hinterland Berbasis Perikanan Budidaya di Kabupaten Lamongan**

*Sumber: Dokumen Penataan dan Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Lamongan*

Dilihat dari gambar diatas bahwasanya pengembangan potensi produksi unggulan udang vanname di Kabupaten Lamongan terletak di berbagai lokasi kawasan minapolitan, Kecamatan Glagah yang menjadi pusat budidaya perikanan udang vanname sudah cukup berkembang, sementara kawasan pendukung di sekitarnya seperti Kecamatan Deket, Lamongan, Karangbinangun, Turi, Kalitengah, Karanggeneng belum mampu berkembang dengan baik. Kawasan pendukung seharusnya menjadi sentra kawasan saling mendukung dan memperkuat dalam kegiatan sentra produksi udang vanname. Dinas perikanan

Kabupaten Lamongan berencana akan lebih mengoptimalkan peran kawasan pendukung dalam mendukung produksi di pusat budidaya perikanan.

Kesimpulan dari pengembangan sentra produksi yang telah dijabarkan tersebut, bahwasanya peneliti mengambil sebuah kesimpulan dari hasil wawancara maupun olahan data sekunder dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan secara keseluruhan belumlah maksimal dalam pelaksanaannya. Dilihat dari masih adanya daerah yang belum optimal dan sesuai harapan dalam melakukan kegiatan menumbuh dan mengembangkan pusat-pusat budidaya dan pengelolaannya, mengembangkan jaringan UMKM yang disinergikan dengan usaha pengembangan produk perikanan. Padahal pemerintah pusat telah mengeluarkan terobosan baru dengan adanya program minapolitan seharusnya pemerintah daerah lebih mengoptimalkan program tersebut dalam mengelola sumber daya perikanan di Kabupaten Lamongan

#### **b. Rantai dan Pelaku Bisnis**

Pembudidaya perikanan di Kabupaten Lamongan telah dilakukan dari zaman dahulu, dimana lokasi budidaya sendiri berada di aliran sungai bengawan solo saat musim hujan pasti daerah itu selalu mengalami musibah banjir karena volume air yang begitu melimpah dan disaat musim kemarau pasti mengalami kekeringan. Saat musim hujan yang begitu banyaknya volume air maka para penduduk waktu itu memiliki ide untuk memanfaatkan volume air yang melimpah dengan membuat persawahannya menjadi tambak untuk memberikan masukan meskipun pada saat kelebihan volume air di daerah tersebut. Semua ini diperkuat dari keterangan salah seorang masyarakat yang bernama bapak Khoirul Umam

yang merupakan salah satu pembudidaya udang vanname di Desa Karang Kecamatan Glagah yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“daerah sini dari dulu sudah memanfaatkan hasil budidaya perikanan seperti bandeng, nila, lele untuk konsumsi dan penghasilan sehari-hari. Semua itu diakibatkan lokasi disini sangat rawan terjadi banjir sehingga bagaimana caranya agar banjir ini bisa menjadi berkah buat kami yaitu dengan membuat tambak-tambak selain mengurangi bencana banjir juga mampu menambah perekonomian disini meskipun hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Disini satu tahun ada dua mata pencaharian saat musim hujan jadi pembudidaya ikan dan saat kemarau jadi petani padi” (wawancara pada tanggal 27 Januari 2018 pukul 12.30 WIB)

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh bapak Khoirul Uman tersebut diperkuat juga oleh pernyataan dari Kepala Bidang Perikanan Budidaya yaitu bapak Tri Wahyudi yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“kawasan minapolitan di kabupaten Lamongan merupakan wilayah rawa (bonorowo) yang berarti kawasan yang saat musim penghujan rawan terjadi banjir dan pada saat musim kemarau rawan terjadi kekeringan. Sehingga masyarakat pada umumnya lebih memanfaatkan lahan persawahannya saat musim penghujan untuk membudidayakan ikan.” (wawancara pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 07.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari kedua narasumber tersebut diketahui bahwa budidaya perikanan di daerah Kabupaten Lamongan ini sudah terjadi sejak dahulu kala bermula sejak Kabupaten Lamongan bagian utara sering terjadi bencana banjir. Budidaya perikanan saat itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan menggunakan alat seadanya dalam melakukan budidaya. Pengembangan budidaya perikanan disini dimulai sejak adanya program kawasan minapolitan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari situ pemerintah Kabupaten Lamongan melihat potensi yang besar dalam hal budidaya perikanan dengan berupaya memberikan bantuan dengan cara melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang ada di kawasan minapolitan.

Pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan selaku dinas yang melakukan kordinasi, mentoring, evaluasi dan pelaporan. Tugas Dinas Perikanan dalam hal ini harus menentukan langkah strategi dalam pengembangan kawasan minapolitan, selain itu dinas perikanan harus mampu melakukan analisis potensi perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Lamongan. Pendataan potensi perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan sudah disusun berdasarkan tingkatan produksi perikanan pada tahun 2015. Adapun data tingkat produksi perikanan tahun 2015 sebagai berikut:

**Tabel 14. Ranging/Tingkat Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015**

No	Kecamatan	Tambak		Sawah Tambak		Kolam	
		Produksi (kg)	Rank	Produksi (kg)	Rank	Produksi (kg)	Rank
1	Glagah	1.125.746	2	6.543.023	3	140.019	3
2	Karangbinangun	-		7.223.142	2	-	
3	Deket	-		6.286.766	4	100.388	5
4	Lamongan	-		2.383.435	6	87.664	6
5	Turi	-		7.272.800	1	411.805	1
6	Karanggeneng	-		2.108.170	7	112.012	4
7	Brondong	2.899.302	1	-		30.484	8
8	Kalitengah	-		4.548.151	5	227.056	2
9	Paciran	413.793	3	-		83.006	7

*Sumber: Diolah dari Data Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 2015*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat setiap daerah di Kabupaten Lamongan memiliki Potensi perikanan yang besar dengan dukungan yang besar dari pemerintah daerah akan mampu lebih meningkatkan dan mengembangkan potensi perikanan tersebut. Perolehan angka tersebut menggambarkan hasil dari program minapolitan dimana produksi perikanan mengalami peningkatan di setiap daerah di Kabupaten Lamongan, dengan demikian bahwa pemanfaatan budidaya



perikanan di Kabupaten Lamongan sangatlah menjanjikan untuk dimanfaatkan. Potensi kekayaan sumber daya perikanan di bidang budidaya perikanan juga mampu menjadikan kawasan tersebut berperan besar dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Keuntungan dari program minapolitan itu semua tidak hanya di nikmati oleh pemerintah, masyarakatpun sebagai pembudidaya juga mendapat keuntungan dari adanya program minapolitan. Pemanfaatan lahan sebagai budidaya perikanan memberikan pemasukan bagi masyarakat beserta keluarga mereka dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Keadaan tersebut juga memberikan dampak pada pola dan jenis mata pencaharian yang mereka usahakan serta pada potensi sumber daya perikanan yang ada. Program dan kegiatan sektoral ini yang mendukung peningkatan ekonomi mereka akan menjadi keterterikan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada. Adapun jumlah penduduk yang ikut melakukan budidaya perikanan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2013-2015 sebagai berikut:

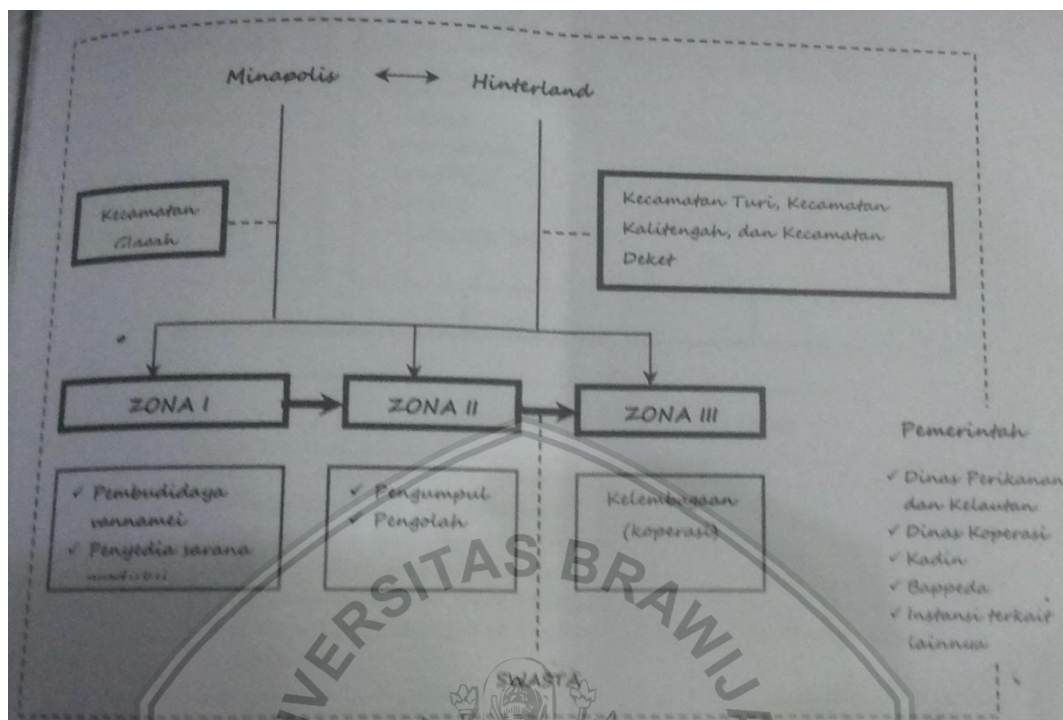
**Tabel 15. Perkembangan Tenaga Kerja Perikanan di Kabupaten Lamongan Tahun 2013-2015**

No	Status Tenaga Kerja	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Nelayan laut	28.154	28.154	17.892
2	Nelayan Perairan Budidaya	6.886	4.886	4.407
3	Pembudidaya	38.574	34.357	34.357
4	Pengolahan	712	969	1.076
5	Hatchery	43	41	41
<b>Total</b>		<b>74.369</b>	<b>70.407</b>	<b>57.773</b>

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 2015*



Dilihat dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan tenaga kerja perikanan di Kabupaten Lamongan untuk tahun 2013-2015 mengalami penurunan di setiap tahunnya, tidak terkecuali para pembudidaya ikan semua itu berarti siklus aquabisnis tidak mampu berjalan sesuai yang diharapkan. Minapolitan sebagai konsep pengembangan ekonomi berbasis kawasan yang menjadi kebijakan strategis pemerintah saat ini, diharapkan akan mampu mendorong jalannya siklus aquabisnis tersebut. Konsep ini akan berjalan dengan baik jika seluruh aspek penggerak siklus aquabisnis mampu dibangun secara efektif. Pencapaian produksi dan kapasitas usaha akan mampu dicapai jika para pelaku utama maupu pelaku usaha secara ekonomi mampu mencapai titik optimal dari kelayakan usaha. Sedangkan kelayakan usaha sangat tergantung pada jalannya subsistem-subsistem yang saling berinteraksi mulai dari kegiatan di hulu (*on farm*) sampai kegiatan di hilir (*off farm*), hal ini dikarenakan keberadaan subsistem dalam siklus yang berjalan secara efektif akan mampu meningkatkan efisiensi produksi. Rantai bisnis yang direncanakan pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:



**Gambar 11. Rantai dan Pelaku Bisnis Kegiatan Minapolitan di Kabupaten Lamongan**

*Sumber: Review Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021*

### 1) Zona I (penyedia bahan baku)

Merupakan level pertama dari rantai bisnis minapolitan di Kabupaten Lamongan. Zona ini merupakan kegiatan budidaya ikan yang dilakukan di kawasan minapolitan. pelaku bisnis yang masuk dalam zona ini meliputi:

- Kelompok pemilik kegiatan budidaya
- Kelompok petambak/pembudidaya dengan status penyewa maupun penggarap (dapat terdiri dari kelompok pembenih maupun pembesaran dengan status penyewa maupun penggarap)
- Kelompok penyedia kebutuhan produksi

## 2) Zona II (pasca produksi)

Merupakan level dimana bisnis dimulai setelah kegiatan pemanenan produk budidaya. Pada level ini kegiatan yang ada meliputi kegiatan pemasaran produk secara langsung, dalam artian produk segera langsung dipasarkan melalui mekanisme tertentu (misal: melalui koperasi) serta kegiatan diversifikasi produk untuk peningkatan nilai tambah produk sebelum dipasarkan yaitu melalui kegiatan pengolahan. Pelaku bisnis yang masuk dalam zona ini meliputi:

- a) Kelompok pemilik kegiatan budidaya
- b) Kelompok pengumpul hasil produksi
- c) Kelompok pengolah hasil produksi

## 3) Zona III (pemasaran)

Level terakhir merupakan kegiatan pemasaran. Kegiatan ini diperlukan lembaga bisnis penunjang yang merupakan lembaga yang bertujuan mencari keuntungan, seperti koperasi, usaha perorangan, usaha jasa keuangan dan sebagainya. Kelembagaan menjadi bagian penting dalam upaya menata siklus bisnis perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan. Adanya kelembagaan bisnis ini diharapkan antar subsistem mampu berjalan dan berinteraksi secara baik dan berkelanjutan. Pelaku bisnis yang masuk dalam zona ini meliputi:

- a) Kelompok pemilik kegiatan budidaya
- b) Lembaga bisnis

Kesimpulan dari rantai dan pelaku bisnis yang telah dijabarkan tersebut, bahwasanya peneliti mengambil sebuah kesimpulan dari hasil wawancara maupun olahan data sekunder dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik tetapi masih belum optimal. Semua itu dapat dilihat dari menurunnya pembudidaya perikanan setiap tahunnya oleh karena beberapa hal, serta masih adanya masyarakat yang beranggapan bahwa budidaya perikanan hanya mengisi waktu saat musim penghujan dan belumlah sangat menjanjikan hasilnya. Padahal pemerintah daerah telah melakukan pengembangan siklus aquabisnis mulai dari kegiatan di hulu sampai kegiatan di hilir, seharusnya pemerintah daerah lebih mengoptimalkan program tersebut dalam memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa mengelola sumber daya perikanan di Kabupaten Lamongan sangatlah menjanjikan.

### **c. Pola Pemasaran**

Pemasaran merupakan suatu kegiatan jual beli produksi masyarakat yang telah dihasilkan berguna peningkatan ekonomi masyarakat. Pola pemasaran produksi perikanan di Kabupaten Lamongan dilakukan langsung oleh para tengkulak yang membawa hasil produksi masyarakat ke pasar, untuk harga itu sendiri disesuaikan dengan harga pasar pada saat itu. Selain harga pasar yang menentukan harganya produksi ikan juga dilihat dari berapa besar kecilnya ikan. Pernyataan ini diperkuat dari keterangan salah seorang masyarakat yang bernama bapak Mulyadi yang merupakan salah satu pembudidaya udang vanname di Desa Rayunggumuk Kecamatan Glagah yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“pemasaran ikan dan udang/ikan disini langsung di borong tengkulak dan dijual di pasar untuk harganya sesuai harga pasar dan besar kecilnya udang/ikan yang dijual. Setelah udang vannamee terjual di pasar baru tengkulak memberikan hasil yang didapat kepada pembudidaya udang vannamee tersebut.” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Mulyadi diketahui bahwa semua hasil perikanan tersebut dijual langsung kepasar dalam keadaan masih segar oleh tengkulak dan harga sesuai harga pasar saat itu dan besar kecilnya udang vannamee. Semua itu terjadi karena beberapa hal diantaranya adanya tuntutan atau kebutuhan masyarakat budidaya untuk segera mendapatkan uang tunai (*cash money*) setelah panen dan hal itu akan segera terpenuhi apabila ikan itu dijual dalam keadaan segar. pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Tri Wahyudi selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

“pemasaran produk budidaya perikanan, sebagian besar dalam bentuk segar. Serta belum adanya kerjasama dengan pihak manapun dalam bidang pemasaran ikan hasil budidaya” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 07.30 WIB)

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Tri Wahyudi tersebut diperkuat oleh pernyataan dari bapak Basuki selaku pembudidaya ikan sebagai berikut:

”harga ikan dipasar saat ini stabil dan untuk udang vannamee kisaran harga Rp 35.000 – Rp 60.000 tergantung juga dari besar dan kecilnya ikan ataupun udang. Karena pada waktu bulan november sampai dengan bulan februari harga pasar untuk komoditas ikan dan udang akan stabil. Sedangkan pada saat bulan maret sampai dengan bulan juni harga pasar untuk ikan dan udang akan mengalami penurunan yang besar-besaran akibat panen raya di kawasan minapolitan dan semua itu mempengaruhi harga pasar.” (wawancara pada tanggal 27 januari 2018 pukul 12.30 WIB)

Berdasarkan keterangan diatas bahwasanya pemasaran hasil produksi perikanan di Kabupaten Lamongan masih dalam bentuk segar dan belum adanya kerjasama yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini swasta dalam mengembangkan hasil produksi perikanan tersebut. Seharusnya pemerintah harus berupaya dalam membantu masyarakat dalam hal pemasaran. Pola pemasaran sangat dipengaruhi harga pasar, sedangkan harga pasar sendiri mengalami naik turun di setiap waktunya. Harga pasar untuk ikan maupun udang pada bulan november sampai dengan bulan februari stabil, tetapi untuk bulan maret sampai dengan bulan juni akan mengalami keterpurukan akibat adanya panen raya ikan untuk digantikan tanaman padi. Adapun harga pasar komoditas perikanan untuk periode tahun 2017 sebagai berikut:

**Tabel 16. Harga Pasar Komoditas Perikanan Kabupaten Lamongan Tahun 2017**

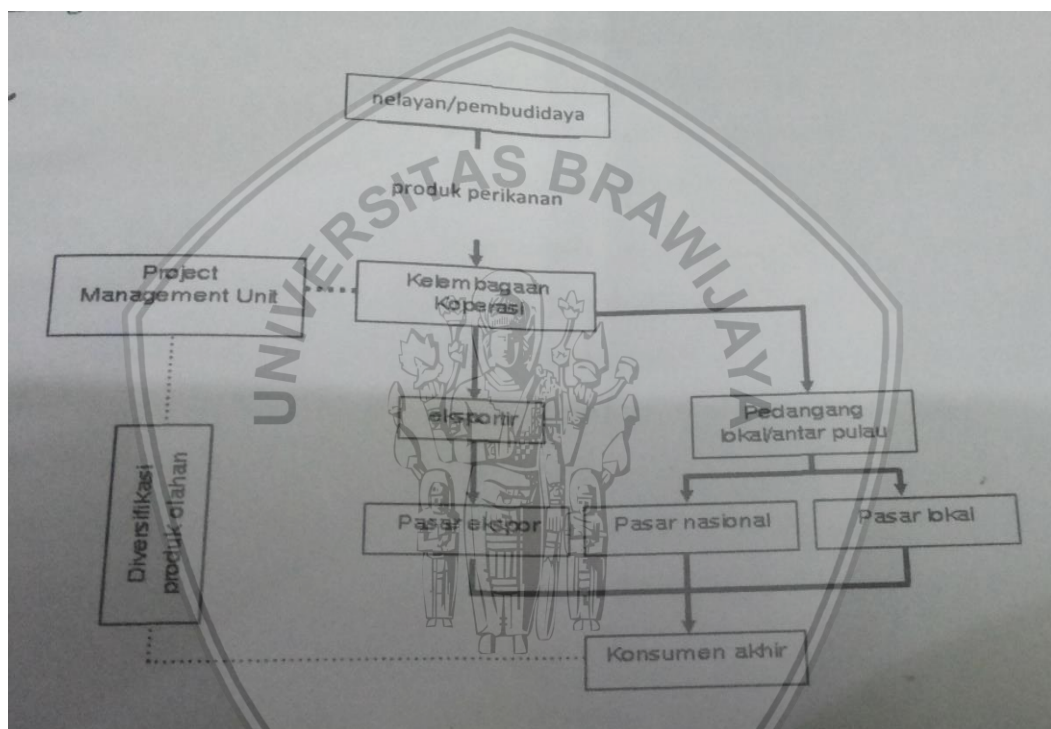
No	Komoditas Perikanan	Harga Pasar (Kg)		
		Maret-Juni (Murah)	Juli-Oktober (Mahal)	November-Februari (Stabil)
1	Ikan Bandeng	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 20.000
2	Ikan Mujair	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 13.000
3	Ikan Mas	Rp. 12.000	Rp. 25.000	Rp. 16.000
4	Udang vannamei	Rp. 25.000	Rp. 60.000	Rp. 35.000

*Sumber: Dinas Perikanan, 2017.*

Dilihat dari tabel tersebut bahwasanya harga ikan mengalami fluktuasi yang tidak menentu akibat dari permintaan pasar akan ikan yang berubah setiap harinya. Semua itu mengakibatkan harga pasar akan komoditas perikanan tidak



memeiliki harga yang pasti. Sehingga para pembudidaya ikan merasa kurang diuntungkan dengan hal tersebut belum lagi adanya permainan para tengkulak ikan yang sungguh merugikan para pembudidaya ikan di Kabupaten Lamongan. Adapun skema pola pemasaran hasil produksi perikanan yang telah dirancang oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:



**Gambar 12. Pola Pemasaran Produk di Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan**

*Sumber: Review Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021*

Melihat pola pemasaran di atas, maka seharusnya arah dari pengembangan sistem dan usaha perikanan di Kabupaten Lamongan diarahkan ke:

- 1) Membangun sistem dan usaha minabisnis yang berdaya saing yang dicirikan oleh tingkat efisiensi, mutu, harga dan biaya produksi, serta

kemampuan menerobos pasar, meningkatkan pangsa pasar dan memberi pelayanan yang professional;

- 2) Membangun sistem dan usaha minabisnis berkerakyatan dicirikan oleh berkembangnya usaha produktif yang melibatkan masyarakat luas, kesempatan kerja dan pendapatan;
- 3) Membangun sistem dan usaha minabisnis berkelanjutan diartikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya minabisnis yang semakin besar dari waktu ke waktu dan semakin mensejahterakan masyarakat (secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup); dan
- 4) Membangun sistem dan usaha minabisnis yang desentralisasi diartikan bahwa kegiatan ekonomi ditentukan oleh masyarakat pelaku sesuai dengan kondisi wilayahnya atas dasar keunggulan komparatif dan aspirasi masyarakat setempat.

Kesimpulan dari berbagai hasil data dan wawancara kepada narasumber bahwasanya pola pemasaran perikanan di Kabupaten Lamongan belum berjalan dengan baik dan masih banyak masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan di daerah, serta pelaku dalam pengembangan di kawasan minapolitan yang harus diantisipasi terutama dalam memasarkan produk antara lain adalah kestabilan harga pasar komoditas perikanan selain itu juga produk belum standar dalam hal jenis dan ukuran, serta kondisi fisik dari produk belum memenuhi persyaratan mutu. Masih adanya masalah tersebut, pembeli produk kadang kecewa dengan hasil panen yang dibeli karena tidak sesuai dengan klasifikasi udang yang

diinginkan. Demikian pula belum dikuasanya teknologi dan kurangnya peralatan pengemasan dan transportasi untuk pengiriman jarak jauh, menyebabkan jangkauan pemasaran hasil produk masih terbatas atau hanya berorientasi lokal.

#### **d. Permodalan**

Pelaksanaan program minapolitan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat budidaya perikanan, oleh karena itu untuk memenuhi tujuan tersebut salah satunya diperlukan bantuan modal agar dapat membantu masyarakat sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Modal dalam melakukan proses budidaya tidaklah sedikit bagi masyarakat pembudidaya udang maupun ikan, oleh karena itu para pembudidaya biasanya menggunakan modal pribadi selain itu juga dengan meminjam modal kepada para pemilik modal atau biasa disebut dengan tengkulak, hal ini diketahui dari wawancara peneliti kepada bapak Khoirul Umam selaku pembudidaya udang vanname yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“modal usaha budidaya yang kami lakukan untuk melakukan pembudidayaan ikan adalah milik pribadi dan juga biasanya kami meminjam kepada para tengkulak yang bisa menerima hasil panen udang vanname kami, untuk proses pembayaran kami biasanya dengan memotong harga panen udang vanname yang kami jual kepada mereka. Mau atau tidak mau kami semua melakukan itu demi mendapatkan modal usaha budidaya udang kami.” (wawancara pada tanggal 27 januari 2018)

Berdasarkan keterangan dari bapak Khoirul Umam selaku pembudidaya di Kabupaten Lamongan tersebut, diperkuat oleh bapak Tri Wahyudi selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya sebagai berikut:

“untuk modal usaha pembudidaya perikanan seperti benih, pakan dan obat-obatan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri, pemerintah hanya membantu dalam hal pembinaan-pembinaan kepada para pembudidaya ikan

atau kelompok pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Lamongan.”  
(wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 07.30 WIB)

Berdasarkan keterangan dari bapak Khoirul Umam dan bapak Tri Wahyudi bahwasanya modal didapat dari uang pribadi dengan usaha sampingan seperti buruh bangunan, bertani dan melakukan pekerjaan yang sesuai permintaan dan sekaligus peminjaman modal kepada para pemilik modal dalam hal ini tengkulak agar dapat berbudidaya udang vanname. Mengumpulkan modal dalam menjalankan proses budidaya udang vanname menjadi kendala bagi para pembudidaya itu sendiri, hal ini dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di kawasan minapolitan tersebut. Mengatasi permasalahan dalam memperoleh modal bagi para pembudidaya menjadi permasalahan yang penting untuk diselesaikan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu perlunya perhatian pemerintah dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pembudidaya udang vanname maupun ikan tersebut. Adapun realisasi anggaran yang sudah dialokasikan untuk pengembangan kawasan minapolitan oleh dinas perikanan tahun 2013 – 2016 sebai berikut:

**Tabel 17. Realisasi Anggaran Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun 2013-2016**

No	Tahun	Angaran Terealisasi
1	2013	5,9 miliar
2	2014	6,4 miliar
3	2015	6,6 miliar
4	2016	6,7 miliar

*Sumber: Laporan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 2017*

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Lamongan khususnya di kawasan minapolitan Kabupaten

Lamongan sudah sangat baik dengan melihat anggaran yang dikeluarkan tiap tahunnya mengalami peningkatan dengan diikuti hasil produksi yang meningkat pula disetiap tahunnya. Selain realisasi anggaran untuk membantu sebagian permodalan para pembudidaya di Kabupaten Lamongan, serta anggaran tersebut juga dipergunakan untuk memberikan fasilitas pendukung dalam meningkatkan produksi hasil perikanan di Kabupaten Lamongan salah satunya dengan memperbaiki fasilitas ruas jalan baik jalan utama maupun jalan poros menuju tambak yang di kawasan minapolitan. Adapun ruas jalan dan perkerasan jalan di kawasan minapolitan sebagai berikut:

**Tabel 18. Panjang Ruas Jalan dan Perkerasan Jalan di Wilayah Kawasan Minapolitan**

No	Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (Km)			Jumlah
		Aspal	Diperkeras	Tanah	
1	Glagah	8,23	74,00	2,50	84,73
2	Deket	18,00	83,00	-	101,00
3	Karangbinangun	35,40	-	-	35,40
4	Turi	97,80	27,80	-	125,60
5	Kalitengah	39,50	49,0	-	88,50
6	Lamongan	27,52	-	-	27,52
7	Karanggeneng				
8	Brondong	25,0	65,0	28,2	118,2
9	Paciran	80,84	-		80,84

*Sumber: Kecamatan dalam angka 2015*

Berdasarkan tabel tersebut bahwasanya perbaikan ruas jalan dan perkerasan jalan di wilayah minapolitan sangat baik dengan melihat kondisi semua ruas jalan sudah beraspal dan diperkeras, sehingga semua itu akan berdampak pada keberhasilan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lamongan. Adanya ruas jalan yang baik menguntungkan dalam hal mempercepat dan mempermudah pembeli ikan menuju lokasi pembudidaya ikan, sehingga

mempercepat transaksi jual beli ikan untuk mempercepat pula para pembudidaya memperoleh modal usaha. Ada juga beberapa alternatif pola atau bentuk kemitraan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung berkembangnya kawasan minapolitan budidaya antara lain:

- 1) Pola kemitraan inti-plasma. Pada pola ini umumnya merupakan hubungan antara nelayan/petambak, kelompok nelayan/petambak sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi. Sedangkan kelompok mitra berkewajiban memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.
- 2) Pola kemitraan subkontrak. Pola ini merupakan pola kemitraan antara perusahaan dengan kelompok mitra yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari hasil produksinya. Pada pola ini ditandai dengan adanya kesepakatan tentang kontrak bersama yang menyangkut volume, harga, mutu dan waktu. Pola ini sangat bermanfaat dalam transfer alih teknologi, modal, ketrampilan dan produktifitas.
- 3) Pola kemitraan dagang umum. Pola ini merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Pola ini pihak yang terlibat adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas tertentu. Pihak kelompok nelayan/petambak berkewajiban memasok



barang-barang dengan persyaratan dan kualitas produk yang telah disepakati bersama.

- 4) Pola kemitraan kerjasama operasional. Pola kemitraan ini merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Umumnya kelompok mitra adalah kelompok yang menyediakan lahan, sarana dan tenaga kerja. Sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya, modal, manajemen dan pengadaan sarana produksi lainnya. Perusahaan mitra juga berperan sebagai penjamin pasar dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan. Yang perlu diatur dalam pola ini adalah kesepakatan pembagian hasil dan resiko.

Upaya yang dilakukan pemerintah diatas adalah untuk mengembangkan potensi perikanan yang ada di daerah. Semua itu memerlukan berbagai macam data dan informasi untuk mengukur sejauh mana program berhasil dan tepat sasaran. Beberapa cara dalam mengukur keberhasilannya adalah dengan melihat dukungan infrastruktur untuk keberlanjutan suatu usaha, menggali potensi produksi, rantai pasok dan jaringan pasar serta pelaku pemasaran hasil perikanan dan tidak kalah pentingnya juga adalah keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam di daerah.

Kesimpulan dari berbagai hasil data dan wawancara yang telah didapatkan, peneliti memberikan kesimpulan bahwasanya permodalan dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lamongan masih belum optimal. Dimana masyarakat masih harus mengeluarkan uang pribadi dalam pengelolaan dan

pembudidayaan ikan di Kabupaten Lamongan, pemerintah daerah hanya sebatas menyediakan fasilitas pendukung dalam bentuk penyuluhan dan perbaikan ruas jalan tanpa memberikan bantuan modal usaha sehingga itu semua dianggap kurang optimal untuk proses pengembangan kawasan minapolitan yang ada di Kabupaten Lamongan saat ini. Seharusnya dengan adanya dana anggaran yang setiap tahunnya meningkat membuat pemerintah lebih memberikan bantuan modal ataupun adanya mitra kerjasama dengan pihak swasta yang dirasa saat ini masih kurang, serta bantuan keperluan pembudidaya ikan yang lainnya.

#### **e. Teknologi Produksi**

Pengembangan teknologi produksi dilakukan untuk memberikan kemajuan dalam proses pembudidayaan, hal ini dilakukan karena masih banyaknya pembudidaya perikanan yang masih menggunakan teknologi tradisional dalam proses pembudidayaan yang mengakibatkan hasil produksi yang didapat kurang menguntungkan untuk dipasarkan. Hal ini sangat disayangkan karena Kabupaten Lamongan memiliki sumber daya alam yang potensial untuk dimanfaatkan, salah satu komoditas yang sangat menjanjikan adalah udang vanname. Namun belum memadainya sarana dan prasarana, modal, tingkat penguasaan teknologi dan informasi baik pada hulu maupun hilir menjadi kendala bagi masyarakat setempat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Dahulu sebelum adanya perhatian dari pemerintah terhadap pengembangan kawasan minapolitan banyak masyarakat hanya melakukan kegiatan perikanan sebisanya tanpa memperhatikan cara budidaya ikan yang baik. Semenjak

program pengembangan kawasan minapolitan pemerintah telah banyak melakukan perbaikan dalam segi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dan pembudidayaan ikan di Kabupaten Lamongan. Adapun pernyataan dari bapak Mulyadi selaku pembudidaya ikan di Kecamatan Glagah sebagai berikut:

“iya mas untuk alat-alat teknologi budidaya perikanan ada banyak mas di kantor desa, mulai dari alat teknologi pembuatan pakan ikan dan teknologi lainnya seperti penggunaan terpal HDPE serta masih banyak lagi mas mas, jika ada dari pihak Dinas Perikanan kesana selalu kami semua diberikan penyuluhan tentang pemanfaatan teknologi yang terbaru.” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 10.00 WIB)

Hal ini diperkuat oleh keterangan bapak Tri Wahyudi sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

“dahulu masyarakat budidaya ikan sangat minim informasi dan teknologi yang digunakan oleh pembudidaya ikan masih ada yang tradisional serta kurangnya pengetahuan dalam menghasilkan budidaya ikan yang baik, namun setelah adanya perhatian pemerintah banyak pembudidaya yang sudah menerapkan teknologi semi intensif, intensif dan budidaya dengan menggunakan terpal HDPE.” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pada pukul 07.30 WIB di ruangan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan)

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh bapak Tri Wahyudi sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang ditemui oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa perbaikan mutu dari produk perikanan unggulan sudah dapat terlihat perubahan perilaku masyarakat dalam budidaya perikanan yang awalnya tradisional sekarang sudah ada beberapa masyarakat yang menggunakan teknologi modern. Hal ini tidak terlepas dari upaya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang memberikan bimbingan dan bantuan kepada masyarakat pembudidaya. Adanya upaya pemerintah daerah dalam membantu masyarakat pembudidaya harapannya pelaksanaan kegiatan

pembudidaya akan terus berlanjut dan semakin baik kedepannya sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kawasan minapolitan. Kekurangan informasi terhadap keberadaan dan kondisi pasar serta masih lemahnya tataniaga perikanan akan dapat teratasi oleh adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Menyadari atas keterbatasan tersebut serta tingginya tuntutan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga sebagai implikasi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi membuat banyak pembudidaya mengalihkan profesi usaha tidak hanya sebagai pembudidaya ikan melainkan juga sebagai buruh tani dan sektor jasa lainnya. Namun dalam pelaksanaan kegiatan usaha tersebut masih belum mampu mengangkat tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus di pilihlah komoditas unggulan yang memiliki nilai jual dan pembudidayaannya relatif mudah serta cepat menuaikan hasil produksi yaitu komoditas utama adalah udang vanname.

Secara umum udang vanname sudah tidak asing lagi bagi para pembudidaya ikan tetapi masih banyak pembudidaya ikan yang tidak mengetahui peluang besar jika melakukan budidaya udang vanname. Keunggulan dalam budidaya udang vanname antara lain peluang besar dalam ekspor masih terbuka luas, harganya relatif stabil dan perawatannya mudah serta waktu panen relatif singkat. Maka diperlukan berbagai upaya selain sentra informasi dan inovasi dari produksi udang vanname. Upaya lain yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam memperbaiki mutu pembudidaya udang vanname sebagai komoditas unggulan dan ikan lainnya secara umum di Kabupaten lamongan sangatlah

penting dilakukan. Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan memberikan bantuan baik berupa bantuan perlengkapan pembudidaya ataupun bantuan tenaga ahli sebagai proses bimbingan dalam membudidayakan udang vannamee dan ikan lainnya yang lebih baik. Hal itu dijelaskan oleh Ibu Balir sebagai Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan telah memberikan bantuan memfasilitasi kegiatan percontohan budidaya udang maupun ikan, kegiatan CBIB (cara budidaya ikan yang baik) dan CPIB (cara pembenihan ikan yang baik).” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 07.30 WIB di ruangan Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan)



**Gambar 13. Kincir-Kincir Air (*Puddle Wheel*)**

*Sumber: Hasil Dokumentasi, 2018*





**Gambar 14. Perbaikan Ruas Jalan Menuju tambak**  
*Sumber: Hasil Dokumentasi, 2018*



**Gambar 15. Pelatihan Teknis Budidaya dan Pencegahan Penyakit**  
*Sumber: Hasil Dokumentasi Dinas Perikanan 2017*

Pemberian bantuan dan pelatihan kepada para pembudidaya perikanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan ini berupa bantuan dalam bentuk penerapan cara budidaya ikan yang baik. Hal ini dilakukan untuk



meningkatkan mutu produksi perikanan yang ada di Kabupaten Lamongan, penerapan cara budidaya ikan yang baik dimotori oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan itu sendiri dengan kerjasama yang dilakukan dengan UPT perikanan. Kerjasama ini menghasilkan banyak terobosan baru dalam pengembangan ekonomi masyarakat kawasan minapolitan. Hal ini membuat pelaksanaan program minapolitan dapat mudah dan efektif dengan adanya bantuan tersebut. Adapun bantuan yang diberikan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 16. Penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)**  
*Sumber: Hasil Dokumentasi, 2018*

Kesimpulan dari berbagai hasil data dan wawancara yang telah didapatkan, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwasanya teknologi produksi yang digunakan dalam pembudidayaan ikan di Kabupaten Lamongan kurang baik. Banyaknya masyarakat pembudidaya yang masih melakukan budidaya dengan cara yang tradisional sehingga mampu menghambat hasil produksi para

pembudidaya ikan semua itu juga mampu menjadikan proses pengembangan kawasan minapolitan terganggu. Pemerintah daerah seharusnya mampu memaksimalkan teknologi produksi yang sekarang ini semakin berkembang supaya lebih efektif dan efisien dalam pembudidayaan ikan yang ada di Kabupaten Lamongan.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dalam Rangka Meningkatkan Produksi Perikanan sebagai Penggerak Perekonomian Lokal**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Kekuatan**

- a) Adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 yang menetapkan Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana program minapolitan

Penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan minapolitan di Kabupaten Lamongan. Adanya keputusan menteri kelautan dan perikanan yang menetapkan 7 lokasi kawasan perikanan budidaya dan 1 lokasi kawasan perikanan tangkap. Hal ini diperkuat oleh penjelasan dari Bapak Ir. Suyatmoko selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Kabupaten Lamongan terpilih menjadi pelaksana program kawasan minapolitan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 yang menetapkan 7 lokasi

kawasan minapolitan perikanan budidaya dan 1 lokasi kawasan perikanan tangkap” (wawancara pada tanggal 22 januari 2018 pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan keterangan dari bapak Ir. Suyatmoko tersebut diperkuat juga oleh pernyataan bapak Tri Wahyudi selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya yang memberikan penjelasan sebagai berikut:

“iya mas bahwa Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/2013 menjadi pedoman dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lamongan. Pemerintah daerahpun langsung mengeluarkan SK Bupati 181/151/Kep/413.013/2011 tentang kelompok kerja pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lamongan.” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 07.30 WIB)

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasanya Kabupaten Lamongan menjadi daerah pelaksana program minapolitan, hal ini menjadi alat pemacu dalam pengembangan kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Lamongan. Selain itu dukungan yang besar dari pemerintah daerah Kabupaten Lamongan juga turut memberikan kekuatan dari pelaku pengembangan kawasan minapolitan. Adanya peraturan dan dukungan pemerintah daerah tersebut juga mampu membantu mensukseskan perkembangan budidaya perikanan yang ada di Kabupaten Lamongan yang memiliki potensi besar untuk lebih berkembang.

## 2) Peluang

### a) Hasil produksi komoditas unggulan sangat menjanjikan

Hasil produksi perikanan yang menjadi komoditas unggulan sangat menguntungkan untuk dijual. Komoditas unggulan udang vanname merupakan komoditas yang diminati pasar untuk di konsumsi sehari hari,

selain itu juga dapat dijadikan produk olahan lainnya. Perawatan dan masa panen yang relatif singkat menjadikan komoditas unggulan udang vanname menjadi favorit dikalangan budidaya perikanan di Kabupaten Lamongan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh BapK Basuki salah satu pembudidaya udang vanname di Desa Karang Kecamatan Glagah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“pasar dari udang vanname sangat menjanjikan apalagi dalam keadaan segar dirasa kondisi segar membuat udang memiliki cita rasa yang masih sangat gurih. Serta untuk pembudidayaanya relatif singkat, mulai tabur benih di tambak/kolam pembesaran untuk 2 bulan sudah bisa di panen serta pemberian makan 3 kali sehari.” (wawancara pada tanggal 27 januari 2018 pukul 12.30 WIB)

Berdasarkan keterangan dari bapak Basuki diperkuat juga oleh bapak Mulyadi selaku pembudidaya di Kecamatan Glagah sebagai berikut:

“komoditas unggulan disini itu udang vanname mas karena udang vanname sangat mudah untuk dibudidayakan dan perawatanyapun mudah serta dalam waktu 2 sampai 3 bulan sudah bisa dipanen. Selain itu harga dipasar juga menjanjikan dan juga dari segi ukuran tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil sehingga banyak peminat di pasar.”(wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa udang vanname memiliki peminat yang cukup tinggi terutama masyarakat lokal kota lamongan dimana udang vanname memiliki rasa yang berbeda dari udang kebanyakan apa lagi saat kondisi masih segar. selain menjadi makanan rumahan udang vanname juga dijadikan berbagai produk olahan lainnya. Harganya pun relatif terjangkau dikalangan masyarakat untuk satu kilogram hanya kisaran harga Rp 35.000-60.000 per kilogram, serta tergantung besar kecilnya udang yang diminta konsumen. Tingginya

konsumen udang vannamee dan harga yang relatif terjangkau membuat komoditas ini menjanjikan untuk terus dikelola dan dikembangkan.

- b) Teknik budidaya baru dari pihak pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan hasil produksi

Pengembangan potensi budidaya perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan terus dilakukan, salah satunya menentukan komoditas unggulan yang mampu dengan cepat meningkatkan pendapatan para pembudidaya. Pemerintah juga mengajarkan bagaimana cara budidaya ikan yang baik dengan teknik CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CBIB (cara budidaya ikan yang baik). Hal tersebut berpeluang untuk meningkatkan hasil produksi perikanan serta memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat pembudidaya di Kabupaten Lamongan. Penjelasan tersebut dijelaskan oleh bapak Tri Wahyudi selaku Kepala Bidang Perikanan Budiaya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“kami dari Dinas Perikanan memberikan pelatihan tentang bagaimana budidaya perikanan yang baik dengan teknik CPIB dan CBIB, kedua teknik tersebut diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan adanya peningkatan produksi ikan/udang maka akan meningkatkan gairah ekonomi di segala sektor baik *on farm* maupun *off farm*.” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 07.30 WIB di ruangan Kepala Bidang Perikanan Budiaya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan)

Berdasarkan pernyataan dari bapak Tri Wahyudi tersebut diperkuat oleh pernyataan bapak Mulyadi sebagai berikut:

“Iya mas dari pihak Dinas Perikanan sering melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara budidaya ikan yang baik melalui teknik budidaya yang baru yaitu CBIB dan CPIB semua itu katanya



bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi budidaya perikanan di Kabupaten Lamongan.” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut bahwasanya terobosan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang budiaya ikan yang baik mulai dari pembenihan. Semua itu akan berdampak pada peningkatan kualitas perekonomian masyarakat pembudidaya yang ada di kawasan minapolitan. Hal tersebut sangat menguntungkan dengan adanya teknik budidaya yang dapat membantu peningkatan produksi dan terus mengembangkan kegiatan pembudidayaan ikan/udang.

#### **b. Faktor Penghambat**

##### **1) Kelemahan**

###### **a) Masih sulitnya para pembudidaya perikanan mendapatkan modal**

Masyarakat pembudidaya sebagian besar masih sangat susah dalam mendapatkan modal itu dilihat kondisi ekonomi disana yang hanya mampu memenuhi kehidupan sehari-harinya saja. Selain itu kurangnya pemanfaatan hasil produksi perikanan menjadi olahan yang lebih bernilai ekonomis tinggi membuat para pembudidaya disana hanya mengandalkan ikan segar yang mereka jual dipasar. Untung penjualan ikan pun tidak seberapa belum lagi adanya permainan tengkulak yang dinilai merugikan masyarakat dalam hal ini masyarakatnya bisa percaya kepada para tengkulak yang menjualkan ikanya di pasar. Hal ini dirasakan oleh bapak Mulyadi seorang pembudidaya



ikan yang ada di Desa Rayunggumuk yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“iya dek saya selama budidaya perikanan disini saya menggunakan modal pribadi tidak ada bantuan modal dari pemerintah semua itu saya dapat juga hasil buruh kesana kemari dek. Ada bantuan pupuk subsidi tapi itu pun juga masih mahal karena dijual di toko-toko yang pasti mengambil untung lebih sayapun jarang beli disana. Kalau hanya menggantungkan dari hasil penjualan ikan pasti kurang dek soalnya harga ikan tidak menentu ditambah permainan para tengkulak bisa saja bohong soal harga dipasar. Ya apa boleh buat kita percaya saja pada para tengkulak.” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 10.00 WIB)

Keterangan dari bapak Mulyadi diperkuat oleh keterangan dari bapak Tri Wahyudi selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya sebagai berikut:

“Iya kendala yang dialami untuk pengembangan kawasan minapolitan adalah modal mas, karena masyarakat sendiri kebanyakan melakukan budidaya dengan uang pribadi. Disini pemerintah dalam hal ini dinas perikanan hanya memberikan pendampingan dan pembinaan untuk saat ini mas.” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 07.30 WIB)

Berdasarkan keterangan dari kedua narasumber tersebut memberikan gambaran bahwa betapa membutuhkannya para pembudidaya akan modal yang selama ini masih dirasa sangat sulit. Pemerintah daerah sendiri hanya memberikan bantuan berupa pendampingan dan pembinaan-pembinaan kepada para pembudidaya yang dirasa oleh pembudidaya kurang berhasil. Para pembudidaya untuk melanjutkan proses budidaya ikan mereka melakukan kerja sampingan untuk mengumpulkan modal, selain itu juga melakukan hutang kepada para tengkulak maupun tetangga untuk melanjutkan proses budidaya. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak dapat melakukan proses budidaya ikan, adapun yang melakukan budidaya

ikan itupun mereka akan terkendala akibat tidak adanya pemasukan dari hasil budidaya yang mereka kelola.

b) Keterbatasan penyediaan benih yang berkualitas

Penyediaan benih yang berkualitas pastinya akan berimplikasi pada produksi ikan yang meningkat karena benih dirasa sangat kebal dari penyakit/virus. Terbatasnya benih berkualitas di Kabupaten Lamongan membuat para pembudidaya ikan beli benih yang seadanya dan harganya pun relatif lebih murah. Semua itu membuat hasil produksi pembudidaya mengalami penurunan yang signifikan. Sehingga ada juga yang membeli benih sampai ke luar daerah ataupun sampai keluar pulau. Semua itu dirasakan oleh bapak Khoirul Uman yang berasal dari Desa Karangan yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“iya dek untuk benih di Kabupaten Lamongan sangat terbatas terutama yang benih berkualitas. Biasanya banyak para pembudidaya perikanan disini membeli benih sampai ke Tuban, Situbondo ada juga yang sampai ke Pulau Bali.” (wawancara pada tanggal 27 januari 2018 pukul 12.30 WIB)

Berdasarkan keterangan dari bapak Khoirul Uman diperkuat oleh keterangan bapak Basuki selaku salah satu pembudidaya ikan di Glagah sebagai berikut:

“emang mas untuk bibit/benih sendiri kebanyakan jika orang memiliki modal besar mending beli keluar daerah karena dianggap kualitas bibit di Lamongan kurang begitu baik, serta adapun bibit yang baik itupun sangta terbatas jumlahnya dan semua itu tidak mampu mencukupi kebutuhan bibit disini.” (wawancara pada tanggal 27 januari 2018 pukul 12.30 WIB)

Berdasarkan keterangan kedua narasumber tersebut menggambarkan bahwa keterbatasan bibit berkualitas yang ada di Kabupaten Lamongan.

Keterbatasan itu membuat para pembudidaya harus rela mendapatkan bibit berkualitas di luar daerah Kabupaten Lamongan, ada juga yang membeli bibit lokal dengan resiko bibit tersebut memiliki kualitas yang kurang baik sehingga akan mempengaruhi hasil produksi perikanan. Hal tersebut juga mampu menghambat proses budidaya perikanan yang ada disana dengan merogoh uang yang lebih untuk mendapat bibit yang unggul dengan harapan hasil produksi yang memiliki nilai jual yang tinggi pada saat masa panen.

- c) Masyarakat pembudidaya yang belum menguasai teknologi budidaya yang modern

Masyarakat pembudidaya yang mayoritas merupakan masyarakat pedesaan yang sangat awam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam pembudidayaan perikanan yang mengalami perkembangan teknologi semakin modern. Semua itu terlihat dari budidaya ikan yang mereka lakukan masih sebagian besar dengan metode tradisional. Sehingga semua itu mengakibatkan masyarakat pedesaan sangat susah untuk berkembang dalam hal melakukan budidaya perikanan. Pernyataan itu diperjelas oleh bapak Tri Wahyudi selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang memberi keterangan sebagai berikut:

“untuk pembudidaya di daerah Kabupaten Lamongan Kebanyakan masih menggunakan teknologi tradisional seperti lahan tambak itu sendiri aslinya persawahan yang dialih fungsikan menjadi tambak saat musim hujan dan sedikit yang sudah menggunakan teknologi semi intensif, intensif dan budidaya menggunakan terpal HDPE.”

(wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 07.30 diruangan Kepala Bidang Perikanan Budidaya)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Khoirul Uman pembudidaya di Desa Karang yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“iya mas untuk pembudidayaan disini masih banyak yang tradisional dengan mengalih fungsikan persawahannya menjadi tambak, karena kebanyakan ekonomi masyarakat yang menengah kebawah mana mungkin bisa menjadikan sawahnya sepenuhnya jadi tambak permanen karena disini yang penting lahan persawahannya bisa dimanfaatkan dan menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari meskipun saat musim hujan yang sering terjadi banjir.” (wawancara pada tanggal 27 januari 2018 pukul 12.30)

Penjelasan dari kedua narasumber dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penguasaan teknologi di kawasan budidaya perikanan Kabupaten Lamongan dirasa masih kurang memadai dan perkembangannya relatif lambat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran dan masih setengah-setengah para pembudidaya ikan dalam memanfaatkan potensi perikanan yang menjanjikan di daerahnya. Akhirnya perkembangan perikanan di daerah tersebut kurang mampu mengikuti perkembangan zaman dimana seharusnya telah melakukan pembudidayaan perikanan dengan teknologi modern tapi mereka masih banyak yang menggunakan teknologi tradisional.

d) Kurang optimalisasi tenaga ahli dalam melakukan pembinaan kepada pembudidaya ikan

Pelaksanaan program minapolitan di Kabupaten Lamongan dimulai sejak 2010 hingga sekarang dan masih kurang maksimal, hal tersebut dipengaruhi banyak faktor salah satunya yaitu faktor pembinaan kepada masyarakat pembudidaya ikan. Pembinaan yang dilakukan oleh beberapa

tenaga ahli dirasa kurang optimal dalam melakukan pembinaan sehingga masih banyak pembudidaya yang kurang mengerti tentang cara budidaya ikan yang baik. Keterangan tersebut diperjelas oleh bapak Tri Wahyudi selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang mengatakan sebagai berikut:

“kami disini akan lebih mengoptimalkan fungsi penyuluh dan UPT Perikanan dalam melaksanakan pembinaan di lapangan serta mengadakan *demfarm*/percontohan terhadap inovasi budidaya perikanan” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 07.30 WIB)

Pernyataan tersebut di perkuat oleh bapak Mulyadi selaku pembudidaya ikan di Desa Rayunggumuk sebagai berikut:

“sering sih mas kalau sosialisasi dan pembinaan itu malah tiap bulan pasti ada dari Dinas Perikanan datang kesini tetapi tidak semua pembudidaya diikut sertakan, saya kalau diajak ya ikut kalau tidak ya tidak ikut mas.” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan dari kedua narasumber dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembinaan yang dilakukan kepada para pembudidaya kurang maksimal. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembinaan yang dilakukan hanya pada jajaran petinggi desa, untuk masyarakat umum belum secara menyeluruh. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum terlalu tertarik ambil bagian untuk pengembangan budidaya perikanan. melihat sifat masyarakat pembudidaya yang tidak mau tahu seperti itu akan sulit melakukan pengembangan budidaya perikanan.

## 2) Ancaman

### a) Ketidakstabilan harga jual hasil perikanan di pasar

Penjualan hasil perikanan terutama udang vanname yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Lamongan itu dibawa para tengkulak ke pasar sering masih mengalami kendala. Kendala itu diakibatkan oleh harga jual yang dipatok oleh para tengkulak yang tidak bisa dipastikan, selain itu juga diakibatkan oleh permainan harga yang dilakukan oleh para tengkulak di pasar dan belum adanya penetapan harga pasar terutama pada komoditas udang vanname. Permasalahan ketidakstabilan harga itu dirasakan oleh bapak Basuki selaku pembudidaya udang vanname di Desa Karangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“kalau jual udang/ikan biasanya ke tengkulak mas, tengkulak disitu tidak langsung memberi uang ke saya melainkan tengkulak membawa dan menjual hasil udang/ikan dipasar setelah terjual baru saya menerima uang. Berapapun harga ikan/udang dipasar tidak menentu kadang naik turun entah ada permainan harga dari tengkulak atau tidak kami semua Cuma bisa percaya. Sementara harga untuk bulan 11- 2 stabil sedang pada bulan 3-6 hancur akibat adanya panen raya ikan. Jika harga sudah ditetapkan oleh pemerintah kami tentunya senang, kemungkinan para pembudidaya di sini bisa sejahtera.” (wawancara pada tanggal 27 januari 2018 pukul 12.30 WIB)

Permasalahan ketidakstabilan harga di pasar juga diperkuat oleh pernyataan bapak Ir. Suyatmoko selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“untuk permasalahan harga ikan itu tergantung pada permintaan pasar itu sendiri, pemerintah tidak bisa menetapkan harga ikan secara baku karena untuk pemasaran ikan itu sendiri tergantung dari kebutuhan pasar ikan tersebut.” (wawancara pada tanggal 22 januari 2018 pukul 13.00 WIB di ruangan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan)



Keterangan dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan ketidakstabilan harga disebabkan oleh banyak terutama permainan para tengkulak yang menerima langsung hasil panen para pembudidaya. Semua itu juga permintaan pasar yang berubah ubah dan belum stabil membuat harga pun ikut tidak stabil. Adanya penetapan harga oleh pemerintah dirasa masyarakat akan meningkatkan kemakmuran masyarakat pembudidaya ikan.

b) Perubahan iklim yang tidak menentu

Perubahan iklim yang terjadi di seluruh permukaan bumi membuat perubahan musim yang terjadi tidak menentu, selain itu yang awalnya diprediksi akan terjadi musim kemarau panjang tidak terbukti dan musim yang tidak bisa diprediksi membuat hasil perikanan budidaya menjadi menurun. Perubahan iklim tersebut sangat berdampak pada pembudidaya ikan di Kabupaten Lamongan yang membuat sulit mengontrol budidaya ikan karena suhu yang kadang panas dan dingin membuat pertumbuhan ikan menjadi tidak normal dan tidak jarang ikan mengalami kematian. Perubahan iklim yang terjadi dirasakan oleh bapak Khoirul Umam salah satu pembudidaya di Desa Karang yang memberikan keterangan sebagai berikut:

“perubahan cuaca juga menjadi ancaman para pembudidaya perikanan disini mas. Adanya perubahan iklim membuat pertumbuhan ikan menjadi lambat dan juga bisa mengalami kematian semua itu karena suhu air yang bisa berubah sewaktu waktu dan ikan/udang tidak mampu beradaptasi dengan pola suhu yang sering berubah-ubah sehingga akhirnya mengalami kematian. Akhirnya pembudidaya juga yang dirugikan jika banyak ikan/udang yang mengalami kematian.”  
(wawancara pada tanggal 27 Januari 2018 pukul 12.30 WIB)

Berdasarkan penjelasan tersebut diperkuat pula oleh keterangan dari bapak Mulyadi pembudidaya dari Desa Rayunggumuk sebagai berikut:

“untuk pembudidayaan perikanan disini terutama komoditas unggulan seperti udang vannamee memerlukan cuaca yang tidak terlalu ekstrim. Adanya cuaca yang ekstrim tersebut membuat udang tidak mampu beradaptasi dengan suhu air dengan cepat sehingga memperlambat pertumbuhan udang dan bisa juga membuat udang mati dengan adanya cuaca ekstrim.” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pada pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan keterangan kedua narasumber tersebut menggambarkan bahwa perubahan iklim tersebut sangat berdampak pada pembudidaya ikan yang ada disana, banyak pembudidaya yang menurun hasil produksi perikanan. Perubahan cuaca yang awalnya panas tiba-tiba hujan membuat suhu air di dalam tambak tidak menentu, sehingga para pembudidaya harus menerima bahwa hasil perikannya menurun. Adanya penurunan hasil perikanan yang didapat akan berdampak juga pada perekonomian masyarakat yang tidak menentu.

c) Adanya perkembangan penyakit/virus

Perkembangan suatu penyakit/virus tidak mampu terbantahkan lagi tidak terkecuali pada perikanan. Penggunaan obat-obatan kimia dan pupuk anorganik membuat perkembangan suatu penyakit/virus baru yang menjangkiti lahan budidaya perikanan masyarakat. Semua ini diperjelas oleh bapak Tri Wahyudi selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang menjelaskan sebagai berikut:

“kebanyakan para pembudidaya perikanan di Kabupaten Lamongan masih sangat menggantungan hasil perikanan dari penggunaan pupuk anorganik dan obat-obatan kimia lainnya. Padahal penggunaan pupuk anorganik dan obat-obatan kimia memiliki dampak yang tidak baik

dalam waktu yang lama akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan penyakit/virus baru pada lahan budidaya perikanan masyarakat” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 07.30 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari bapak Tri wahyudi tersebut diperkuat oleh keterangan bapak Mulyadi selaku Pembudidaya di Desa Rayunggumuk sebagai berikut:

“penyakit/virus merupakan salah satu faktor yang mampu menghambat hasil produksi perikanan disini mas. Apa lagi untuk sekarang ini tumbuh dan berkembang penyakit/virus yang baru pada ikan maupun udang mas, mungkin akibat salah kita juga terlalu mengandalkan pupuk anorganik yang sebenarnya berdampak tidak baik akhirnya tapi mau bagaimana lagi untuk mempercepat pertumbuhan ikan kami menggunakan cara yang salah.” (wawancara pada tanggal 30 januari 2018 pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan keterangan dari kedua narasumber tersebut peneliti mampu menyimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Lamongan masih sangat tergantung pada pupuk anorganik dan obat-obatan kimia dalam pembudidayaan perikanan. Masyarakat tidak mengetahui dampak dari penggunaan pupuk anorganik dan obat-obatan kimia dalam jangka waktu yang lama, masyarakat hanya tahu bagaimana menghasilkan produk yang melimpah tanpa memperdulikan efek sampingnya. Padahal dengan penggunaan pupuk anorganik dan bahan kimia yang dilakukan secara terus menerus juga berdampak pada perkembangan virus baru yang dapat menghambat produksi perikanan masyarakat di masa yang akan datang.

### C. Analisis Data

#### 1. Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dalam Rangka Meningkatkan Produksi Perikanan sebagai Penggerak Perekonomian Lokal

##### a. Pengembangan Sentra Produksi

Pengembangan sentra produksi merupakan upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Lamongan dalam upaya mengembangkan potensi pemanfaatan perikanan yang hingga sekarang ini dirasa masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan daerah kawasan minapolitan belum mampu untuk menumbuhkembangkan pusat-pusat budidaya perikanan, mengembangkan jaringan UMKM yang disinergikan dengan usaha pengembangan produk perikanan sesuai harapan pemerintah daerah. Padahal pengembangan sentra produksi merupakan upaya dalam pembangunan daerah ke arah yang lebih baik untuk di masa depan. Siagian (2014:5) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir”. Sedangkan menurut Syafi'i (1999:101) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu sebagai “suatu proses yang berorientasi pada masa yang akan datang”.

Berdasarkan pendapat dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan sentra produksi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memberikan perubahan

yang lebih baik di masa yang akan datang. Pembangunan merupakan suatu hal yang tidak mampu kita hindarkan sebab zaman yang semakin maju dan dinamika pertumbuhan yang semakin berkembang, sehingga pembangunan harus sangatlah direncanakan dengan baik untuk menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman yang semakin maju. Ada lima hal pokok yang perlu diperhatikan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang baik menurut Tjokroamidjojo 1987:57), yaitu:

- 1) Permasalahan dan potensi yang ada
- 2) Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai
- 3) Penetapan kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran
- 4) Penerjemahan kedalam bentuk program yang nyata
- 5) Persetujuan rencana

Berdasarkan lima hal pokok untuk menyusun perencanaan pembangunan yang baik menurut Tjokroamidjojo (1987:57) peneliti mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk melakukan suatu pembangunan baik yang dilakukan individu maupun kelompok tidaklah mudah, oleh karena itu individu maupun kelompok harus melihat aspek yang diperlukan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu peneliti mengkaitkan proses pembangunan dengan pengembangan sentra produksi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang selama ini dirasa kurang maksimal. Adapun upaya pengembangan sentra produksi perikanan budidaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan sendiri sekarang ini telah melakukan pembangunan yang lebih difokuskan untuk meningkatkan produksi perikanan. Sentra produksi yang dimaksudkan adalah

kegiatan menumbuh dan mengembangkan pusat-pusat budidaya dan pengelolaanya, mengembangkan jaringan UMKM yang disenergikan dengan usaha pengembangan produk itu sendiri.

#### **b. Rantai dan Pelaku Bisnis**

Pembangunan kawasan minapolitan menjadi salah satu faktor yang paling banyak diperhatikan oleh setiap daerah, hal ini diakibatkan karena kawasan minapolitan memiliki potensi besar dalam membangun ekonomi masyarakat sekitar. Semua itu tidak hanya dilihat dari segi potensi sumber daya perikanan yang melimpah melainkan juga pembangunan dari segi rantai dan pelaku bisnis dalam hal ini pembudidaya sebagai aktor utama dalam pengembangan kawasan minapolitan. Secara keseluruhan rantai dan perilaku bisnis yang ada di Kabupaten Lamongan sudah berjalan dengan baik tapi masih ada sebagian yang belum optimal. Lopulisan dan Alam (2002) dalam Syafi'i (2008:61) memberikan pengertian tentang pembangunan ekonomi lokal sebagai "pembangunan daerah yang terpusat kepada usaha-usaha pembangunan berbasis kepada masyarakat (*community base development*), dimana masyarakat dipandang sebagai sebuah *economic entity*".

Definisi pembangunan ekonomi lokal menurut Syafi'i (2008:71) pembangunan daerah mencakup tiga hal yang ada di daerah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi potensi daerah yang bersangkutan, serta kebutuhan dan kemampuan daerah menjalankan pembangunan.



- 2) Pembangunan daerah tidak hanya terkait dengan sektor ekonomi semata melainkan keberhasilan dari faktor lainnya seperti sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi dan lainnya.
- 3) Pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan yang memiliki pengaruh untuk menggerakkan sektor lainnya secara lebih cepat.

Berdasarkan pendapat dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi lokal disini tidaklah mudah karena harus dilakukan dengan dua pendekatan selain dari segi potensi sumber daya alam tetapi juga dilihat dari sumber daya manusia karena keduanya merupakan faktor dari berjalannya rantai dan pelaku bisnis di kawasan minapolitan. Hal itu semua yang membuat peneliti mengkaitkan antara pembangunan ekonomi lokal dengan rantai dan pelaku bisnis yang selama ini kurang diperhatikan dalam proses pembangunan terutama pembangunan sumber daya manusianya. Seharusnya pembangunan manusia dan sumber daya alam dilakukan secara seimbang agar mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dengan adanya siklus rantai dan pelaku bisnis yang baik. Adapun upaya pengembangan rantai dan pelaku bisnis yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dengan lebih memaksimalkan subsistem-subsistem yang saling berinteraksi mulai dari kegiatan di hulu (*on farm*) sampai kegiatan di hilir (*off farm*), hal ini dikarenakan keberadaan subsistem dalam siklus yang berjalan secara efektif akan mampu meningkatkan efisiensi produksi dan secara tidak langsung meningkatkan ekonomi lokal.

### c. Pola Pemasaran

Pengembangan pola pemasaran menjadi salah satu aspek yang menentukan keberlanjutan produksi perikanan di kawasan minapolitan. Jika pola pemasaran yang baik maka akan menghasilkan siklus roda pembudidayaan perikanan yang keberlanjutan. Selama ini pola pemasaran ikan yang ada di Kabupaten Lamongan belum berjalan dengan baik dan masih banyak masalah yang dihadapi terutama harga pasar yang tidak menentu. Pola pemasaran yang baik diperlukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan untuk lebih mengembangkan hasil produksi perikanan dikenal masyarakat luas. North dalam (1956) dalam Sjafrizal (2008:87) memberikan pernyataan bahwa potensi ekonomi lokal merupakan kemampuan suatu daerah untuk mengeksplor sumber daya yang ada untuk saling berkompetisi antar daerah dalam menumbuhkan perekonomiannya.

Berdasarkan pernyataan dari North (1956) dalam Sjafrizal (2008:87) tersebut bahwasanya suatu daerah harus benar-benar mampu memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara maksimal berguna untuk mendapatkan hasil yang baik dari proses persaingan antar daerah. Hal itu membuat peneliti mengkaitkan antara potensi ekonomi lokal terhadap pola pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang selama ini belum terlalu maksimal dalam pelaksanaanya untuk mengolah hasil produksi menjadi barang yang lebih bernilai ekonomis tinggi dalam memenangkan persaingan antar daerah. Adapun usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan pola pemasaran hasil produksi dengan membangun sistem dan usaha minabisnis yang berdaya

saing, membangun sistem dan usaha minabisnis yang berkerakyatan, membangun sistem dan usaha minabisnis yang berkelanjutan, serta membangun sistem dan usaha minabisnis yang terdesentralisasi.

#### **d. Permodalan**

Pengembangan permodalan di kawasan minapolitan merupakan strategi yang berguna untuk lebih mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi daerah secara maksimal yang berdampak pula pada perkembangan ekonomi lokal. Mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak maksimal dalam memanfaatkan potensi daerahnya karena terkendala oleh modal yang dimilikinya. Perlunya strategi penguatan modal yang dilakukan untuk memanfaatkan potensi daerah yang ada. Selama ini alokasi modal yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membantu pengembangan kawasan minapolitan kurang berjalan maksimal. Minzberg (1979) dalam Rangkuti (2002:3) memberikan pernyataan tentang strategi sebagai “respon secara terus menerus maupun atraktif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.” Sedangkan Salusu (2003:101) memberikan pernyataan tentang strategi sebagai “suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai saranannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.”

Berdasarkan dari kedua pernyataan tersebut bahwa modal merupakan faktor yang mendukung dalam keberlangsungan suatu organisasi, sehingga dalam memperoleh permodalan yang cukup dalam pengembangan kawasan minapolitan diperlukan strategi yang baik dari Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Dari

situ peneliti mengkaitkan antara strategi dengan permodalan yang digunakan dalam mengembangkan budidaya perikanan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam memberikan modal untuk mengembangkan perikanan budidaya sebagai berikut:

- 1) Pola kemitraan inti-plasma
- 2) Pola kemitraan subkontrak
- 3) Pola kemitraan dagang umum
- 4) Pola kemitraan kerjasama operasional

**e. Teknologi Produksi**

Perkembangan zaman yang sudah mulai berubah dan ilmu pengetahuan yang semakin luas membuat perkembangan teknologi semakin maju. Mengimbangi perkembangan teknologi yang semakin maju tersebut perlunya inovasi teknologi agar bisa mengikuti alur perkembangan zaman, namun pada kenyataanya teknologi produksi yang dipakai untuk pembudidayaan ikan di Kabupaten Lamongan masih kurang baik dengan masih banyaknya penggunaan teknologi tradisional. Upaya yang diperlukan untuk merubah masyarakat di kawasan minapolitan antara lain adalah melalui perubahan cara berfikir setiap individu disertai bentuk dukungan finansial dalam mengimbangi kemajuan teknologi dengan adanya kedua unsur tersebut kemajuan zaman dapat dicapai dengan baik. Kemajuan teknologi tersebut juga akan membantu dalam proses kinerja dengan baik, seperti halnya dulu pola kinerja memerlukan waktu yang lama sekarang berubah menjadi sangat singkat.

Perubahan teknologi yang semakin maju juga dapat di implementasikan kepada masyarakat para pembudidaya ikan yang memiliki banyak permasalahan. Pemerintah memperbaiki teknologi yang digunakan kepada masyarakat pembudidaya dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan teknologi tradisional dalam membudidayakan perikanan yang ditengarai kurang efektif dalam hal produktifitas. Hal itu semua dirubah dengan menerapkan teknologi pembudidayaan ikan yang lebih efektif dan efisien dalam mendongkrak hasil perikanan masyarakat. Perkembangan teknologi merupakan salah satu modernitas terhadap pengelolaan sumber daya yang ada, untuk itu paradigma pengembangan dan proses pengembangan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya alam yang ada.

Moekijat (1991:10) menyatakan bahwa pengembangan sebagai “usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan-kecakapan. Sedangkan Hasibuan (1990:170) pengembangan sebagai “peningkatan keahlian dan ketrampilan melalui pendidikan dan latihan, hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas.” Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa modernitas merupakan unsur yang tidak lepas dari paradigma pengembangan. Hal ini terlihat dari dampak yang dihasilkan dari modernitas membuat perubahan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Berdasarkan hasil pengamatan dan teori yang telah dikemukakan bahwa modernisasi tidak terlepas dengan adanya pengembangan, sebagaimana dulu

masih secara tradisional dalam pembudidayaan ikan dan sekarang sudah lebih modern dalam hal pembudidayaan perikanan. Melihat itu semua dapat diketahui dari situlah perkembangan teknologi dimulai, hal ini yang membuat peneliti mengkaitkan antara pengembangan dengan teknologi produksi yang maju dari zaman ke zaman. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam usaha mengembangkan teknologi dengan berbagai cara penggunaan kincir air, penggunaan terpal HDPE serta pemberian fasilitas untuk kegiatan percontohan budidaya ikan dengan metode cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan ikan yang baik.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya dalam Rangka Meningkatkan Produksi Perikanan sebagai Penggerak Perekonomian Lokal**

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya program minapolitan merupakan salah satu upaya untuk menyusun strategi apa yang akan dilakukan. Salah satunya dengan melakukan identifikasi faktor pendukung dan penghambat dengan menggunakan analisis SWOT, analisis tersebut digunakan karena sangat cocok dalam menentukan atau menganalisa strategi yang ada. Faktor-faktor yang menjadi pengaruh tersebut dikaitkan dengan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lamongan, sehingga menghasilkan sebuah usulan strategi yang berguna bagi pelaksanaan program minapolitan di tahun berikutnya. Berdasarkan analisis SWOT yang digunakan peneliti membagi menjadi dua jenis analisis, yang pertama analisis lingkungan internal (IFAS) dan yang kedua analisis lingkungan



eksternal (EFAS). Pembagian jenis analisis tersebut dapat memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi dan memberikan usulan strategi yang ada. Kedua analisis tersebut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

a. **Analisis Lingkungan Internal**

Analisis lingkungan internal adalah analisis yang dilakukan pada internal Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan. Mengetahui adanya kekuatan dan kelemahan tersebut memudahkan peneliti dalam merumuskan strategi yang diperlukan, untuk mengetahui lebih jelas faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan kawasan minapolitan sebagai berikut:

1) **Kekuatan (*Strengths*)**

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang telah memberikan berbagai macam keterangan, sehingga peneliti dapat menyimpulkan kekuatan apa saja yang mampu mendorong terlaksananya program minapolitan di Kabupaten Lamongan. adapun kesimpulan yang di dapat oleh peneliti antara lain sebagai berikut: a). Adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2013 yang menunjuk Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana program minapolitan.

Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 35 tahun 2013 merupakan landasan hukum yang menjadi penguat dalam terlaksananya program minapolitan pada semua daerah yang ditunjuk. Terbentuknya surat keputusan

tersebut selanjutnya pemerintah daerah dapat merumuskan strategi apa saja yang tepat dalam melaksanakan program minapolitan. Nicholas Henry dalam Indradi (2010:116) yang memberikan pernyataan tentang administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Berdasarkan pernyataan tersebut Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai daerah pelaksana program minapolitan menindaklanjuti keputusan menteri tersebut dengan mengeluarkan SK Bupati 181/151/Kep/413.013/2011 sebagai upaya mensinkronkan antara program minapolitan di Kabupaten Lamongan agar dapat terintegrasi dengan program yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan.

## 2) Kelemahan (*Weakness*)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang memberikan berbagai macam keterangan, sehingga peneliti mampu menyimpulkan kelemahan apa saja yang dapat menghambat terlaksananya program minapolitan di Kabupaten Lamongan. adapun kelemahan yang didapatkan oleh peneliti antara lain: a). Masih sulitnya para pembudidaya mendapatkan modal, b). Keterbatasan penyediaan benih berkualitas, c). Masyarakat pembudidaya yang belum menguasai teknologi modern, dan d). Kurang optimalisasi tenaga ahli dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat. Adapun keempat faktor kelemahan yang ditemukan, peneliti menjelaskanya sebagai berikut:

Permasalahan dalam mendapatkan modal masih dirasakan oleh masyarakat pembudidaya di Kabupaten Lamongan. kesulitan yang dihadapi masyarakat tersebut akibat dari tidak stabilnya harga hasil produksi perikanan yang diberikan oleh para tengkulak. Harga jual yang diberikan oleh para tengkulak tidak dapat memberikan tambahan bagi pembudidaya perikanan di Kabupaten Lamongan, hal ini mengakibatkan masyarakat sangat sulit untuk melakukan budidaya ikan selanjutnya. Biasanya mereka melakukan kerja sampingan untuk mendapatkan modal untuk memenuhi kebutuhan budidaya ikan. Salusu (2003:101) memberikan pernyataan tentang strategi sebagai “suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai saranannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.” Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa dalam lebih mengembangkan budidaya perikanan harus dapat memanfaatkan semua sumber daya organisasi yang ada tidak terkecuali sumber daya modal untuk membantu keberlanjutan sebuah program pemerintah daerah.

Keterbatasan dalam mendapatkan benih yang berkualitas merupakan permasalahan selanjutnya yang di hadapi para pembudidaya perikanan di Kabupaten Lamongan. Semua itu akibat dari kurangnya pembinaan dalam melakukan pembenihan ikan yang berkualitas. Lopusian dan Alam (2002) dalam Syafi’I (2008:61) memberikan pernyataan tentang pembangunan ekonomi lokal sebagai “pembangunan daerah yang terpusat kepada usaha-usaha pembangunan berbais kepada masyarakat (*community base development*), dimana masyarakat dipandang sebagai sebuah *economic entity*. Berdasarkan pernyataan tersebut

seharusnya lebih menekankan pada pembangunan masyarakat dalam pembenihan bibit perikanan, sehingga pembudidaya tidak hanya mendapatkan benih berkualitas dengan membeli sampai ke daerah tetangga seperti tuban, situbondo bahkan sampai ke pulau bali. Jika pembangunan tersebut berhasil akan menjadikan masyarakat mandiri dan mampu menyediakan bibit dengan sendiri.

Masyarakat pembudidaya yang belum terlalu optimal dalam menguasai teknologi budidaya perikanan modern merupakan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Lamongan. masih banyaknya masyarakat yang menggunakan alat bantu tradisional dalam pelaksanaan pembudidayaan ikan sehingga kurang efisien dalam memperoleh hasil produksi. Kooten dalam Salusu (2003:104-105) tentang tipe-tipe strategi salah satunya menyebutkan *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumber daya) dimana strategi untuk lebih memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja organisasi dalam mengembangkan kawasan minapolitan, sumber daya tersebut dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa salah satu sumber daya pendukung untuk mengembangkan kawasan minapolitan adalah teknologi, dalam hal ini pemerintah sudah berupaya melakukan pembinaan tentang cara pembudidayaan ikan yang baik secara modern, tapi semua itu belum terlalu efektif dilakukan karena masih banyaknya masyarakat yang memilih cara tradisional.

Keterbatasan tenaga ahli sehingga kurang optimalnya melakukan pembinaan kepada masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pembinaan yang dilakukan hanya pada jajaran petinggi desa, untuk masyarakat umum belum secara

menyeluruh. Hasibuan (1990:170) pengembangan adalah peningkatan keahlian dan keterampilan melalui pendidikan dan latihan, hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas. Berdasarkan pernyataan tersebut seharusnya pembinaan yang dilakukan lebih dioptimalkan kepada masyarakat pembudidaya sehingga mampu melakukan peningkatan dalam produksi ikan. Padahal kenyataanya masih banyak masyarakat yang tidak ambil bagian untuk pengembangan budidaya perikanan. melihat sifat masyarakat pembudidaya yang tidak mau tahu seperti itu akan sulit melakukan pengembangan budidaya perikanan.

Berdasarkan keterangan diatas adapun pengidentifikasian indikator faktor internal kedalam hasil penilaian yang sudah disimpulkan sehingga menghasilkan kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan perekonomian lokal. Kemudian dianalisis menggunakan matriks *Internal Strategy Factor Analysis Summary* (IFAS) untuk mengetahui total nilai keseluruhan dari indicator lingkungan internal dengan cara mengalikan antara bobot dan rating dari setiap indicator. Analisis ini digunakan untuk mengetahui posisi nilai keseluruhan lingkungan internal pada matriks internal atau *Internal Factor Evluation*. Adapun tabel matriks IFAS di bawah ini sebagai berikut:

**Tabel 19. Matriks IFAS Faktor Lingkungan Internal**

Indikator	Bobot	Rating	Bobot $\times$ Rating
Kekuatan: 1. Keputusan Menteri-KP No. 35 Tahun 2013	0,32	4	1,28
Kelemahan: 1. Permodalan	0,13	2	0,26
2. Penyediaan Benih Berkualitas	0,17	1,83	0,31
3. Teknologi Modern	0,18	2	0,36
4. Tenaga Ahli	0,2	2	0,4
Total	1	11,83	2,61

*Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti, 2018*

Dari tabel diatas bahwasanya jumlah perhitungan analisis IFAS faktor lingkungan internal diketahui dari perkalian antara bobot dan rating setiap indikator yang sudah disebutkan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui posisi nilai keseluruhan dari indikator lingkungan internal suatu organisasi. Sesuai tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 1 indikator internal sebagai kekuatan dan 4 indikator sebagai kelemahan dalam pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan perekonomian lokal di Kabupaten Lamongan dengan total nilai keseluruhan 2,61 yang berarti pada posisi sedang.

#### **b. Analisis Lingkungan Eksternal**

Analisis lingkungan eksternal merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui keadaan di luar Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Analisis eksternal teronsentrasi pada dua fokus yaitu peluang (opportunities) dan ancaman (threats) pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan program pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan. Menemukan faktor peluang dan ancaman tersebut, mempermudah peneliti dalam mengetahui pengaruh lingkungan eksternal yang



ada pada pelaksanaan program minapolitan di Kabupaten Lamongan untuk kemudian diambil kesimpulan. Adapun faktor peluang dan ancaman yang didapat peneliti dari hasil observasi dan wawancara yang dijelaskan sebagai berikut:

**1) Peluang (*Opportunities*)**

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang telah memberikan berbagai macam keterangan sehingga peneliti dapat menyimpulkan peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam mendorong terlaksananya program minapolitan di Kabupaten Lamongan, adapun peluang yang didapat oleh peneliti antara lain sebagai berikut: a). Hasil produksi komoditas unggulan sangat menjanjikan, dan b). Teknik budidaya baru dari pihak pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan hasil produksi.

Hasil produksi perikanan yang menjadi komoditas unggulan sangat menguntungkan untuk dijual. M. Suparmoko (2002:99) potensi ekonomi lokal adalah kemampuan ekonomi yang ada pada daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan. Komoditas unggulan seperti udang vanname merupakan komoditas yang banyak diminati pasar untuk di konsumsi sehari hari, selain itu juga dapat dijadikan produk olahan lainnya. Perawatan dan masa panen yang relatif singkat menjadikan komoditas unggulan udang vanname menjadi favorit kalangan budidaya perikanan di Kabupaten Lamongan. Keuntungan tersebut memberikan

dampak yang baik bagi Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana program minapolitan dalam memberikan peluang dan memaksimalkan potensi perairan yang dapat menambah pemasukan daerah.

Teknik budidaya baru yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan diupayakan agar mampu mengelola potensi budidaya perikanan dengan baik, salah satunya menentukan komoditas unggulan yang mampu dengan cepat meningkatkan pendapatan para pembudidaya. Hasibuan (1990:170) pengembangan adalah peningkatan keahlian dan keterampilan melalui pendidikan dan latihan, hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas. Pemerintah mengajarkan cara budidaya ikan yang baik dengan teknik CPIB (cara pembenihan ikan yang baik) dan CBIB (cara budidaya ikan yang baik). Hal tersebut berpeluang untuk meningkatkan hasil produksi perikanan serta memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat pembudidaya di Kabupaten Lamongan.

## 2) Ancaman (*Threats*)

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber dengan keterangan yang bermacam-macam sehingga peneliti mampu menyimpulkan ancaman apa saja yang dapat menghambat terlaksanannya program minapolitan di Kabupaten Lamongan. Adapun kesimpulan yang didapat oleh peneliti antara lain sebagai berikut: a). Ketidakstabilan harga jual hasil perikanan di pasar, b). Perubahan iklim yang tidak menentu, dan c). Adanya perkembangan penyakit/virus. Dari ketiga faktor ancaman yang sudah diperoleh peneliti, kemudian peneliti menjelaskan sebagai berikut:

Ketidakstabilan harga jual ikan maupun udang dipasar dirasakan para pembudidaya disetiap masa panen semua informasi itu diperoleh peneliti dari beberapa narasumber pembudidaya. Kooten dalam Salusu (2003:104-105) tentang tipe-tipe strategi salah satunya menyebutkan *program strategy* (strategi program) strategi ini memperlihatkan pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu, tentang dampak dari program yang diluncurkan/diperkenalkan dan dampaknya untuk organisasi serta masyarakat yang menjadi sasaran suatu program serta mencari solusi alternative untuk menyelesaikan dampak yang negatif. Kenyataannya mereka masih mengeluhkan pembudidayaan perikanan di Kabupaten Lamongan karena masih sulitnya mendapatkan tambahan modal. Banyak yang beranggapan bahwa ketidakstabilan harga itu dipengaruhi permainan para tengkulak yang ingin mendapatkan untuk yang lebih, hal itu tidak mampu dipungkiri mengingat belum adanya penentuan harga jual ikan maupun udang dari pemerintah.

Perubahan iklim yang tidak menentu merupakan masalah yang sekarang dihadapi oleh para pembudidaya yang ada di Kabupaten Lamongan. David (2006:6) manajemen strategi adalah sebuah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang mampu membuat organisasi mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwasanya perubahan iklim tidak mampu kita hindari tetapi setidaknya kita bisa mencegah dampak dari akibat perubahan iklim tersebut. Perubahan iklim tersebut dirasakan kecenderungan adanya penurunan hasil panen meskipun tidak banyak, hal tersebut diakibatkan suhu air tambak yang

sering berubah mengikuti cuaca membuat pertumbuhan ikan maupun udang terhambat. Belum lagi jika hujan deras membuat anak sungai bengawan solo meluap ke tambak warga mengakibatkan banyak ikan maupun udang yang hilang dibawa arus sungai.

Adanya perkembangan penyakit/virus juga merupakan faktor yang akan mengancam hasil produksi perikanan. David (2006:6) manajemen strategi adalah sebuah seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang mampu membuat organisasi mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwasannya penyakit/virus tersebut diakibatkan salah satunya juga iklim yang tidak menentu membuat berkembangnya penyakit/virus baru dengan cepat menjangkit budidaya perikanan masyarakat. Selain itu, penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan berdampak buruk dengan adanya penyakit/virus baru yang tumbuh dan berkembang menyerang budidaya ikan maupun udang masyarakat. Hal itu semua akan mengakibatkan penghasilan produksi perikanan masyarakat bisa menurun jika tidak segera diatasi.

Berdasarkan keterangan diatas adapun pengidentifikasian indikator faktor eksternal kedalam hasil penilaian yang sudah disimpulkan sehingga diketahui peluang dan ancaman dalam pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan perekonomian lokal. Kemudian dianalisis menggunakan matriks *External Strategy Factor Analysis Summary* (EFAS) untuk mengetahui total nilai keseluruhan dari indikator lingkungan internal dengan cara mengalikan antara bobot dan rating dari setiap indikator.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui posisi nilai keseluruhan lingkungan eksternal pada matriks eksternal atau *External Factor Evaluation*. Adapun tabel matriks EFAS di bawah ini sebagai berikut:

**Table 20. Matriks EFAS Faktor Lingkungan Eksternal**

Indikator	Bobot	Rating	Bobot $\times$ Rating
Kekuatan:			
1. Hasil Produksi	0,30	3,33	0,99
2. Teknik Budidaya	0,29	3	0,87
Kelemahan:			
5. Ketidak Stabilan Harga	0,15	1,66	0,25
6. Perubahan Iklim	0,12	1,66	0,20
7. Perkembangan Penyakit/Virus	0,14	1,5	0,21
Total	1	11,83	2,52

Sumber: Hasil Olahan Data Peneliti, 2018

Dari tabel diatas bahwasanya jumlah perhitungan analisis EFAS faktor lingkungan eksternal diketahui dari perkalian antara bobot dan rating setiap indikator yang sudah disebutkan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui posisi nilai keseluruhan dari indikator lingkungan eksternal suatu organisasi. Sesuai tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 2 indikator eksternal sebagai peluang dan 3 indikator sebagai ancaman dalam pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan perekonomian lokal di Kabupaten Lamongan dengan total nilai keseluruhan 2,52 yang berarti pada posisi sedang.

### c. Analisis Lingkungan Internal-Eksternal (IE)

Berdasarkan penjumlahan keseluruhan pengalian bobot dan rating *Internal-External Strategic Factor Analysis Summary* pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan, maka diperoleh total skor yang ada dikombinasikan kedalam Matriks Internal-Eksternal (IE) berupa diagram sembilan sel yang berguna untuk mengetahui strategi umum yang cocok

diterapkan dalam strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam meningkatkan perekonomian lokal. Total skor Internal Factor Evolution (IFE) sebesar 2,61 dan total skor External Factor Evolution (EFE) sebesar 2,52. Kedua total skor tersebut menunjukkan bahwa posisi matriks internal-eksternal berada pada sel lima (V), posisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya berada dalam kategori sedang. Menurut Rangkuti (2014:98) strategi yang tepat dilakukan yaitu strategi pertumbuhan (konsentrasi melalui integrasi horizontal) dan stabilitas (tidak ada perubahan dan lebih mengutamakan profit).

**Tabel 21. Analisis Matriks Internal-Eksternal Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya**

		Total Nilai IFE		
		Kuat	Sedang	Lemah
		4.0	3.0	2.0 1.0
T o t a l  N i l a i  E F E	Tinggi	<b>I</b> <b>Pertumbuhan</b> Konsentrasi melalui integrasi vertical	<b>II</b> <b>Pertumbuhan</b> Konsentrasi melalui integrasi horizontal	<b>III</b> <b>Pengurangan</b> Turn Around
	3.0			
	Sedang	<b>IV</b> <b>Stabilitas</b> Hati-hati	<b>V</b> <b>Pertumbuhan</b> Konsentrasi melalui integrasi horizontal <b>Stabilitas</b> Tidak ada perubahan profit strategi	<b>VI</b> <b>Pengurangan</b> Captive Company atau Divestasi
	2.0			
Rendah	2.0	<b>VII</b> <b>Pertumbuhan</b> Disverifikasi Konsentrik	<b>VIII</b> <b>Pertumbuhan</b> Disverifikasi Konglomerat	<b>IX</b> <b>Pengurangan</b> Bangkrut atau Likuidasi
	1.0			

Sumber: Hasil Analisis Matriks IFAS-EFAS



Menurut Rangkuti (2014:98), strategi pertumbuhan konsentrasi melalui integrasi horizontal adalah suatu kegiatan untuk memperluas organisasi dengan cara membangun di lokasi yang lain, dan meningkatkan jenis produk dan jasa, jika organisasi tersebut berada dalam industri yang sangat atraktif tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan dan profit, dengan cara memanfaatkan keuntungan *economics of scale* baik dalam produksi maupun pemasaran. Adapun juga analisis SWOT yang sudah dijelaskan pula diatas, peneliti dapat menemukan strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan matriks SWOT yang telah dipaparkan di dalam kajian pustaka, matriks SWOT yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Strategi S-O

- 1) Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta

Pengembangan kawasan minapolitan merupakan tugas dari pemerintah daerah dalam memaksimalkan pengelolaan potensi daerahnya, oleh karena itu perlunya kerjasama yang terjalin antara SKPD yang terkait di dalam ketetapan peraturan program minapolitan. Selain kerjasama antar SKPD terkait, juga harus adanya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak ketiga atau pihak swasta dalam melaksanakan program ini, dalam hal ini pihak ketiga/swasta dapat memberikan bantuan dalam bentuk sumber daya baik modal maupun teknologi budidaya. Selama ini pemerintah Kabupaten Lamongan belum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/swasta semua ini disimpulkan peneliti dari keterangan narasumber, padahal jika mereka dapat melakukan kerja sama

dengan pihak ketiga/swasta pasti akan lebih mudah dalam pengembangan kawasan minapolitan dan saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena faktor kekuatan dan peluang yang sudah dijabarkan oleh peneliti, maka rekomendasi yang mampu diberikan peneliti bagi program minapolitan tersebut yaitu melakukan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta dalam membantu merealisasikan program minapolitan. Maksud dari usulan tersebut adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Lamongan dengan pihak ketiga/swasta lebih kepada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

b. Strategi W-O

1) Penguatan peran *stakeholder* dalam keberhasilan program minapolitan

Program minapolitan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan hasil potensi perikanan di daerah, pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait memiliki peranan penting dalam terlaksananya program minapolitan. Kerjasama yang dilakukan oleh stakeholder selama ini dirasa kurang maksimal dilakukan, adanya program kerja yang seharusnya membantu para stakeholder dalam pelaksanaan program minapolitan. Belum maksimalnya koordinasi yang dilakukan para stakeholder disimpulkan peneliti berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber, oleh karena itu perlu adanya upaya penguatan peran stakeholder agar program minapolitan terlaksana dengan baik. Cara yang peneliti rekomendasikan dalam penguatan peran stakeholder dengan cara bupati menghimbau para stakeholder terkait untuk melakukan koordinasi lagi

dan juga kontroling kepada para stakeholder lainnya supaya lebih aktif demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

c. Strategi S-T

1) Penentuan batas terendah harga jual hasil perikanan dikalangan tengkulak atau pengepul

Produksi komoditas unggulan perikanan budidaya tambak di Kabupaten Lamongan sangat menjanjikan dan memberikan peluang besar dalam pengembangannya. Selain dimanfaatkan sebagai olahan rumah tangga perikanan di Kabupaten Lamongan sebagian juga ada yang di beli para usaha rumah makan yang ada di sana, serta tidak terkecuali pembeli luar daerah Lamongan. Namun akibat ketidakstabilan harga hasil produksi perikanan yang tidak menentu, akibat dari permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak/pengepul yang mengetahui harga pasar. Pemerintah Kabupaten Lamongan seharusnya melakukan upaya dengan cara menetapkan standar harga jual perikanan agar tidak ada lagi permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak/pengepul. Perlunya juga sosialisasi kepada para pembudidaya perikanan agar mengetahui harga jual ikan maupun udang disetiap masa panen untuk mengurangi kerugian dikalangan para pembudidaya perikanan. Hal itu semua bertujuan untuk keberlangsungan pembudidayaan yang ada di Kabupaten Lamongan.

2) Memperbaiki teknik budidaya dan pola penanganan pasca-panen para pembudidaya

Penjualan komoditas unggulan seperti udang vanname, ikan bandeng yang mulai berkembang di Indonesia dengan peningkatan produksi secara terus

menerus tiap tahunnya, itu semua tidak diikuti dengan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitarnya budidaya. Terhambatnya tingkat kesejahteraan para pembudidaya perikanan disebabkan oleh kualitas produksi yang masih tradisional sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal, serta penggunaan pupuk anorganik yang sangat berlebihan. Padahal dampak kedepannya penggunaan pupuk anorganik sangat tidak baik dengan berkembangnya penyakit baru dan bisa juga mengurangi hasil perikanan yang ada disana. Cara tersebut sebenarnya salah karena efek tersebut baru akan dirasakan setelah beberapa tahun kedepan, sehingga dikemudian hari akan menimbulkan penurunan hasil produksi perikanan dan berakibat menurun juga kesejahteraan masyarakat. Mengatasi permasalahan tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan melakukan bimbingan kepada para pembudidaya untuk menggunakan pupuk organik dan memberi tahu cara budidaya ikan yang baik dari mulai pembenihan sampai penanganan pasca-panen. Adanya upaya tersebut diharapkan mampu memperbaiki kualitas hasil budidaya perikanan menjadi lebih baik dan optimal, serta berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan.

#### d. Strategi W-T

##### 1) Pengembangan usaha kecil dan menengah dari hasil produksi perikanan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamongan merupakan tujuan pemerintah daerah, bukan hanya masyarakat yang dekat dengan pusat kota. Kawasan di pinggir yang jauh dari kota juga harus lebih dimanfaatkan potensi yang dimilikinya. Disini peneliti membahas tentang pelaksanaan program

minapolitan menuntut pemerintah daerah dalam memberikan kesejahteraan di kawasan minapolitan yang dianggap kurang selama ini. Upaya yang harus dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan adalah dengan membentuk usaha kecil dan menengah di kalangan masyarakat pembudidaya serta melakukan bimbingan ketrampilan untuk mengolah hasil budidaya perikanan agar tidak dijual dalam keadaan segar saja, tetapi bisa dijadikan olahan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Upaya tersebut secara otomatis akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga mampu menambah modal budidaya perikanan serta menciptakan masyarakat yang mandiri baik secara ekonomi maupun aspek lainnya.

**Tabel 22. Matriks SWOT Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya**

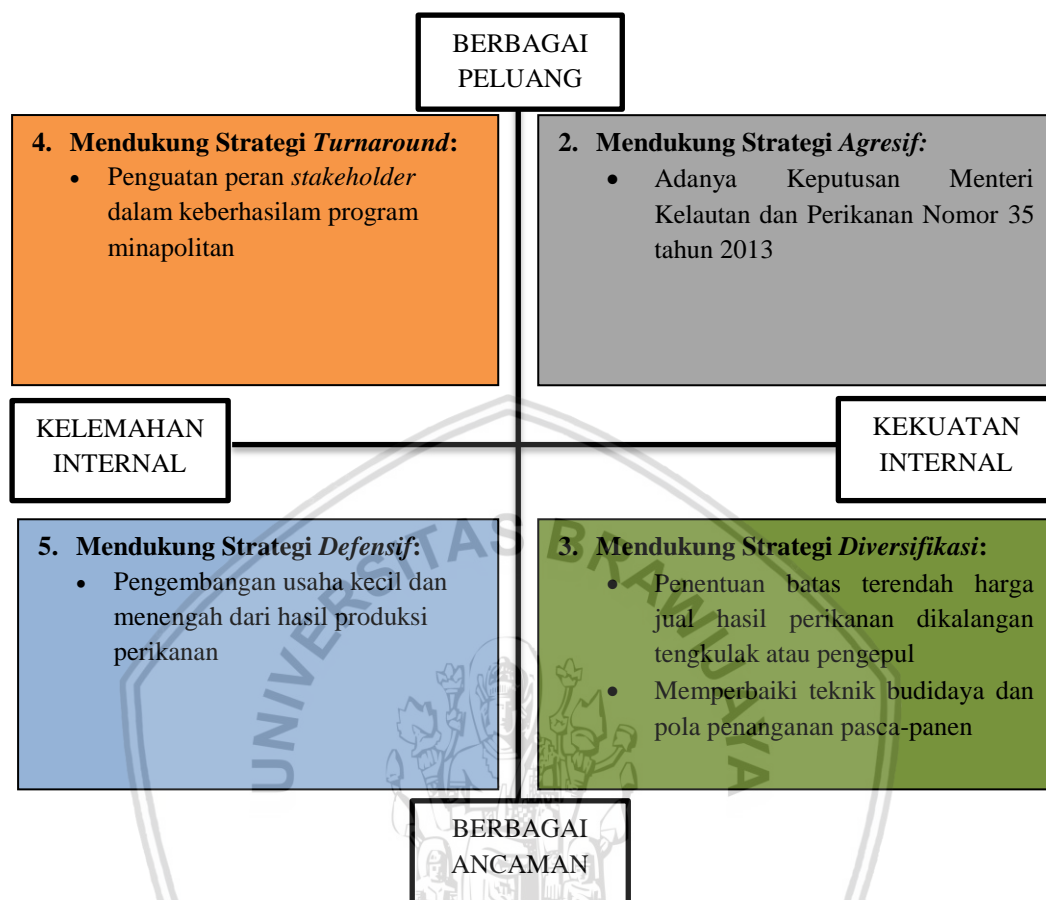
	Internal	Kekuatan ( <i>strengths</i> )	Kelemahan ( <i>weaknes</i> )
		1. Adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2013	1. Masih sulitnya para pembudidaya mendapatkan modal 2. Keterbatasan penyediaan benih berkualitas 3. Masyarakat pembudidaya yang belum menguasai teknologi modern 4. Kurang optimalisasi tenaga ahli dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat
Eksternal	Peluang ( <i>opportunities</i> )	Strategi S-O	Strategi W-O
	1. Hasil produksi komoditas unggulan sangat menjanjikan 2. Teknik budidaya baru dari pihak pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan	1. Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga atau swasta	1. Penguatan peran <i>stakeholder</i> dalam keberhasilan program minapolitan

hasil produksi.		
<b>Ancaman (<i>threats</i>)</b>	<b>Strategi S-T</b>	<b>Strategi W-T</b>
1. Ketidakstabilan harga jual hasil perikanan di pasar 2. Perubahan iklim yang tidak menentu 3. Adanya perkembangan penyakit/virus	1. Penentuan batas terendah harga jual hasil perikanan dikalangan tengkulak atau pengepul 2. Memperbaiki teknik budidaya dan pola penanganan pasca-panen	1. Pengembangan usaha kecil dan menengah dari hasil produksi perikanan

*Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2018*

Adapun strategi dalam merumuskan program, tindakan, keputusan strategis atau alternative kebijakan mendasar yang akan dilakukan organisasi untuk mengelola isu dengan tujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Pada tahap ini dirumuskan program-program strategis, alternative-alternatif kebijakan mendasar yang akan dilakukan organisasi untuk menanggapi dan menyikapi isu strategis yang berada pada tahap sebelumnya. Berdasarkan penjelasan dari apa yang sebelumnya bahwa peneliti membagi strategi yang akan dirumuskan melalui evaluasi isu strategis diatas dengan menggunakan diagram analisis SWOT sehingga strategi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan kawasan minapolitan untuk meningkatkan perekonomian lokal, sebagai berikut:





**Gambar 17. Diagram Analisis SWOT Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya**

*Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2018*

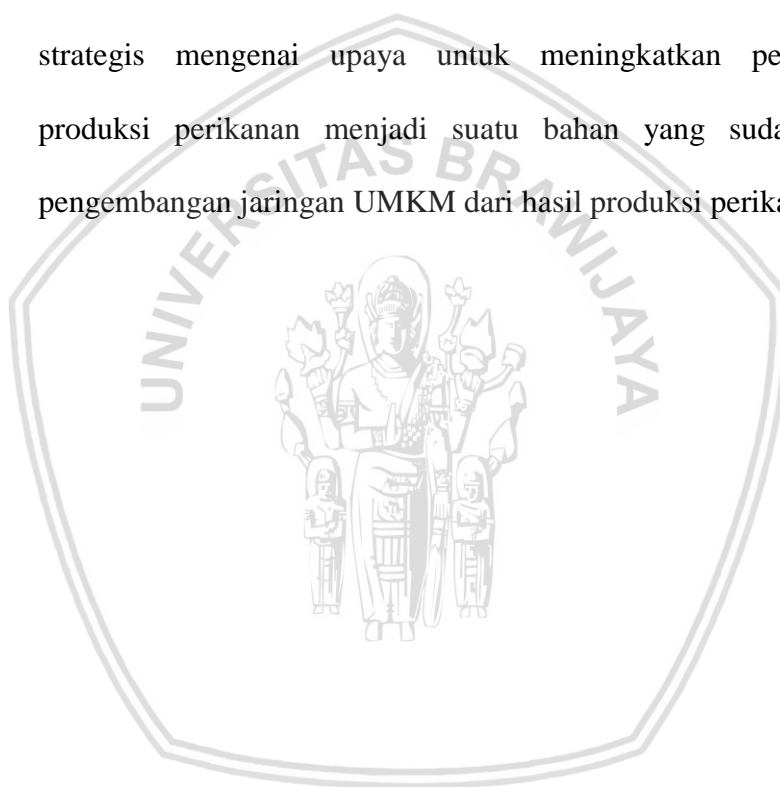
Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwasanya penempatan kuadran-kuadran pada strategi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan kawasan minapolitan untuk meningkatkan perekonomian lokal, sebagai berikut:

- Kuadran 1, pada posisi ini merupakan suatu dimana Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan melakukan pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya yang menguntungkan. Hal tersebut disebabkan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan memiliki

kekuatan dan peluang yang mendorong untuk menangkap peluang yang ada. Strategi yang tepat adalah *Agresif*. Strategi *agresif* diterapkan untuk menindaklanjuti isu strategis mengenai peran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mengembangkan program minapolitan perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan.

- b. Kuadran 2, pada posisi ini Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan kawasan minapolitan perikanan budidaya menghadapi berbagai macam ancaman tetapi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang paling tepat adalah dengan memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi *Diversifikasi*. Strategi *diversifikasi* diterapkan untuk menindaklanjuti isu strategis mengenai upaya untuk penentuan batas terendah harga jual hasil perikanan dikalangan tengkulak atau pengepul, dan memperbaiki teknik budidaya dan pola penanganan pasca-panen.
- c. Kuadran 3, pada posisi ini Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam pengembangan kawasan minapolitan memiliki peluang pasar yang menjanjikan dan dihadapkan pada kelemahan internal. Maka strategi yang harus diambil adalah strategi *Turnaround*. Strategi *turnaround* diterapkan untuk menindaklanjuti isu strategis mengenai Penguatan peran *stakeholder* dalam keberhasilan program minapolitan.

- d. Kuadran 4, pada posisi ini Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam pengembangan kawasan minapolitan perikanan budidaya berada dalam kondisi yang paling buruk dimana organisasi menghadapi kelemahan internal sekaligus ancaman dari luar organisasi. Sehingga strategi yang paling tepat adalah strategi Defensif. Strategi defensive digunakan untuk menindaklanjuti isu strategis mengenai upaya untuk meningkatkan pengembangan produksi perikanan menjadi suatu bahan yang sudah jadi dan pengembangan jaringan UMKM dari hasil produksi perikanan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang strategi pengembangan kawasan minapolitan dalam meningkatkan perekonomian lokal di Kabupaten Lamongan yang kemudian dijelaskan dan dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh peneliti, maka penulis memberikan kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan dan hasil analisis sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal yaitu:
  - a. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terpilih sebagai daerah pelaksana pengembangan program kawasan minapolitan di Jawa Timur sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan di 7 kecamatan sebagai perikanan budidaya dan 1 kecamatan sebagai perikanan tangkap. Terpilihnya Kabupaten Lamongan sebagai daerah pelaksana program minapolitan membuat pemerintah daerah mengeluarkan SK Bupati Lamongan Nomor 188/152/Kep/413.013/2011 sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lamongan. Terbitnya SK Bupati Lamongan tersebut juga diikuti dengan pembentukan kelompok kerja (POKJA) yang memiliki peran sebagai pelaksanaan tugas pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lamongan. POKJA tersebut terdiri dari beberapa perangkat daerah yang

memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam pelaksanaan program minapolitan. Namun selama pelaksanaan program minapolitin peneliti menemukan permasalahan yaitu belum maksimalnya peran kelompok kerja dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam melakukan pengembangan kawasan minapolitan, terutama kurangnya koordinasi dari kelompok kerja tersebut.

- b. Pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan memakai lima strategi pengembangan antara lain: 1). Pengembangan sentra produksi, 2). Pengembangan rantai dan pelaku bisnis, 3). Pengembangan pola pemasaran, 4). Penguatan permodalan, dan 5). Pengembangan teknologi produksi. Penyusunan strategi tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan masyarakat Kabupaten Lamongan dalam memanfaatkan potensi sumber daya perikanan yang ada, semua itu bertujuan untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan minapolitan.

2. Strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan merupakan strategi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya, namun dalam pelaksanaanya strategi tersebut masih banyak mengalami kendala terutama dalam memanfaatkan potensi sumber daya perikanan yang dirasa belum maksimal. Semua itu terlihat dari cara budidaya perikanan yang dilakukan masih kurang baik, pengelolaan

potensi sumber daya perikanan yang belum baik karena belum mampu menambah pemasukan ekonomi masyarakat pembudidaya yang lebih stabil.

## B. SARAN

1. Strategi pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya dalam rangka meningkatkan perekonomian lokal yaitu:
  - a. Pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lamongan masih belum maksimal, hal ini diakibatkan koordinasi yang dilakukan oleh Tim POKJA belum terlaksana dengan baik seluruh instansi yang tergabung di Tim POKJA masih berjalan sendiri-sendiri sesuai program kerja masing-masing. Akhirnya peneliti memberikan saran untuk ditingkatkan lagi peran melalui kegiatan pelatihan bersama seluruh Tim POKJA untuk meningkatkan koordinasi demi terlaksananya program pengembangan kawasan minapolitan.
  - b. Memaksimalkan potensi perikanan di Kabupaten Lamongan dalam program pengembangan kawasan minapolitan, ada dua hal yang utama untuk diperhatikan adalah pertama, sumber daya modal yang tidak sedikit. Selama ini banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan modal untuk budidaya perikanan sehingga kurang maksimalnya pemanfaatan potensi yang ada di daerah. Peneliti memberikan saran untuk menggandeng pihak ketiga/swasta agar mau menginvestasikan modal usaha buat para pembudidaya melalui program bantuan khusus pembudidaya perikanan. Pihak ketiga/swasta ini bisa juga dalam bidang perusahaan pengolah ikan



maupun yang bergerak di bidang perbankan agar mau memberikan kemudahan dalam peminjaman modal usaha kepada para pembudidaya. Dari situlah masyarakat akan mampu melakukan budidaya perikanan secara keberlanjutan. Kedua, Minat konsumen akan komoditas udang vanname yang terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun menjadi faktor pendorong dalam pengembangan budidaya udang vanname di Kabupaten Lamongan. Namun masih belum luasnya pasar yang dimiliki untuk memasarkan komoditas unggulan seperti udang vanname tersebut menjadi terkendala, permasalahan tersebut diakibatkan hasil produksi udang vanname yang hanya mampu memenuhi sebagian besar masyarakat Kabupaten Lamongan dan sekitarnya saja. Mengatasi masalah tersebut peneliti memberikan saran agar pemerintah memberikan bantuan teknik-teknik baru dalam pembudidayaan udang vanname dan mengoptimalkan teknik yang sudah ada untuk meningkatkan hasil produksi, serta menarik minat para konsumen untuk mau membeli komoditas unggulan seperti udang vanname dari Kabupaten Lamongan dengan demikian akan memperluas pemasaran hasil produksi.

2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya perikanan di Kabupaten Lamongan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menekan angka ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pemerintah dengan mampu mengelola hasil produksi perikanan. Selama ini masyarakat langsung menjual hasil produksi perikanan ke pasar dalam keadaan segar, itu semua mengakibatkan ketergantungan ekonomi terhadap pemerintah.

Untuk itu peneliti memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang pengelolaan hasil perikanan dalam bentuk kemasan yang sudah jadi, serta mendirikan usaha kecil dan menengah bagi masyarakat pembudidaya agar mampu membuat olahan seperti krupuk, terasi dan olahan lain dari pemanfaatan perikanan. semua itu akan menciptakan kemandirian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Rahardjo. 2015. *Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ainiyah, Siti Zumrotul. 2015. *Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Lokal Berbasis Minapolitan Perikanan Tangkap*. Malang. Fakultas Ilmu Admisitrasi. Universitas Brawijaya.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan. 2016. *Review Masterplan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021*. Lamongan: CV. IMAJI konsultan
- Baker, Alan. 2001. *Mengelola Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Dex Media Komputindo.
- David, Fred R. 2006. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Salemba Empat
- Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. 2016. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)*. Melalui <http://lamongankab.go.id/perikanan/files/2017/05/LKJIP-2016-Dinas-Perikanan.pdf>. Diakses pada 15 Februari 2018
- Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. 2014. *Profil Perikanan Kabupaten Lamongan*. Melalui <https://lamongankab.go.id/perikanan/index.php/profil>. Diakses pada 02 Desember 2017.
- Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. 2016. *Rekapitulasi Data Produksi Perikanan Kabupaten Lamongan*. Melalui <https://lamongankab.go.id/perikanan/index.php/2016>. Diakses pada 14 November 2017
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. *Agropolitan Minapolitan Konsep Kawasan Menuju Keharmonisan*: Jakarta
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Domai, Tjahjanulin. 2011. *Sound Governance*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Griffin, W Ricky. 2004. *Manajemen. Edisi Ketujuh Jilid 2, Penerjemah: Gina Gania*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hakim, EM. Lukman. 2016. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Handoko, Hamit. 2003. *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasibuan, Malayu. 1990. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Haji Masagung.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2010. *Dasar-dasar & Teori Administrasi Publik*. Malang: Agritek YPN.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Laode M. Kamaluddin. 2002. *Pembangunan Ekonomi Maritim Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Mathias, Robert L. Dan Jackson, John H. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles, Mathew B, Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis : A Methods Sourcebook-Third Edition*. London: Sage Publication Ltd.
- Moekijat. 1991. *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Moelong, Lexy J. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rangkuti, Freddy. 2002. *Menasuring Customer Satisfaction: Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, Freddy. 2014. *Analisis SWOT: "Teknik Membedah Kasus Bisnis" Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Salusu, J. 2003. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2016. *Potensi Perikanan Tangkap Indonesia*. Melalui <http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>. Diakses pada 23 Oktober 2017.

- Siagian, Sondang P. 2002. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010. *Regional, Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. Medan: USU Press
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: BADUOSE MEDIA.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Syafi'i, M. 2008. *Paradigma Baru Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Malang: AVERROES PRESS.
- Syafiie, Inu Kencana. 2008. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung.
- Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR.
- Widjaja, Sjarief. 2013. *Pengembangan Kawasan Minapolitan*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Wisuda, P. Amanda. 2012. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok*. Skripsi. Universitas Indonesia. Depok.
- Woyanti, Neni. 2008. *Analisis Sektor Potensial dan Pengembangan Wilayah Mendorong Pembangunan di Kabupaten Rembang*. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 18 (2) 1-156.
- Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/152/Kep/413.013/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010. Kabupaten Lamongan.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Jakarta.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Jakarta.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan. kementerian Kelautan dan Perikanan: Jakarta.

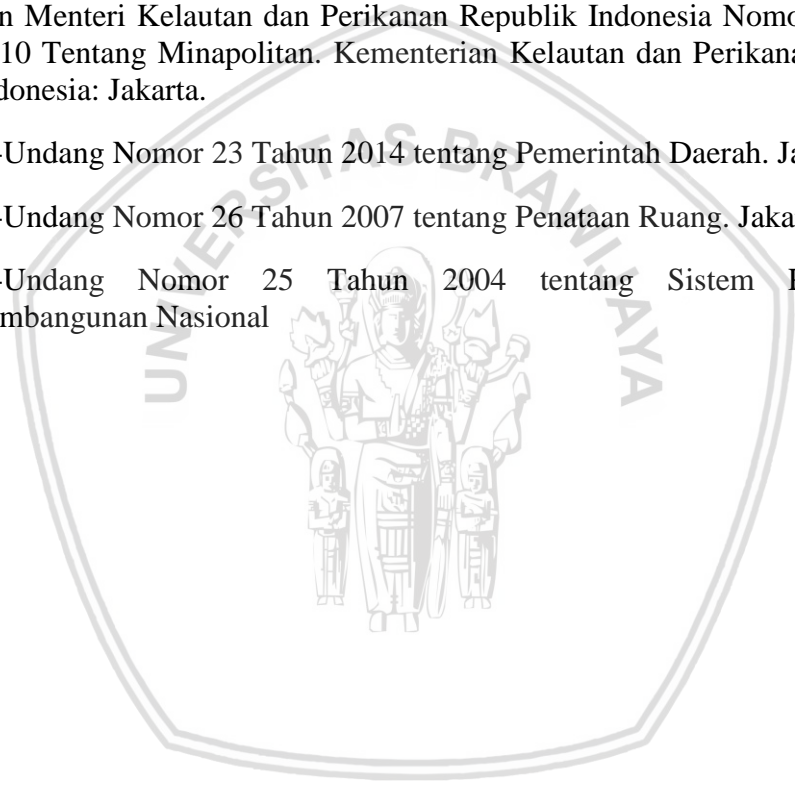
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Jakarta.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Minapolitan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional







## Lampiran 1

 **PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS PERIKANAN**  
Jl. Sumargo No.2 Telp. (0322) 321039  
E-mail: [dpl@lamongan.go.id](mailto:dpl@lamongan.go.id), Web site: [www.lamongan.go.id](http://www.lamongan.go.id)  
**LAMONGAN - 62217**

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 523/ ~~355~~ /413.113/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. TRI WAHYUDI, MM  
NIP : 19670610 199303 1 008  
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Bidang Perikanan Budidaya  
Alamat : Jl. Soemargo No. 2 Kabupaten Lamongan  
Tlp. : (0322)321039

Menerangkan bahwa :

Nama : FRADITYA IBNU RIZAL  
NIM : 145030101111001  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Universitas : Brawijaya Malang

Telah melaksanakan Penelitian/Survey/ Reseach pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada bulan Januari – Maret 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai kelengkapan Program Study yang bersangkutan.

An. KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN LAMONGAN  
Kepala Bidang Perikanan Budidaya

  
**Ir. TRI WAHYUDI, MM**  
Pembina  
NIP. 19670610 199303 1 008



## Lampiran 2

SALINAN



### BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/152/Kep/413.013/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/ 213 /Kep/413.013/2010  
TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN  
LAMONGAN TAHUN 2010

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 12/MEN/2011 tentang Minapolitan, maka perlu mengubah dan menyesuaikan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/213/Kep/413.013/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah ;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 12/MEN/2010 tentang Minapolitan ;
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kep.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
17. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/213/Kep/413.013/ 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan Tahun 2010.

Memperhatikan : Surat Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 2061/DPTS/P.I.510.D5/IV/2011, perihal Persiapan Pelaksanaan Program Minapolitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

: Mengubah Diktum KESATU dan KEDUA Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/213/Kep/413.013/ 2011, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :  
KESATU : Wilayah Kecamatan Glagah sebagai Sentra Kawasan Minapolitan Budidaya dengan hinterland Kecamatan Karangbinangun, Deket, Lamongan, Turi, Karanggeneng dan Kalitengah, dan Wilayah Kecamatan Brondong sebagai Sentra Kawasan Minapolitan Tangkap dengan hinterland Kecamatan Paciran.

KEDUA : Sentra Kawasan Minapolitan Budidaya dengan komoditas unggulan adalah udang vaname dan komoditas pendukung adalah bandeng, nila, tawes, tombro, lele dan patin, dan Sentra Kawasan Minapolitan Tangkap dengan komoditas unggulan adalah tongkol, layang, kembung dan kuniran.



## Lampiran 3

Acli

**BUPATI LAMONGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/151/Kep/413.013/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/ 202.1 /Kep/413.013/2010  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN  
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2011 tentang Minapolitan, maka perlu mengubah dan menyesuaikan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/202.1/Kep/413.013/2010 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



2

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 37).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

: Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/202.1/Kep/413.013/ 2010, diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 14 Juni 2011BUPATI LAMONGAN,  
ttd,  
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur  
 2. Sdr. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan  
 Provinsi Jawa Timur  
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan  
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan  
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan  
 Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  
 Lamongan  
 6. Sdr. Anggota Kelompok Kerja dimaksud

Disalin sesuai dengan aslinya  
 Kepala Badan Hukum,





Lampiran Keputusan Bupati Lamongan  
 Nomor : 188/151/Kep/413.013/2011  
 Tanggal : 14 Juni 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN  
 KAWASAN MINAPOLITAN KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Jabatan dalam Kelompok	Keterangan
1	2	3
I.	Penanggung Jawab	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan
IV.	Bidang Perencanaan	Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan
V.	Bidang Pemberdayaan/ Pelaksanaan	1. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong 2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan
VI.	Bidang Monitoring/Evaluasi	1. Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPEDA Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
VII.	Anggota	1. Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada BAPPEDA Kabupaten Lamongan 8. Kepala Unit Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Lamongan 9. Camat Wilayah Pengembangan Kawasan Minapolitan 10. Kepala UPT. Dinas Perikanan dan Kelautan Kecamatan Wilayah Pengembangan Kawasan Minapolitan

BUPATI LAMONGAN,  
 ttd,  
 FADELI

Disalin sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Hukum,  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 A. F. F. F.  
 LAMONGAN

## Lampiran 4

### PEDOMAN WAWANCARA

#### 1. Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

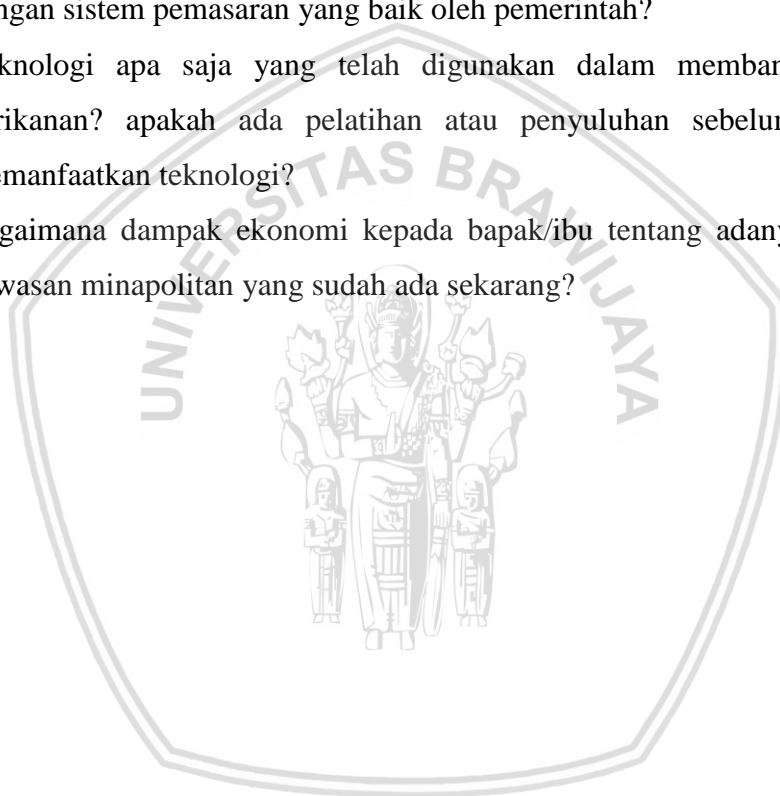
- a. Apa itu kawasan minapolitan dan tujuan utama adanya kebijakan kawasan minapolitan ini?
- b. Bagaimana pelaksanaan minapolitan di kabupaten lamongan selama ini?
- c. Bagaimana strategi pengembangan kawasan minapolitan dalam meningkatkan potensi perikanan?
- d. Apakah ada dukungan yang besar dari pemerintah daerah dalam pengembangan kawasan minapolitan? dalam bentuk apa dukungan itu dilakukan?
- e. Bagaimana kegiatan pelatihan pengolahan dan pemasaran ikan di kabupaten lamongan?
- f. Bagaimana sistem pemasaran dari hasil perikanan di lamongan itu sendiri pak? Apakah sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan?
- g. Bagaimana jika terjadi permasalahan dalam harga? Apakah pemerintah juga akan menetapkan harga ikan?
- h. Bagaimana peran kawasan pendukung dalam menjadi sentra produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan?
- i. Indikasi program-program apa saja yang sudah dijalankan oleh pemerintah dalam membantu mengembangkan kawasan minapolitan?
- j. Dengan adanya regulasi tersebut, apakah berdampak langsung kepada masyarakat?

## 2. Bidang Perikanan Budidaya

- a. Bagaimana kondisi saat ini (eksisting) kawasan minapolitan khususnya di kawasan perikanan budidaya?
- b. Bagaimanakah penyediaan bahan produksi seperti benih ikan, pakan, obat-obatan? Apakah dapat bantuan dari pemerintah dalam hal ini dinas perikanan dan dalam bentuk apa bantuan tersebut diberikan?
- c. Teknologi, bagaimanakah teknologi yang digunakan dalam budidaya perikanan? apakah masih tradisional atau sudah berinovasi dengan bantuan teknologi?
- d. Penyediaan sumber daya baik energi maupun manusia. Apakah dari segi sumber daya energi dalam hal ini air apakah kebutuhan air selama ini sudah tercukupi di setiap musimnya dan diperoleh darimana? Untuk sumber daya manusianya apakah sudah mempunyai keterampilan yang cukup dalam mengelola budidaya perikanan?
- e. Dari beberapa kegiatan tersebut seperti penyediaan bahan produksi, teknologi dan sumber daya apakah permasalahan yang dihadapi? Strategi apa yang dilakukan supaya terus berkembang?
- f. Bagaimana setelah adanya hasil perikanan. apakah ada pengolahan dari hasil perikanan tersebut dan hambatannya yang dihadapi dalam pengolahan hasil perikanan?
- g. Bagaimana pemasaran setelah hasil produksi? Apakah ada kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini swasta/perusahaan?
- h. Bagaimana peran kawasan hinterland dalam mendukung budidaya perikanan baik dari produksi sampai ke pemasaran?
- i. Hambatan apa pak yang sering dihadapi dalam melaksanakan kegiatan budidaya perikanan? terus bagaimana pak solusi atau upaya dalam menanggulangi hambatan tersebut?
- j. Dengan adanya ketetapan bahwa kabupaten lamongan sebagai kawasan minapolitan apakah ada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar?

### 3. Masyarakat Kawasan Minapolitan

- a. Apa bapak/ibu tahu tentang kebijakan kawasan minapolitan?
- b. Apakah perlu adanya pengembangan kawasan minapolitan untuk saat ini?
- c. Sudahkah pemerintah daerah membantu dalam memberikan pelatihan dan modal yang cukup untuk bapak/ibu dalam mengembangkan potensi perikanan?
- d. Bagaimana penjualan ikan dari hasil bapak/ibuk? Apakah sudah dikelola dengan sistem pemasaran yang baik oleh pemerintah?
- e. Teknologi apa saja yang telah digunakan dalam membantu produksi perikanan? apakah ada pelatihan atau penyuluhan sebelumnya dalam memanfaatkan teknologi?
- f. Bagaimana dampak ekonomi kepada bapak/ibu tentang adanya kebijakan kawasan minapolitan yang sudah ada sekarang?



## Lampiran 5

### Skor Bobot Faktor Lingkungan Internal Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya

Keterangan : Skor bernilai 1-4

Informan	Indikator faktor internal				
	Keputusan Menteri-KP No. 35 Tahun 2013	Permodalan	Penyediaan Benih Berkualitas	Teknologi Modern	Tenaga Ahli
1	4	3	3	3	4
2	4	2	3	3	3
3	4	2	3	3	3
4	4	1	2	1	2
5	4	1	1	2	1
6	4	1	1	2	2
jumlah	24	10	13	14	15

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2018

### Skor Rating Faktor Lingkungan Internal Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya

Informan	Indikator faktor internal				
	Keputusan Menteri-KP No. 35 Tahun 2013	Permodalan	Penyediaan Benih Berkualitas	Teknologi Modern	Tenaga Ahli
1	4	3	2	3	3
2	4	2	2	3	3
3	4	3	3	2	3
4	4	2	2	1	1
5	4	1	1	2	1
6	4	1	1	1	2
Jumlah	24	12	11	12	12

Keterangan : Skor bernilai 1-4

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2018

### Hasil Perhitungan Bobot Faktor Lingkungan Internal Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya

No	Indikator Internal	Total Skor	Rata-Rata	Bobot
1	Keputusan Menteri-KP No. 35 Tahun 2013	24	4	0,32
2	Permodalan	10	1,67	0,13
3	Penyediaan Benih Berkualitas	13	2,17	0,17
4	Teknologi Modern	14	2,33	0,18
5	Tenaga Ahli	15	2,5	0,2
Jumlah		76	12,67	1

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2018

Keterangan:

- ❖ Rata-rata (Mean) : Hasil pembagian total skor setiap indikator dengan jumlah informan 6 orang  
Contoh: Permodalan ( $24:6=4$ )
- ❖ Bobot : Hasil Pembagian rata-rata (mean) setiap indikator dengan jumlah rata-rata keseluruhan.  
Contoh: Permodalan ( $4:12,67=0,32$ )

### Hasil Perhitungan Rata-Rata Rating Faktor Lingkungan Internal Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya

No	Indikator Internal	Total Skor	Rata-Rata
1	Keputusan Menteri-KP No. 35 Tahun 2013	24	4
2	Permodalan	12	2
3	Penyediaan Benih Berkualitas	11	1,83
4	Teknologi Modern	12	2
5	Tenaga Ahli	12	2
Jumlah		71	11,83

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2018

Keterangan:

- ❖ Rata-rata (Mean) : Hasil pembagian total skor setiap indikator dengan jumlah informan 6 orang  
Contoh: Permodalan ( $24:6=4$ )



## Lampiran 6

### Skor Bobot Faktor Lingkungan Eksternal Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya

Informan	Indikator Faktor Eksternal				
	Hasil Produksi	Teknik Budidaya	Ketidakstabilan harga	Perubahan Iklim	Perkembangan Penyakit/virus
1	4	4	2	2	2
2	4	4	3	2	2
3	4	3	2	2	2
4	3	3	1	1	2
5	3	4	2	1	1
6	4	3	1	1	1
jumlah	22	21	11	9	10

Keterangan : Skor bernilai 1-4

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2018

### Skor Rating Faktor Lingkungan Eksternal Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya

Informan	Indikator Faktor Eksternal				
	Hasil Produksi	Teknik Budidaya	Ketidakstabilan harga	Perubahan Iklim	Perkembangan Penyakit/virus
1	4	3	2	2	2
2	3	4	2	2	2
3	4	3	2	2	2
4	3	2	1	1	1
5	3	3	1	2	1
6	3	3	2	1	1
Jumlah	20	18	10	10	9

Keterangan : Skor bernilai 1-4

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2018

### Hasil Perhitungan Bobot Faktor Lingkungan Eksternal Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya

No	Indikator Eksternal	Total Skor	Rata-Rata	Bobot
1	Hasil Produksi	22	3,66	0,30
2	Teknik Budidaya	21	3,5	0,29
3	Ketidakstabilan harga	11	1,83	0,15
4	Perubahan Iklim	9	1,5	0,12
5	Perkembangan Penyakit/Virus	10	1,66	0,14
Jumlah		73	12,15	1

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2018

Keterangan:

- ❖ Rata-rata (Mean) : Hasil pembagian total skor setiap indikator dengan jumlah informan 6 orang  
Contoh: Hasil Produksi ( $22:6=3,66$ )
- ❖ Bobot : Hasil Pembagian rata-rata (mean) setiap indikator dengan jumlah rata-rata keseleruhan.  
Contoh: Hasil Produksi ( $3,66:12,67=0,30$ )

### Hasil Perhitungan Rata-Rata Rating Faktor Lingkungan Internal Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya

No	Indikator Internal	Total Skor	Rata-Rata
1	Keputusan Menteri-KP No. 35 Tahun 2013	24	4
2	Permodalan	12	2
3	Penyediaan Benih Berkualitas	11	1,83
4	Teknologi Modern	12	2
5	Tenaga Ahli	12	2
Jumlah		71	11,83

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2018

Keterangan:

- ❖ Rata-rata (Mean) : Hasil pembagian total skor setiap indikator dengan jumlah informan 6 orang  
Contoh: Hasil Produksi ( $22:6=3,66$ )

**Lampiran 7**

Hasil foto wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Ibu Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan



Foto wawancara dengan salah satu masyarakat pembudidaya perikanan di kawasan minapolitan perikanan budidaya Kabupaten Lamongan

**Lampiran 8*****CURRICULUM VITAE*****Data Pribadi:**

Nama	: Fraditya Ibnu Rizal	
NIM	: 145030101111001	
Tempat, Tanggal Lahir	: Lamongan, 02 Desember 1996	
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	
Status	: Belum Menikah	
Agama	: Islam	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
Alamat	: Jl. Waduk Prijetan RT.03/RW.01, Desa Mlati, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.	
Alamat Email	: <a href="mailto:fradityaibnu@gmail.com">fradityaibnu@gmail.com</a>	
<b>Riwayat Pendidikan:</b>		
2000-2002	: TK Kuncup Mlati, Desa Mlati	
2003-2008	: SD Negeri Kedungpring II	
2008-2011	: SMP Negeri 1 Kedungpring	
2011-2014	: SMA Muhammadiyah 1 Babat	
2014-2018	: S1 Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.	
<b>Pengalaman Bekerja/ Magang:</b>		
2017	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro	